



Merajut Persatuan Merawat Kebangsaan

Andang Subaharianto

*Merajut Persatuan
Merawat Kebangsaan*

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 8:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau Ciptaan

Pasal 9:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- Penerbitan Ciptaan;
 - Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - Penerjemahan Ciptaan;
 - Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - Pertunjukan Ciptaan;
 - Pengumuman Ciptaan;
 - Komunikasi Ciptaan;
 - Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

- (1) Setiap Orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Merajut Persatuan Merawat Kebangsaan

Andang Subaharianto

UNTAG
B - Press



Ini Catatan -1

MERAJUT PERSATUAN MERAWAT KEBANGSAAN

Penulis:

Andang Subaharianto

ISBN:

978-602-53709-8

Editor:

Mohamad Il Badri

Penyunting:

Muttafaqur Rohmah

Desain Sampul:

Bagas Marga Pramana

Tata Letak:

Triana Novitasari

Penerbit:

UNTAG B-PRESS

Redaksi:

Jalan Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi

Telp 0333-411248

Fax 0333-411248

Email: untagbpress@gmail.com

Distributor Tunggal:

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI

Jalan Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi

Telp 0333-411248

Fax 0333-411248

Email: untagbpress@gmail.com

Kerjasama:

Jawa Pos Radar Banyuwangi

Cetakan pertama, 28 November 2018

hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Tentang Penulis

.....



Kelahiran Blitar, 17 April 1965. Pendidikan dasar hingga tingkat atas ditempuh di Blitar. Pada tahun 1983 diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember, dan lulus pada tahun 1988 dengan keahlian bidang linguistik. Pendidikan Pascasarjana (S2) bidang antropologi diselesaikan pada tahun 2001 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Sejak tahun 1990 aktif sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Jember. Pada tahun 2002 s.d 2004 dipercaya sebagai Kepala Pusat Penelitian Budaya Jawa & Madura Lembaga Penelitian Universitas Jember; tahun 2004 s.d 2008 menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember; tahun 2008 s.d 2012 dipercaya sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Jember.

Sejak muda di samping sebagai pengajar di almamaternya, aktif menjadi peneliti kebudayaan, dan penulis lepas di sejumlah media massa seperti *Kompas*, *Jawa Pos*, *Surya*. Beberapa hasil penelitiannya bersama tim diterbitkan sebagai buku, di antaranya: *Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur: Tantangan Industrialisasi Madura* (Malang: Bayumedia, 2004); *Madura Bicara PLTN* (Jember: Penerbit Universitas Jember, 2004); *Pangan, Makan, dan Ketahanan Pangan: Konsepsi Etnis Jawa*

dan Madura (Yogyakarta: Galangpress, 2011); *Lokalitas dalam Musik Banyuwangian dan Campursari: Transformasi Diskursif dalam Postkolonialitas Kultural* (Yogyakarta: CV Diandra Kreatif, 2017); *Merawat Budaya/Merajut Kuasa: Identitas Using dalam Kontestasi Kepentingan* (Yogyakarta: CV Diandra Kreatif, 2017). Tahun 2016 dipercaya sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi oleh PERPENAS (Badan Penyelenggara).

Kata Pengantar

Mendeskripsikan Realitas, Mempertajam Pemahaman



Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd.

Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Realitas masyarakat Indonesia di manapun berada sangat kental dengan keragaman. Keberagaman flora, fauna hingga budaya, agama, tradisi, etnis, bahkan ras dapat dilihat di mana mana. Kebhinekaan yang berkelindan dalam masyarakat itulah yang memberikan watak atau perangai masyarakat Indonesia bersifat toleran dan berpikir terbuka.

Tulisan-tulisan Andang Subahianto, yang juga rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, yang dikumpulkan dalam buku ini mampu mengungkapkan hal tersebut. Dinamika masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya berhasil dinarasikan dalam pelbagai perspektif, khususnya perspektif kebangsaan, politik dan kebudayaan dalam bahasa keseharian yang lebih komunikatif.

Relung kehidupan berbangsa dan bernegara dijadikan menu dialog dengan ringan dan mengena. Pelbagai peristiwa diurai dalam perspektif kebhinekaan yang menyatukan dengan gaya bertutur yang ringan dan enak dibaca.

Sebagai suatu tulisan yang sejak awal tidak dimaksudkan sebagai karya akademik yang ketat memungkinkan narasi menjadi lebih cair dan komunikatif. Tentu saja hal tersebut kadang memberikan ruang yang perlu penjelasan lebih lanjut,

misal di bagian “Negara Wajib Menegakkan Pancasila”. Dalam bagian awal ada kesan peringatan Hari Kelahiran Pancasila baru diperingati tanggal 1 Juni 2017. Padahal peringatan Pancasila setiap tanggal 1 Juni sudah dilakukan secara resmi pada tanggal 1 Juni 1947.

Kembali pada kumpulan tulisan Andang Subahianto, yang semula merupakan catatan lepas di *Radar Banyuwangi*. Kita patut apresiasi, di tengah kesibukannya sebagai rektor, masih menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk menulis. Melalui karya tulis yang menarasikan pelbagai peristiwa terdapat benang merah yang dapat dikonstruksi untuk merajut wawasan kebangsaan. Selamat membaca.

Sekapur Sirih

.....

Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggal 17 Maret 2016 saya menerima amanah dari Perpenas Banyuwangi (Badan Penyelenggara) untuk memimpin Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Ini bukan tugas biasa. Saat itu perguruan tinggi swasta di “kota gandrung” yang dijuluki kampus merah-putih itu sedang dilanda badai. Imbas dari konflik internal badan penyelenggara. Tapi saya optimis. Saya melihat sinar terang. Dari raut muka sebagian dosen, karyawan, dan mahasiswa, saya menangkap harapan yang kuat. Ada energi besar. Saya yakin, dan selalu meyakinkan teman-teman bahwa badai pasti (segera) berlalu. Dan benar!

Karena badai itu pula saya berkawan dengan teman-teman media. Terutama *Jawa Pos Radar Banyuwangi*. Kampus sangat butuh bantuan media. Buat memulihkan citra. Kepercayaan masyarakat, terutama Banyuwangi, terhadap kampus merah-putih harus segera tumbuh kembali. Maka saya pun menulis kembali. Meski sekadar esai pendek. Di *Radar Banyuwangi*, di sela-sela kegiatan lain. Di samping untuk kepentingan citra lembaga (tulisan-tulisan ini memang saya persembahkan untuk Untag Banyuwangi), siapa tahu gagasan-gagasan yang

saya sampaikan bermanfaat buat masyarakat, khususnya Banyuwangi.

Tulisan pertama terbit 1 Juni 2017 dengan judul “*Negara Wajib Menegakkan Pancasila*”. Untuk mengenang Pidato Bung Karno di BPUPKI yang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanpa terasa telah terkumpul 28 tulisan. Yang ke-28 terbit pada 27 September 2018 dengan judul “*Kereta Api*”. Mengingat topik tulisan bermacam-macam, lalu saya pilah ke dalam tiga bagian yaitu (1) Kebangsaan, (2) Politik, dan (3) Kebudayaan. Meski demikian, ada benang merah satu tulisan dengan tulisan yang lain.

Saya sangat bersyukur tulisan sebanyak 28 judul yang pernah terbit di *Radar Banyuwangi* itu dapat diterbitkan lagi dalam bentuk buku. Mengapa 28 judul saja? Pertama, pertimbangan ketebalan buku. Agar tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu tipis. Kedua, mengambil semangat angka 28. Sumpah Pemuda tanggal 28 dan tahun (19)28.

Terima kasih kepada Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., yang di tengah kesibukannya masih bersedia membaca tulisan saya dan membuat kata pengantar untuk buku ini. Kepada Untag B-Press yang bersedia menerbitkan catatan-catatan saya. Kepada *Radar Banyuwangi* yang setia menerbitkan catatan saya selama ini. Juga kepada Mbak Anggi Y. Amanda, Kepala Humas Untag Banyuwangi, yang telah menjembatani dengan *Radar Banyuwangi*. Yang mengingatkan saat *deadline*, bahkan turut mengoreksi kesalahan penulisan. Terima kasih juga kepada teman-teman Untag Banyuwangi atas kerjasama yang baik selama ini.

Terkhusus, saya berterima kasih kepada Mas Gik (Sugihartoyo), Ketua Perpenas Banyuwangi, dan Bung Sonny T. Danaparamita, Ketua Dewan Kehormatan Perpenas. Dua orang ini telah “memaksa” saya ke Banyuwangi. Serta kepada

Dr. Ahmad Basarah, Ketua Umum PA GMNI yang juga Wakil Ketua MPR RI. Berkat dukungan dan bantuan Bung Basarah, saya dapat bekerja dengan nyaman dan tenang karena saya yakin badai di Untag Banyuwangi akan segera berlalu. Catatan itu mustahil saya buat tanpa situasi yang nyaman dan tenang untuk bekerja.

Masukan dan kritik dari pembaca tentu sangat saya nantikan. Demi perbaikan terbitan berikutnya. Akhir kata, semoga buku bunga rampai ini bermanfaat, baik bagi teman-teman Untag Banyuwangi maupun masyarakat pada umumnya. Salam.

Banyuwangi, 28 November 2018

Penulis

Daftar Isi



Tentang Penulis	v
Kata Pengantar	vii
Sekapur Sirih	ix
Daftar Isi	xii
BAGIAN I. KEBANGSAAN	1
Merajut Persatuan	2
Merawat Kebangsaan	6
Negara Wajib Menegakkan Pancasila	10
Gotong Royong Itu Indah	14
Mengawal Tugas Sejarah	19
Segera Wujudkan Keadilan Sosial	23
BAGIAN II. POLITIK	29
Memaknai Tahun Politik	30
Pak Anas	35
<i>Last Minute</i>	40
Mana Trisaktimu?	44
Politik Bunga Mawar	49
Politik Meme	53
Anatomi Politik Uang	57

Merdeka Via Politik Gagasan	61
De-Soekarnoisasi Sia-Sia	65
BAGIAN III. KEBUDAYAAN	71
Banyuwangi Kota Film?	72
Umbul-Umbul Blambangan	76
Wandra	81
Puti, Wandra, dan Pop-O	85
Politik Gizi	89
Pahlawan Zaman Now	93
Nama Saya Kartini	97
Korupsi, Sirosis Kolektif	102
Bukan Ayo Sekolah!	106
Jurnalisme Apa?	110
<i>Out of The Box</i>	114
Tuan di Negeri Sendiri	118
Kereta Api	122

SELALU BANGETA
JADI ORANG
INDONESIA



BAGIAN I

Kebangsaan



“... manakala kita tidak memperhatikan pengalamannya sejarah dan tidak memberi bentuk dan politik yang benar kepada perjuangan kita – maka kemerdekaan itu mungkin terbang ke awang-awang.”

[Merajut Persatuan]

Merajut Persatuan

Namanya Koesno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, pada usia dua tahun namanya diganti Soekarno. Lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901.

Sebuah kurun waktu penting bagi sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Tahun saat bumi Hindia Belanda mulai digoyang radikalisme rakyat terhadap kekuasaan kolonial. Sejarawan Jepang, Takashi Shiraishi, menyebutnya “zaman bergerak”. Perlawanan kaum bumiputra mulai tumbuh meluas dengan cara baru. “Ketika Raden Ajeng Kartini menulis surat kepada sahabat penanya di Belanda, rapat umum, pemogokan, partai, dan demonstrasi sama sekali belum ada di Hindia,” tulis Shiraishi dalam disertasinya di Cornell University yang diterbitkan Grafiti dengan judul *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912 – 1926*. Baru di awal abad ke-20, rapat umum, mogok, partai, serikat buruh, demonstrasi, debat, ideologi, surat kabar, dan sejenisnya menjadi senjata baru.

Pergerakan kebangsaan mulai dimaknai. Setiap pemimpin pergerakan berpikir, berbicara, menulis, dan bertindak atas nama dirinya sendiri. Mereka menerjemahkan apa yang dipahami tentang senjata baru itu. Pergerakan lalu identik dengan individu-individu revolusioner. Dengan senjata baru

itu mereka memobilisasi segmen-segmen penduduk yang lebih luas. Dan bukan bumiputra saja. Banyak pula tokoh Belanda, Indo, Cina, ambil bagian.

Saya membayangkan betapa dinamis dan menggairahkan. Belajar berbangsa. Sebuah fajar kebudayaan baru. Kaum bumiputra yang dianugerahi kecerdasan otak dan hati serta berkesempatan menikmati kebijakan etis saat itu tentu akan terpikat.

Demikian pula Soekarno, yang tumbuh di zaman bergerak. Naluri politik, kecerdasan otak dan hatinya diasah di Gang Peneleh, Surabaya. Saat baru berumur 15 tahun. Sambil sekolah di HBS Surabaya. Bukan kepada sembarang guru. Tapi diasuh langsung tokoh besar zaman bergerak, HOS Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam (SI).

Pilihan Soekemi Sosrodihardjo, ayah Soekarno, menitipkan sang putra kepada Tjokroaminoto sangat tepat. Di Gang Peneleh Soekarno belajar banyak hal. Belajar nasionalisme, pemikiran Islam, juga pemikiran Karl Marx, dan yang lain. Belajar berorganisasi, pidato, juga menulis. Bertemu dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh penting SI, yang merupakan organisasi politik terbesar di Hindia Belanda pada masa itu. Juga berkawan dengan pemuda revolusioner anggota SI seperti Kartosoewirjo, Semaoen, Alimin, Musso. Saya membayangkan betapa seru dan produktif diskusi, perdebatan, di Gang Peneleh kala itu.

Sejarah rupanya membuka pintu buat Soekarno. Radikalisme rakyat ditumpas pemerintah kolonial, menyusul pemberontakan komunis di Jawa pada November 1926 dan Sumatera Barat Januari 1927. Pergerakan yang lahir dari bangkitnya SI, kata Shiraishi, mati secara mengenaskan. Pemerintah kolonial mengawasi secara ketat pergerakan bumiputra.

Tapi aneka senjata baru yang menandai fajar kebudayaan itu tak mungkin dirampas pemerintah kolonial. Partai, ideologi, serikat buruh/tani, rapat umum, mogok, surat kabar, dan

sejenisnya telah menjadi pengetahuan umum bumiputra. Partai yang mengorganisir diri dalam garis ideologis pun telah biasa. Rakyat jajahan telah terbagi secara ideologis.

Realitas inilah yang ditangkap Soekarno. Bukan kebetulan pada akhir 1926 ia menerbitkan serangkaian artikel yang berjudul *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme*. Artikel itu dilihat Shiraishi menandai “zaman baru”. Bukan hanya karena Soekarno adalah tokoh utama generasi baru. Tapi lebih penting lagi, kata Shiraishi, suaranya menunjukkan suatu kesadaran baru. Artikel itu dengan jelas dan tegas menyerukan persatuan partai-partai nasionalis (non-Islam dan non-komunis), Islam dan komunis dalam perjuangan mencapai Indonesia Merdeka. Soekarno melihat Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme adalah roh pergerakan. Bukan saja di Indonesia, tapi Asia. “Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di Asia. Inilah paham-paham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini,” tegasnya. Soekarno meyakini persatuan sebagai prasyarat ke arah Indonesia Merdeka. Maka harus diupayakan, diperjuangkan keterwujudannya.

Artikel itu bagaikan karya futurologi bagi sejarah bangsa Indonesia. Kekuatan nasionalis, Islam, dan komunis akan menjadi faktor penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Maka persatuan harus menjadi kata bertuah. Siapa pun sang pemimpin kelak. Di artikel itu Soekarno dengan tegas menulis, “Entah bagaimana caranya persatuan itu, entah pula bagaimana rupanya persatuan itu; akan tetapi tetaplah, bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia Merdeka itu, ialah Kapal-Persatuan adanya. Mahatma, jurumudi yang akan membuat dan mengemudikan Kapal-Persatuan itu kini barangkali belum ada, akan tetapi yakinlah kita pula, bahwa kelak kemudian hari mustilah datang saatnya Sang Mahatma itu berdiri di tengah kita!”

Persatuan lalu menjadi kata yang identik dengan Soekarno. Diulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Diingat-ingatkan kepada segenap pihak. Soekarno melihat potensi perpecahan bangsa Indonesia pada satu sisi. Tapi juga melihat potensi kekuatan pada sisi yang lain. Saya melihat seruan persatuan merupakan refleksi Soekarno sejak di Gang Peneleh. Di sana ia mulai melihat kekuatan sekaligus potensi perpecahan.

Indonesia telah merdeka. Seruan persatuan itu saya bayangkan terdengar nyaring di Gang Peneleh. Saat Soekarno berdebat dengan Semaun, Alimin, Musso dan Kartosoewirjo. Dan potensi perpecahan itu ternyata bukan omong kosong. Soekarno bukan hanya mendeteksi. Tapi membuktikannya. Tokoh yang menguji tesis persatuannya justru teman diskusinya di Peneleh. Musso mengujinya dengan Peristiwa Madiun 1948. Kartosoewirjo mengujinya lewat Negara Islam Indonesia.

Sesaat setelah diuji Musso, Soekarno berpidato. Dalam pidato yang diberi judul *Kepada Bangsa*, ia berujar, “... manakala kita tidak memperhatikan pengalamannya sejarah dan tidak memberi bentuk dan politik yang benar kepada perjuangan kita – maka kemerdekaan itu mungkin terbang ke awang-awang.”

Bagi Indonesia, bagian perjuangan itu adalah merajut persatuan. Lalu bentuk dan politik yang benar adalah gotong royong menggapai cita-cita kemerdekaan. **(6 Juni 2018)**

Merawat Kebangsaan

Gubernur Jenderal Van Heutsz memulai kekuasaannya pada 1904 dengan memerintahkan seluruh ruangan kantor pemerintah Hindia Belanda dipasang peta. Peta apa? Peta wilayah “dari Sabang sampai Merauke” (*van Sabang tot Merauke*).

Saya membayangkan betapa pejabat dan pegawai kantor pemerintah kolonial setiap saat memperhatikan peta itu. Awalnya imajinasi. Tapi Van Heutsz memberinya bukti. Dia berhasil membuat nyata tanah “dari Sabang sampai Merauke” sebagai kesatuan koloni Belanda. Termasuk Aceh. Tentu dengan cara militer. Karena prestasinya itu, nama Van Heutsz sangat dikenang di Belanda. Bahkan diabadikan sebagai nama kapal pada 1926, Kapal Van Heutsz.

Di atas tanah “dari Sabang sampai Merauke” itu terbentang jaringan rel kereta api. Di Pulau Jawa. Juga di Pulau Sumatera. Pada mulanya bukan untuk mengangkut orang. Tapi hasil bumi. Baik perkebunan maupun pertambangan. Konon antara 1900 – 1930 hasil perkebunan seperti gula, kopi, teh, lada, tembakau, karet, meningkat tajam. Produksi minyak bumi juga meningkat tajam. Jumlah perusahaan minyak yang beroperasi di Hindia Belanda dalam kurun 20 tahun (sampai 1920) sudah mencapai 50 buah.

Peta dan jaringan rel kereta api itu sungguh penting bagi penguasa kolonial. Tapi juga tidak kalah penting bagi kaum bumiputra. Peta dan jaringan rel kereta api mengoyak tata pandang lama masyarakat jajahan. Peta dan jaringan rel kereta api itu membangkitkan imajinasi tentang tata kehidupan baru. Dan imajinasi itu makin sempurna melalui kelompok kecil kaum bumiputra terdidik. Melalui sekolah, mereka mengenal pemikiran Barat.

Mereka membaca, menulis, berdiskusi. Lalu menerbitkan tulisan-tulisannya di surat kabar yang mereka bikin. Setelah di Hindia Belanda ada mesin cetak. Kaum bumiputra pun makin banyak yang tahu dan membayangkan tata kehidupan modern yang tak berdasarkan agama, suku, ras, yang disebut “negera-bangsa” (*nation state*). Mereka pun tahu kata eksploitasi, penjajahan, pergerakan, boikot, mogok, partai, revolusi, kemerdekaan, dan sejenisnya.

Tanah bumiputra bergerak. Seiring pergerakan modal yang makin membanjiri Sabang sampai Merauke. Maka Gubernur Jenderal Idenburg, pengganti Van Heutsz, harus bekerja keras. Yang dihadapi bukan lagi perlawanan lokal bersenjata. Tapi semangat nasionalisme yang menggelora. Yang dilembagakan dalam organisasi pergerakan nasional. Perlawanan baru kaum bumiputra terdidik yang berbasis analisis sosial. Yang sesungguhnya merupakan anak kandung kebijakan etis sang gubernur jenderal sendiri. “Kemanusiaan – tugas etis yang diembannya – ditantang gejala zaman. Zaman yang memilih arahnya sendiri bagai angin puyuh menerpa wajah kemanusiaannya. Berat. Berat bagi Idenburg...,” tulis Pramoedya Ananta Toer mengawali novel historisnya, *Rumah Kaca*.

Saya membayangkan betapa menggairahkan dialektika masyarakat “dari Sabang sampai Merauke” kala itu. Sebuah dialektika yang mematangkan gagasan kebangsaan. Di mata

Bung Karno, “dari Sabang sampai Merauke” bukan sekadar istilah ilmu bumi. Tapi konsep geopolitik. Di sana lah terbentuk kesatuan nasional, kesatuan cita-cita sosial, kesatuan kenegaraan, dan kesatuan ideologi. Meski penyatuannya berawal dari ekspansionisme Van Heutsz.

Maka di sana pula terkandung alasan fundamental mengapa negara kesatuan dipilih, bukan federal, bukan pula yang lain? Mengapa Pancasila dipilih sebagai dasar negara, bukan agama? Mengapa prinsip musyawarah diutamakan? Mengapa demokrasi di sana tidak cukup dipraktikkan pada tataran politik saja, tapi harus pula pada tataran ekonomi?

Merawat kebangsaan haruslah bertolak dari hal-hal fundamental itu. Merawat kebangsaan harus menyejarah. Tantangan kebangsaan tak akan pernah habis. Merawat kebangsaan tak akan pernah selesai.

Generasi terus tumbuh. Pergerakan modal di wilayah NKRI tak akan pernah berhenti. Ilmu pengetahuan dan teknologi pun terus-menerus menghadirkan inovasinya. Maka imajinasi dan aspirasi baru pun akan terus bertumbuh.

Dulu surat kabar adalah ikon zaman pergerakan nasional. Kini surat kabar sudah di ujung akhir sejarah. Internet, gawai (*gadget*) dan segenap pirantinya telah muncul menandai zaman baru.

Kosakata pun telah menarik garis tegas: zaman old dan zaman now. Bahkan para ahli ilmu-ilmu sosial dunia telah menyepakati istilah untuk menandainya: *post-truth*. Sebuah zaman tatkala antara *story* dan *history*, antara fantasi dan realitas, antara fiksi dan fakta, bercampur baur tak jelas batasnya.

Tanda makin kehilangan acuan. Bahasa makin tak bermakna. Kenyataan tiruan makin menggantikan kenyataan sesungguhnya. Apa yang oleh Baudrillard disebut “*simulacra*” makin membuncah memenuhi otak kita. Fakta makin tak berdaya. Cenderung kalah dengan emosi dan keyakinan

personal. Jangan-jangan di era *post-truth* kebangsaan pun terancam kehilangan rujukan.

Maka tantangan untuk merawat kebangsaan akan makin rumit. Dulu batas primordial mencair dalam komunitas “bangsa” (*nation*). Di era *post-truth* saya melihat justru primordialisme potensial tumbuh kembali. Bermula dari dunia maya, lalu nyata. Terutama agama. Sangat mungkin berkombinasi dengan ras/etnis. Sangat mungkin pula berkolaborasi dengan modal.

Sejarah kebangsaan kita hampir selalu diganggu oleh urusan ideologisasi agama. Awal Indonesia merdeka muncul DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), lalu Permesta/PRRI (Piagam Perjuangan Rakyat Semesta/Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Yang berbasis wilayah ada RMS (Republik Maluku Selatan), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Bahkan OPM masih beraksi hingga kini.

Lalu ada pembajakan pesawat Garuda DC 9 Woyla oleh Komado Jihad (1981), pemboman Candi Borobudur (1985). Berlanjut pemboman bus Pemudi Express jurusan Bali yang meledak di Banyuwangi (1985). Dan kini ada radikalisme, lalu terorisme bom bunuh diri di sarana publik.

Saya lalu teringat perkataan Albert Einstein. Katanya, imajinasi lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Kebangsaan Indonesia berawal dari imajinasi, dan ternyata diganggu pula oleh imajinasi lain. Maka merawat kebangsaan pun butuh imajinasi. Butuh pernyataan-pernyataan imajinatif. Dan pernyataan itu butuh kekuatan agar menjadi kenyataan. Kekuatan itu bisa bersumber dari ekonomi (kapital), politik (kekuasaan), ilmu pengetahuan (intelektualitas). **(20 Mei 2018)**

Negara Wajib Menegakkan Pancasila

Tanggal 1 Juni 2017 ini merupakan kali pertama bangsa Indonesia secara resmi mempe-ringatinya sebagai hari lahir Pancasila. Seperti kita tahu, ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Selain ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila yang akan diperingati oleh Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa, tanggal 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Penetapan ini sangat penting dan bermakna edukatif bagi kita bangsa Indonesia yang akan terus-menerus mengalami regenerasi. Sejauh ini ada kesan kita ragu-ragu, tidak berani melihat fakta sejarah. Masyarakat sering terbawa oleh perdebatan yang tidak konstruktif dalam membaca proses kelahiran Pancasila. Masyarakat sering dibingungkan oleh Pancasila versi 1 Juni, Piagam Jakarta dan 18 Agustus 1945. Keputusan Presiden 24/2016 itu saya kira mengakhiri keraguan itu. Di Kepres itu disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana kita kenal hari ini memiliki riwayat panjang yang bertolak dari pidato Bung Karno di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Sejak 1 Juni 1945 Pancasila mengalami perkembangan

sedemikian rupa hingga rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dengan membaca proses kelahiran tersebut kita dipahamkan bahwa Pancasila tersusun bukan dalam ruang hampa. Pancasila tersusun melalui pergumulan yang mendalam antara teori dan praktik, antara kekuatan ideologi, ilmu pengetahuan dan kekayaan pengalaman para “pendiri republik” dalam rentang penjajahan di bumi Indonesia ini. Karena itu, Pancasila merupakan kristalisasi yang sekaligus merefleksikan “suasana batin” rakyat Indonesia. Pancasila adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang beragam, yang hidup di atas hamparan ribuan pulau ini.

Dengan selalu memperingatinya secara resmi dan terbuka kita akan selalu diingat-ingatkan; akan selalu disegarkan dalam pemahaman. Bagi saya, menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara berarti menggunakan Pancasila sebagai sistem nilai yang menuntun kehidupan bernegara. Sebagai sistem nilai, Pancasila mengandung aspek kognitif, implementatif dan evaluatif.

Dari aspek kognitif, Pancasila seharusnya bisa ditransformasikan menjadi sistem pengetahuan yang akan menentukan pandangan dunia (*world view*) kita sebagai bangsa Indonesia. Dari sinilah kita melihat realitas kehidupan: ya sejarah, manusia, dunia secara khas. Dengan sistem pengetahuan itu kita melihat dan memahami kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan di tengah realitas kapitalisme global dewasa ini. Dengan sistem pengetahuan itu pula kita melihat bahwa dinamika kapital akan melindas yang lemah bila tidak dikendalikan. Dengan sistem pengetahuan itulah kita membaca kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai keniscayaan sehingga harus diterima dan dikelolanya untuk kepentingan bersama. Aspek kognitif Pancasila tersebut seharusnya mewarnai dunia sekolah, ranah akademik, di Indonesia.

Dari aspek implementatif, akan diperoleh sistem sosial yang mengatur hubungan-hubungan sosial. Pada level ini sistem pengetahuan tadi muncul dalam bentuk lembaga-lembaga, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, perilaku, dan simbol-simbol yang lain. Jika sistem pengetahuan kita mengajarkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, seharusnya juga diikuti aturan-aturan, kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang melindungi kepentingan rakyat. Jika sistem pengetahuan kita mengajarkan pelembagaan usaha kecil menengah untuk mendorong ekonomi rakyat, seharusnya juga muncul regulasi yang menyelamatkan usaha kecil menengah dari ekspansi usaha besar. Aspek implementatif ini akan tampak dari penyelenggaraan negara.

Selanjutnya, dari aspek evaluatif, sistem pengetahuan tersebut ditransformasikan menjadi nilai-nilai, baik etik maupun estetik. Pada tingkat ini Pancasila dapat diposisikan sebagai kritik ideologi. Setiap konsep pembangunan tentu memuat asumsi ideologis, mengingat setiap konsep didasari suatu pandangan tentang sejarah, manusia, dan dunia. Di samping itu, praktik pembangunan itu sendiri sering mengalami “ideologisasi”, yang pada gilirannya akan memperkuat struktur yang terbentuk atau memperkuat kepentingan kelompok tertentu. Ideologisasi pembangunan terjadi apabila pembangunan itu dapat diperalat oleh kelompok tertentu untuk membenarkan kepentingannya. Dengan aspek evaluatif ini seharusnya Pancasila selalu ditampilkan sebagai kritik atas praktik berbangsa-bernegara selama ini.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara jelas menuntut negara untuk menegakkannya. Negara wajib menjalankannya. Kita berharap peringatan hari lahir Pancasila tidak berhenti sebagai ritual tahunan tapi terefleksikan dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia

yang kita cintai ini. Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila, semoga Tuhan senantiasa menuntut dan memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia dalam menggapai cita-citanya. **(1 Juni 2017)**

Gotong Royong Itu Indah

Saat memulai catatan ini, kenangan setahun lalu muncul. Saat itu pertama kali saya kehabisan tiket Pandanwangi. Petugas loket bilang, “Kalau Bapak mau, tidak ada tempat duduk,” sambil menyodorkan tiket yang tak bernomor kursi. Saya sempat panik. “Baik!” sahut saya.

Ternyata yang bernasib seperti saya banyak. Pada hari-hari tertentu gerbong Pandanwangi berjubel. Asal mau berdiri, tetap dilayani. Tiba-tiba anak muda yang duduk di dekat saya berdiri. Saya diminta menempati kursi yang menjadi haknya. Anak muda itu rela berdiri. Mungkin dia melihat saya lebih membutuhkan. Saya melihat ke kanan-kiri. Ternyata banyak pula penumpang berbagi tempat duduk. Kursi yang mestinya untuk tiga orang diisi empat orang. Yang mestinya buat dua orang ditempati tiga orang. “Inikah gotong royong?” tanya saya dalam hati.

Sejak itu, meski kehabisan tiket berkursi, saya tenang saja. Habitus gotong royong akan “memerintah” penumpang berbagi tempat duduk. Dan benar. Tak perlu bertanya asal, suku, agama, partai. Habitus gotong royong dengan sendirinya membuahakan tindakan berbagi. Tanpa meributkan identitas. Indah sekali.

Gotong royong inilah mutiara terpendam, harta karun, yang diangkat Bung Karno? Pikiran saya melompat. Menuju untaian kata yang tersusun kompak, yang diucapkan Bung Karno pada sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan), 1 Juni 1945. Sebuah pidato bersejarah. Indah sekali, baik bahasa maupun substansinya. Di sanalah dikemukakan dasar negara, ideologi bangsa. Bung Karno menyebutnya Pancasila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan sidang BPUPK – beranggota 60 tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang – menerimanya.

Bagi saya, pidato tersebut adalah puncak pergulatan pemikiran Bung Karno sejak muda. Penuh kristalisasi yang menyebar. Bukan hanya dari pemikiran modern (Barat). Tapi juga Islam dan kebudayaan Nusantara lain yang telah membumi. Pidato itu dengan gamblang menjelaskan apa dan mengapa Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Bukan agama. Bukan pula individualisme/liberalisme. Juga bukan komunisme. Lalu dipilih demokrasi, bukan monarki. Itupun bukan demokrasi ala Barat yang hanya berkaki politik. Kata Bung Karno, demokrasi tak ada gunanya bila tak menyejahterakan rakyat.

Sayang sekali isi pidato 1 Juni itu miskin jejak di memori anak-anak sekolah. Saya pun mengenalinya bukan dari sekolah. Sekolah kita tak mengajarkannya. Bukan hanya pemikiran Bung Karno. Tapi juga “bung-bung” lain para pendiri bangsa. Sekolah steril dari pergulatan pemikiran kebangsaan yang dahsyat dari pendiri bangsa. Alih-alih pemikirannya, nama dan gambar orangnya saja tak dikenali. Tak aneh bila anak-anak terpelajar kita mudah terpicat paham radikal. Meski hanya melalui media sosial. Padahal mereka calon penyelenggara negara. Sangatlah merugi bangsa ini.

Yang juga indah dan mengagumkan, tatkala Bung Karno mengkristalkan lima sila menjadi tiga sila, lalu satu sila. Bung Karno menyebut kata yang sangat Indonesia, “gotong royong”. Dengan tegas dikatakan, “Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong royong’. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara Gotong Royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!” Tak mungkin Bung Karno mendapatkannya tanpa kecerdasan linguistik jempolan.

Gotong royong tak asing bagi kita. Bahkan telah menjadi “habitus” menurut sosiolog Perancis, Pierre Bourdieu. Telah berabad-abad mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku masyarakat. Cara penumpang Pandanwangi berbagi tempat duduk tatkala kapasitasnya kurang dari yang dibutuhkan merefleksikan habitus gotong royong. Tapi fenomena di Pandanwangi itu berbagi hal kecil. Bagaimana dengan hal besar, soal sumber-sumber hidup? Habitus gotong royong menginspirasi Bung Karno untuk menjawabnya.

Negara kolonial terus-menerus menggerogoti habitus gotong royong yang telah berabad-abad tertanam di bumi Nusantara. Ditebarlah benih individualisme, kapitalisme, dan liberalisme oleh negara kolonial. Karena itu, di seberang jembatan emas kemerdekaan, negara harus memulihkannya. Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara harus mengatur pembagian kekayaan dalam kerangka keadilan sosial. Kata Bung Karno, semua buat semua. Bukan buat satu orang. Juga bukan buat satu golongan. Keringat semua buat kebahagiaan semua. Begitulah Bung Karno menyederhanakan konsepnya.

Bagi saya, jelas sekali pidato itu menegaskan peran negara. Meski tak mutlak. Negara diberi wewenang mengelola sumber

daya buat kesejahteraan semua rakyat. Wewenang itu lalu menjelma menjadi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan produk yang lain. Menjelma menjadi sistem. Dengan cara itu negara memulihkan sekaligus merawat habitus gotong royong.

Kini pekerjaan besar menanti. Di atas kertas negara gotong royong hebat. Indah sekali. Tapi, menurut Bung Karno, keindahannya tak akan terasakan tanpa perjuangan. “Tidak ada satu weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan!” tegasnya.

Apa pekerjaan besar yang harus diperjuangkan dan dimenangkan? Menurut saya, pelebagaan Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Apakah peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan produk negara yang lain sudah teruji dari sudut Pancasila? Apakah arena-arena kehidupan yang dikreasi negara telah berkeadilan sosial dan memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan rakyat? Di sinilah bangunan di seberang jembatan emas itu terus-menerus diteropong.

Tentu saja godaan bagi penyelenggara negara tidak kecil. Nyanyian neoliberalisme tak kalah nyaring. Bahkan potensial diaransemen dengan memasukkan agama, etnis, ras. Agar terdengar makin merdu, mendayu, merayu. Pancasila dinyanyikan seolah-olah kontra agama. Diharamkan karena bikinan manusia. Lalu didendangkan pula seolah-olah melanggar HAM. Karena merekomendasikan negara hadir dan kuat. Rakyat tak butuh Pancasila, butuh perut kenyang.

Saya setuju Bung Karno. Katanya, perjuangan tak boleh berhenti. Sebuah pesan penting buat penyelenggara negara, juga para calon pengelenggara negara. Perjuangan tak cukup modal semangat dan keberanian. Butuh pula kecerdasan. Buat mengkreasi produk negara, yang menjamin gotong royong tumbuh menguat.

Saya membayangkan suatu hari kapal RI mengarungi samudera dunia dengan kekuatan gotong royong rakyatnya. Indah sekali. Gotong royong itu mengajak “liyan” (*the other*), bukan membunuhnya. Sangat indah. Berbagi untuk menghidupi.
(1 Juni 2018)

Mengawal Tugas Sejarah

Jika dibaca dari masa sekarang ini, sudah 72 tahun kita (baca: Bangsa Indonesia) merdeka. Proklamasi kemerdekaan yang diteken oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia bukan turun dari langit begitu saja, bukan pula pemberian Jepang, melainkan buah dari proses sosial yang panjang. Ada dinamika, dialektika, kekuatan-kekuatan, baik objektif maupun subjektif. Kita sekarang mewarisi teks tersebut. Tugas kita menafsirkan teks, memahami makna yang terpintal di dalamnya dan menjadikannya “guru”. Teks sejarah tidak akan berarti apa-apa tanpa kesanggupan kita menangkap “apinya” buat pembangkit dan penerang menapaki hari depan.

Di mata saya, inti dari proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 adalah soal ”kemerdekaan-kemanusiaan”, yang merupakan fitrah setiap anak bangsa. Di manapun ada pengingkaran terhadap ”kemerdekaan-kemanusiaan”, di sana pula akan muncul perlawanan dan perjuangan untuk menggapainya. Namun, celaka kita sebagai bangsa karena perulangan sejarah kita justru dipenuhi perulangan pengingkaran terhadap ”kemerdekaan-kemanusiaan”. Sejarah kita lalu penuh kekerasan dan penghancuran, darah dan air mata.

Gerak kekuatan-kekuatan, baik objektif maupun subjektif,

yang berujung pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan hasil bawaan negara kolonial. Pada satu sisi praktik negara kolonial mengingkari harkat "kemerdekaan-kemanusiaan". Negara kolonial telah merampas kemerdekaan ekonomi, politik dan budaya masyarakat jajahan. Pada sisi lain bawaan negara kolonial juga menghasilkan transformasi ide/gagasan dari eksklusivisme tata pandang dan kehidupan lama ke arah tata pandang dan kehidupan baru atas dasar konsep *nation* (bangsa). Lalu terbayanglah "Indonesia" sebagai *nation-state*. Inilah anasir konstruktif dengan visi "Indonesia Merdeka". Lalu Bung Karno menerjemahkannya ke dalam teori "trisakti": berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Oleh karena itu, kemerdekaan sebagai bangsa diyakini sebagai jalan politik untuk meraih kedaulatan secara ekonomi dan kebudayaan. Namun, apakah tinggalan negara kolonial yang sudah berurat berakar di bumi Nusantara lenyap dengan sendirinya begitu kemerdekaan politik itu bisa diraih? Tidakkah mudah tinggalan negara kolonial itu direkonstruksi tanpa dekonstruksi. Ide revolusi nasional yang pernah digagas Bung Karno pada hakekatnya diarahkan untuk dekonstruksi. Namun, ide itu terlempar tanpa daya, dan ironis justru balik membunuh tuannya. Tinggalan negara kolonial itu kini justru menemukan bentuknya yang lain, yang makin sempurna nan canggih dalam menyembunyikan wajah dan nafsu serakahnya yang mengakibatkan pengingkaran "kemerdekaan-kemanusiaan" manusia Indonesia terus berulang.

Dari sudut formal, rakyat memang berdaulat secara politik. Partai politik ada, bahkan sangat banyak. Ritus politik Indonesia sebagai negara modern juga dilaksanakan secara tertib. Lima tahun sekali ada pemilu, dan menghasilkan wakil-wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah. Bahkan telah pula

ditempuh pemilihan langsung, baik presiden maupun kepala daerah. Namun, secara substantif, keputusan-keputusan politik negara tetap saja tidak bergeser dari oligarki politik. Sistem oligarki cenderung mudah diperalat oleh elite pengontrol modal berdasarkan kepentingannya. Negara lalu menjadi tawanan elite pengontrol modal negeri ini.

Kita sekarang ini sebenarnya menghadapi tantangan ekonomi yang mirip zaman awal abad ke-20, bahkan lebih canggih dan berwajah manis dengan implikasi yang tidak kalah mengerikan. Dinamika kapital yang berputar mengikuti poros neoliberalisme benar-benar tidak mengenal batas negara, bangsa dan identitas. Bahkan acuh tak acuh terhadap identitas, mempermainkan identitas untuk kepentingan pelipatgandaan modal. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia yang plural ini.

Problem perekonomian kita yang diwarisi dari rezim ke rezim lalu menjadi sangat kompleks. Bukan hanya sektor real; juga bukan hanya bagaimana pertumbuhan ekonomi terbentuk. Problem perekonomian kita dewasa ini sesungguhnya berakar pada produktivitas nasional yang lemah sebagai tinggalan negara kolonial. Kebijakan ekonomi liberal selama ini ternyata tidak mampu menghasilkan produktivitas nasional seperti dibayangkan. Produktivitas tetap memprihatinkan; sumber-sumber perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan tak terurus; kekayaan alam juga terkuras bukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Problem itu lalu berujung pada isu kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, urbanisasi besar-besaran, dan isu-isu sosial lainnya. Yang mutakhir telah menyelinap berbaju identitas, dan memprovokasi kita dengan sebutan *Asing/Aseng*.

Ketidakterdayaan secara politik dan ekonomi itu pada gilirannya juga mengakibatkan rakyat kehilangan

jatidiri secara budaya. Tidak ada karya budaya yang bisa dibanggakan, sebaliknya justru citra kekerasan. Kita menjadi bangsa yang mengalami kemerosotan martabat.

Oleh karena itu, di zaman media sosial yang serba bebas sekarang ini kita haruslah cerdas dan kritis. Identitas bisa dikorbankan oleh para petarung semata-mata untuk memenangi perebutan sumber daya. Identitas juga dengan mudah dimanipulasi untuk menyembunyikan wajah yang sesungguhnya. Berhati-hatilah dengan permainan identitas seperti “Asing/Aseng yang non-Muslim” karena makhluk yang sama bisa pula berwajah “Osing yang Muslim”.

Oleh karena itu, kita harus berupaya secara sungguh-sungguh mendorong berjalannya sistem politik dan bernegara yang demokratis. Bukan hanya dari segi prosedur, melainkan substansi. Negara harus mampu menerapkan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara harus diberi peluang yang sama untuk mengabdikan dirinya dan berpartisipasi dalam kegiatan politik bernegara tanpa memandang perbedaan etnis, agama, dan asal-usul budaya. Negara harus mengontrol dinamika kapital untuk kemakmuran bersama warganya. Kita membutuhkan sebuah kepemimpinan politik yang visi dan langkah-langkahnya jelas dan tegas mengabdikan pada kemenangan dan kemajuan rakyat Indonesia dengan segenap keanekaragamannya.

Memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan RI pada hakekatnya kita menyetujui perlawanan terhadap pengingkaran “kemerdekaan-kemanusiaan”. Berarti pula menyepakati perjuangan menegakkan kedaulatan rakyat secara terus-menerus. Sebuah tugas sejarah yang harus dikawal terus-menerus. Dirgahayu Indonesia. Merdeka! **(17 Agustus 2017)**

Segera Wujudkan Keadilan Sosial

Mungkin belum sempat duduk di kursi jabatannya, Gubernur DKI Anies Baswedan, dikecam banyak kalangan. Gara-gara kata *pribumi* muncul saat pidato pelantikannya. Meski sudah diklarifikasi, bahkan juga oleh Wapres Jusuf Kalla, tidak mudah menghilangkan kecurigaan publik terhadap tendensi politik di balik penggunaan kata pribumi tersebut.

Kata *pribumi* memang sensitif, penuh muatan politik. Ada jejak yang bisa dirunut, mengapa sensitif, mengapa kompetisi dan bahkan pertikaian yang berdimensi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tidak pernah surut di bumi Indonesia. Seolah-olah kemajemukan menjadi ancaman bagi integrasi bangsa; seolah-olah ada ketegangan permanen antara kehidupan primordial yang ingin tetap terikat pada realitas pertalian darah, kesamaan asal-usul, suku, bahasa, tempat tinggal, keyakinan agama dan tradisi dengan kehidupan kebangsaan yang lebih terikat pada tuntutan praktis akan kemajuan. Seolah-olah keduanya berada pada titik ekstrim yang saling berebut pengaruh; seolah-olah kebangsaan itu anti kemajemukan. Dinamika politik belakangan ini kental aroma seperti itu. Ada baiknya hal ini menjadi bahan refleksi memperingati Hari Sumpah Pemuda kali ini.

Inti Sumpah Pemuda adalah penegasan identitas: tanah air, bangsa, bahasa “Indonesia”. Mengapa ditegaskan? Inilah sebuah kata mendahului referennya, pernyataan mendahului kenyataan. Referen atau kenyataan ”Indonesia” masih harus diwujudkan, terus-menerus, bahkan hingga hari ini, seiring dengan penegasan identitas yang juga terus-menerus diperbarui dalam berbagai kesempatan.

Jauh sebelum orang-orang Belanda datang, masyarakat di wilayah Sabang sampai Merauke sebenarnya tidak mengenal pembedaan atau identifikasi berdasarkan unsur-unsur SARA. Mereka hidup dalam komunitas yang relatif homogen yang diikat oleh kesamaan ras, suku, bahasa dan tradisi. Mereka juga bersifat lokal dan tidak mengenal batas teritori secara jelas. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke bukanlah kesatuan komunitas yang beragam. Dasar politik identitas mereka bersifat eksklusif dan metafisis, sejalan dengan tata pandang mereka yang juga eksklusif dan metafisis.

Sebelum kolonial datang masyarakat memahami dirinya selalu dalam hubungan dengan alam raya. Mereka tidak berjarak, tidak memisahkan diri dari alam raya. Dirinya adalah bagian dari alam, bahkan alamlah yang menguasai totalitas kehidupan mereka. Dengan pemahaman semacam inilah dunia sosial dibangun. Dunia sosial juga dibayangkan dalam relasi pusat-pinggir secara hirarkis antara raja dan kawula (rakyat). Raja (dan keluarga atau keturunannya, yang kemudian menurunkan istilah misalnya *bangsawan*) dipandang menempati pusat dunia dan dikelilingi oleh rakyat yang bekerja sebagai petani, nelayan atau pedagang. Raja dianggap sebagai “pemberi” dan “penjamin” berkah kemakmuran rakyat. Raja menjadi penguasa alam raya. Daulat raja, sabda raja.

Setelah Belanda datang dan selanjutnya memantapkan kolonialismenya di seluruh pelosok Sabang sampai Merauke

pada akhir abad ke-19, sebuah perubahan besar terjadi. Sebuah perubahan kebudayaan yang mendasar. Sebuah kehidupan baru, kebudayaan baru ditawarkan. Sekaligus juga awal pertikaian SARA, yang makin lama makin rumit, yang kelak menjadi bom waktu bagi negara baru Republik Indonesia.

Perubahan kebudayaan tak bisa dielakkan sejak jaringan kereta api, jam, peta, kalender, kamus, sekolah dan industri surat kabar tersebar di tanah Hindia Belanda, terutama di Jawa, pada akhir abad ke-19. Perluasan kapitalisme perkebunan bukan cuma meletakkan dasar-dasar monetisasi kehidupan dan reorganisasi agraria, tapi juga menciptakan ruang kehidupan yang majemuk dari segi SARA.

Pemerintah kolonial Belanda mendatangkan tidak sedikit orang-orang dari luar daerah untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan di sektor perkebunan, terutama dari daratan Cina, Jawa (untuk perkebunan di luar Jawa), Madura (terutama untuk perkebunan di Jawa), dsb. Kebijakan ini memungkinkan suatu tempat dihuni oleh kelompok masyarakat yang berbeda-beda dari sudut SARA. Di sinilah awal politik identitas yang rasis (politik SARA) dikembangkan. Pemerintah kolonial membedakan masyarakat Hindia Belanda ke dalam tiga golongan rasial yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan pribumi (*inlanders*). Golongan Eropa adalah orang Belanda dan orang Barat bukan Belanda; mereka yang dimasukkan ke dalam kategori Timur Asing adalah orang Asia; sedangkan *inlanders* adalah semua penduduk asli.

Namun, dalam kenyataannya identifikasi tersebut sangat cair. Kuncinya adalah kategori Eropa. Seperti dicatat Furnivall, yang memiliki status hukum “orang Eropa” ternyata bukan hanya orang Eropa dan Amerika saja. Pada tahun 1930 mereka yang diakui sebagai golongan Eropa adalah 7.195 orang Jepang, 130 orang Turki, 232 orang Filipina, bahkan ada 8.948 *inlanders*. Penggolongan itu punya bobot politik dan

ekonomi, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dikenakan pada masing-masing golongan. Sejak zaman VOC, politik SARA memang telah menjadi alat penguasa untuk mengontrol masyarakat. Seperti peraturan tentang “pecinan” yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal VOC, Valckenier, yang intinya ialah warga Tionghoa hanya boleh bermukim di wilayah tertentu yang disebut “pecinan” dan mengharuskan mereka memiliki surat jalan dari opsir Tionghoa setempat bila hendak bepergian dari “pecinan” satu ke “pecinan” lain.

Tata pandang lama atas ruang, waktu, manusia dan seluruh tata dunia yang sudah berabad-abad bercokol dalam benak masyarakat mulai terkoyak. Mereka mulai mengungkapkan dan membaca tentang fenomena kehidupan yang melampaui batas-batas etnis, agama, tradisi. Mereka mulai memasuki “komunitas” yang lebih luas daripada ikatan yang selama ini mereka kenal. Lalu dikenallah komunitas “kebangsaan”, dan melalui “komunitas” itu mereka membayangkan masa depan yang lebih baik dan berbeda dengan kakek-neneknya: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.

Dengan demikian, sejak awal abad ke-20 orang-orang dari Sabang sampai Merauke mau tak mau harus merumuskan kembali diri dan lingkungan sosialnya ketika batas-batas keturunan dan ras, adat, bahasa dan geografi sudah berubah; ketika batas ruang dan waktu serta hubungan sosial lama yang eksklusif teraduk-aduk; ketika ketenangan, kedamaian dan kesakralan kehidupan masyarakat lama telah jadi masa lampau. Arus sejarah tidak mungkin diputar balik. Apa yang dihayati tentang masyarakat kebangsaan yang majemuk dan demokratis bukan sekadar jawaban kosmologi baru, tapi memang memiliki konteks dengan sejumlah perubahan politik, ekonomi dan teknologi pada zamannya. Masyarakat kebangsaan dan kemajemukan yang ada di dalamnya merupakan keniscayaan,

sesuatu yang historis, tak terelakkan.

Namun, persoalannya poses historis tersebut tidak sepenuhnya datang dari masyarakat sendiri sebagai dinamika kebudayaan masyarakat, melainkan dikonstruksikan dan dikawal oleh negara kolonial dengan pendekatan “keamanan dan ketertiban” untuk mendukung eksploitasi ekonomis. Penyatuan Sabang–Merauke dilakukan melalui penaklukan-penaklukan oleh negara kolonial. Di sinilah masalahnya. Bagaikan api dalam sekam bagi negara (bangsa) Indonesia, yang tidak mungkin mengulang pendekatan negara kolonial. Namun, kita telah kehilangan waktu dan kesempatan belajar yang tidak pendek, terutama ketika rezim Orde Baru juga menerapkan pendekatan “keamanan dan ketertiban”. Teramat mahal ongkos sosial dan budaya yang telah kita bayar. Indonesia selalu saja terguncang-guncang oleh soal SARA.

Maka hanya satu jalan yakni jalan kebudayaan yang bermatra keadilan/kesejahteraan sosial. Segera mewujudkan keadilan/kesejahteraan sosial yang pernah menjadi semangat yang menggerakkan para pemuda untuk bersumpah: tanah air, bangsa, bahasa “Indonesia”. Atau, kita akan terus-menerus dihantui konflik sosial (berdimensi SARA) yang bisa berujung pada akhir sejarah Republik Indonesia. **(28 Oktober 2017)**



BAGIAN II

Politik



“Maka kepemimpinan politik amat penting. Kepemimpinan politik bisa konstruktif, bisa pula destruktif bagi ‘jiwa’. Maka yang dicari dan dibutuhkan adalah pemimpin politik yang mampu membangkitkan optimisme bangsa.”

[Memaknai Tahun Politik]

Memaknai Tahun Politik

Kalender 2017 kita tutup. Kita buka kalender 2018. Sebenarnya hanya peralihan jangka waktu. Menjadi istimewa karena kita merancang kehidupan berdasarkan tahun. Apa yang istimewa, khususnya bagi masyarakat Banyuwangi?

Kalender 2018 diawali dengan kegiatan politik. Di sejumlah wilayah akan berlangsung pemilihan gubernur/bupati (pilgub/pilbup) serentak. Di Jawa Timur (Jatim), jadwal pendaftaran pasangan calon berakhir 10 Januari 2018. Serangkaian tahapan pilgub/pilbup akan mengisi separuh lebih tahun 2018. Tanggal 27 Juni nanti rakyat Jatim akan memilih pemimpin baru.

Tahun 2018 juga akan diisi persiapan pemilu serentak 2019, baik legislatif maupun presiden. Segenap calon anggota legislatif, calon presiden-wakil presiden, partai politik, dan para pihak yang berkepentingan tentu akan bergerak, bermanuver, beraksi. Di tahun 2018 ini pula gerakan reformasi yang ditandai runtuhnya rezim Orde Baru berusia dua puluh tahun. Wajar bila 2018 disebut tahun politik.

Tahun politik itu istimewa bagi masyarakat Banyuwangi. Mengapa? Salah satu pasangan calon yang bertarung pada pilgub adalah bupatinya sendiri, Abdullah Azwar Anas, yang akrab disapa Pak Anas. Pak Anas mendampingi Saifullah Yusuf,

yang kini wakil gubernur Jatim. Tentu kepemimpinan Pak Anas di Banyuwangi menjadi referensi utama. Mantra-mantra Pak Anas mengelola Banyuwangi oleh partai pengusung dianggap mujarab. Diyakini manjur dan laku jual juga untuk Jatim.

Saya berharap catatan ini bermakna. Bukan hanya buat masyarakat Banyuwangi menghadapi tahun politik, tapi secara khusus buat Pak Anas. Meminjam Arnold van Gennep, antropolog yang banyak meneliti ritus peralihan, Pak Anas akan melewati ruang liminal yakni ruang “antara”, transisi dari “sini” ke “sana”. Di ruang liminal manusia mengambil jarak dengan “yang sudah” untuk memasuki “yang akan”. Manusia “disucikan” di ruang liminal. Di ruang liminal itulah Pak Anas akan menjalani ritual inisiasi oleh masyarakat Jatim untuk memastikan status barunya.

Tahun politik adalah masa inisiasi mencari pemimpin politik. Ini bukan sekadar urusan para calon, partai politik dan penyelenggara pemilu, tapi juga urusan masyarakat (publik). Bahkan kecerdasan masyarakat merupakan variabel penting. Apalagi di zaman media sosial hari ini, tatkala teks kategori sampah, *hoax*, bisa menyeruak membanjiri media sosial, lalu mengacaukan nalar publik. Geertz telah mengingatkan, status teks tetaplah tafsiriah. Realitas tetap di luar teks. Tafsir dilakukan untuk mendekatkan antara teks dan realitas. Di sinilah kecerdasan publik menentukan.

Meminjam Weber, saya mencatat dua model rasionalitas berpolitik. Pertama, rasionalitas formal. Politik dihayati semata-mata sebagai pragmatisme meraih kekuasaan. Etika dan nilai-nilai keluhuran akan diperhatikan sepanjang mendukung upaya meraih kekuasaan. Biasanya juga memunculkan persekutuan negatif yang destruktif terhadap sistem sosial. Korupsi berjamaah, apalagi korupsi yang menyandera negara, *state-hijacked corruption*, jelas produk persekutuan negatif yang

terbentuk dari model rasionalitas formal.

Kedua, rasionalitas substantif. Politik dihayati sebagai pelaksanaan prinsip keyakinan dan pencapaian idealisme politik. Maka jabatan politik dipahami sebagai panggilan pelayanan dan pengabdian bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Bekerja demi publik, bukan pribadi, bukan pula kelompok. Ada keteladanan dan etika, yang berimplikasi pada pendidikan politik. Persekutuan yang terbentuk pun bersifat positif, lalu menjelma menjadi sinergi hidup bersama, gotong royong. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara pada Sidang BPUPKI, Juni 1945, jelas cara berpolitik model rasionalitas substantif.

Banyuwangi adalah bagian dari Jatim, dan Jatim adalah bagian dari Indonesia. Setiap daerah memang punya potensi dan keunikannya, tapi tidak mungkin Banyuwangi dan Jatim melesat di luar bingkai Indonesia. NKRI dipilih karena memungkinkan saling bantu di antara daerah satu dengan lainnya.

Bung Karno pernah membayangkan Indonesia berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Lewat lagu kebangsaan “Indonesia Raya” yang hampir setiap hari kita dengar, WR. Soepratman mengingatkan: “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya...” “Jiwa” lebih utama. Tapi reformasi yang sudah dua puluh tahun tampaknya juga baru berhasil mengubah sistem dan kelembagaan politik formal. Partai politik banyak, pemerintahan silih berganti, tapi paradigmanya belum banyak berubah.

Pembangunan “jiwa” cenderung terabaikan. Memang hasilnya tidak bisa segera dipamerkan. Beda dengan pembangunan “badan”. Hasilnya bisa segera dihitung dan dipamerkan. Tapi perlu dicatat, di dalam “jiwa” itulah terdapat spirit dan karakter. Di dalam “jiwa” itu pula kita merasakan dan mengerti hidup berkebangsaan; ada kesadaran kolektif—

dalam pengertian Durkheim—untuk maju dan makmur bersama. Sejarah Eropa menunjukkan, bangsa-bangsa Barat mencapai kemakmuran dan kemajuan dengan menguasai ilmu pengetahuan & teknologi setelah menemukan “jiwa” Pencerahan, *Aufklarung*.

Pembangunan “jiwa” itu haruslah merujuk pada aspek natur dan kultur. Indonesia merupakan konsep geopolitik, kata Bung Karno, yang terdiri atas kesatuan nasional, kesatuan cita-cita sosial, kesatuan ideologi, dan kesatuan kenegaraan. Setiap generasi harus tahu “jatidiri” Indonesia. Dalam konteks ini kita menghadapi masalah krusial. Indonesia makin tak berjejak dalam sistem pengetahuan generasi ke generasi.

Maka kepemimpinan politik amat penting. Kepemimpinan politik bisa konstruktif, bisa pula destruktif bagi “jiwa”. Maka yang dicari dan dibutuhkan adalah pemimpin politik yang mampu membangkitkan optimisme bangsa. Bukan “pejabat politik” yang suka melukai perasaan rakyat. Indonesia, Jatim, Banyuwangi senantiasa mencari pemimpin politik model rasionalitas substantif, yang mampu dan sanggup mengajak para buruh, petani, nelayan, guru, pengusaha, para pegawai pemerintah dan rakyat yang lain untuk menatap masa depan dengan kepala tegak dan wajah berseri-seri.

Pemimpin politik itu harus meyakinkan rakyatnya untuk memulai cara hidup baru, arus baru. Basis kesejahteraan rakyat harus mulai digeser dari modal fisik ke modal kecerdasan. Sumber daya alam tidak bisa lagi dijadikan tumpuan utama. Kekayaan alam tidak akan optimal memberikan kesejahteraan bersama tanpa modal kecerdasan dan pemimpin model rasionalitas substantif sebagaimana pengalaman selama ini.

Maka pemimpin politik itu harus kaya gagasan untuk menemukan tumpuan kesejahteraan baru yang bersumber dari kecerdasan, kredibilitas, kohesivitas, dan semangat kerja

masyarakat. Kesadaran tersebut harus dibangun dan diperkuat pada setiap warga masyarakat, pada anak-anak, pemuda, orang tua, di semua sektor kehidupan.

Bagaimana Banyuwangi? Saya baca sejarah, Blambangan konon pernah menantang Majapahit. Maka taklukkanlah Jatim. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya! **(1 Januari 2018)**

Pak Anas

Bisa jadi, peringatan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) Ke-246 adalah yang terakhir kali bersama Bupati Abdullah Azwar Anas. Dengan akrab orang-orang menyapanya Pak Anas.

Di sejumlah tempat terpasang gambar Pak Anas berbaju merah. Mendampingi Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Kita tahu dua nama itu dijagokan pada Pilgub Jatim 2018. Pak Anas memperkenalkan dirinya *Mas Anas*. Kata *mas* adalah sebutan kekerabatan, setara dengan *kang* (Osing, Jawa), atau *cak* (Arek). Biasanya untuk kesetaraan dan penghormatan. Tapi sebutan *mas* juga bernilai antropologis. Yakni mengatasi kemajemukan kultur di Jatim. Baik Jawa, Madura, Mataraman, Arek, Tengger, Osing, maupun Tionghoa dan Arab, menerima sapaan *mas* sebagai bagian budayanya. Sebuah pilihan cerdas.

Banyuwangi pantas bersyukur punya Pak Anas. Muda, cerdas, dan penuh semangat. Dalam ingatan saya, Pak Anas adalah pembelajar yang baik. Saat di bangku SMAN 1 Jember, Pak Anas sudah juara pertama lomba pidato pemuda se-Kabupaten Jember. Juga langka, pelajar SMA membagi waktu belajarnya dengan menjadi reporter radio. Ini bukan “belajar sambil bekerja”, tapi “belajar sambil belajar yang lain”. Bakat kepemimpinan politiknya sudah tampak sejak muda.

Peringatan Harjaba Ke-246 merupakan momentum refleksi. Warga Banyuwangi tentu punya catatan masing-masing. Begitu pula kepala dinas, camat, kepala desa, dan segenap pegawai pemerintah. Catatan-catatan itu penting buat hari esok. Catatan saya ini pun hanya potret satu sisi. Itu pun tidak dengan riset ketat. Pak Anas menarik dipotret dari banyak sisi.

Di mata saya, Pak Anas tergolong pemimpin muda yang cemerlang. Pantas banyak penghargaan diterimanya. Saya teringat teorinya. Saat bertemu di awal saya bertugas di Untag (Maret 2016), kurang lebih Pak Anas bilang, “Kalau kita punya anak perempuan dilamar dua jejak, yang satu satpam bergaji 10 juta, yang satu lagi baru lulus ITS, pilih mana? Tentu kita pilih yang baru lulus ITS. Punya prospek.”

Pak Anas memprospek Banyuwangi. Sangat tahu potensi dan keeksotisan Banyuwangi yang laku jual. Maka dibuatlah Banyuwangi Festival (B-Fest). Saya pun merasakan. Geliat Banyuwangi, *jenggirat tangi*. Pak Anas dan jajarannya tentu punya data untuk meyakinkan. Anda pun punya. Bisa saling melengkapi. Tapi saya simpel saja. Blimbingsari.

Sejak pertengahan 2017 tiga kali penerbangan langsung Blimbingsari-Jakarta. Dua kali NAM Air, sekali Garuda. Yang ke Surabaya juga tiga kali. Saya pun sudah empat kali terbang Blimbingsari-Jakarta. Kursi nyaris penuh. Keputusan perusahaan penerbangan tentu bukan berkat lobi Pak Anas semata. Ini soal membaca prospek.

Banyuwangi memang sedang menari. Mengikuti irama gendang yang terdengar kuat ditabuh Pak Anas. Banyak orang berdatangan. Wisatawan melonjak tajam. Dari sekitar 500.000 pada 2010 menjadi sekitar 4 juta orang pada 2016. Penumpang pesawat meningkat. Tahun 2015, berangkat 51.019, datang 49.391. Tahun 2016 meningkat menjadi: berangkat 57.340, datang 55.745. Tamu hotel juga meningkat. Tahun 2015,

tamu domestik 540.669, mancanegara 59.597. Tahun 2016 meningkat, domestik 551.513, mancanegara 64.102. Tapi baru sekitar 15% dari jumlah wisatawan.

Harus diakui, B-Fest yang kini sudah 72 macam punya tuah. Bukan sekadar mendatangkan tamu, tapi juga menggembirakan masyarakat. Pesta pastilah gembira ria. Berkali-kali saya mendengar Pak Anas menegaskannya. Rakyat harus gembira agar gampang diajak. Pemimpin akan mudah bekerja bila rakyatnya gampang digerakkan. Kira-kira itulah rumus Pak Anas.

Karena itu Pak Anas pantas menyandang gelar “bupati festival”. Tak ada daerah di Indonesia, bahkan dunia, yang memiliki agenda festival sebanyak dan semeriah Banyuwangi. Dan ternyata juga menginspirasi banyak bupati.

Tapi saya juga membaca sisi yang lain. B-Fest bukan sekadar menggembirakan dalam arti sosio-psikologi. B-Fest juga bermakna sosio-politik dalam konteks integrasi sosial. B-Fest menyatukan warga yang plural, yang tidak jarang bergesekan dan saling berebut pengaruh.

Pluralitas Banyuwangi cukup tinggi. Banyuwangi terbentuk dari reruntuhan perang Puputan Bayu (1771). Kurun waktu 1766-1771 tercatat sebagai masa perebutan pengaruh di Blambangan antara Inggris, VOC, Mataram, Bali, dan penguasa lokal Blambangan. Juga antara Islam, Hindu, dan varian agama Jawa lain. Tidak aneh bila pengelompokan sosial dan konstelasi kekuasaan Banyuwangi modern sebagian berjejak di masa lampau, dan sebagian lain bikinan modernisme.

Dalam konteks tersebut B-Fest manjur sebagai sarana integrasi sosial. Mirip ritual *slametan* yang dicatat Beatty, antropolog Inggris yang menghabiskan waktu risetnya di Kemiren pada tahun 1990-an. Kata Beatty (2001), *slametan* merupakan peristiwa komunal tapi tak mendefinisikan

komunitas secara tegas; semua orang setuju dengannya tapi belum tentu menyepakati maknanya. *Slametan* itu kesepakatan sementara di antara orang-orang yang berbeda orientasi.

Banyak kalangan rupanya sedang membaca prospek Banyuwangi. Tidak salah. Berbeda dengan citra lamanya sebagai “kota santet”, kini Banyuwangi tampil molek sebagai “kota festival”. Banyuwangi memang prospektif. Berdasarkan *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur* yang dipublikasikan Bank Indonesia (Agustus 2017), grafik angka simpanan masyarakat dan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Banyuwangi cenderung meningkat. Simpanan tahun 2012 baru mencapai Rp 4,2 triliun, Juli 2017 sudah mencapai Rp 7,6 triliun. Kredit UMKM yang dikucurkan bank umum juga meningkat tajam. Tahun 2012 baru Rp 2,1 triliun (di bawah Jember, Rp 2,6 triliun), Juli 2017 sudah mencapai Rp 4,6 triliun (melampaui Jember, Rp 3,9 triliun).

Simpanan meningkat, kredit UMKM juga meningkat. Artinya, perekonomian masyarakat bergerak. Pertumbuhan ekonomi tinggi, sebesar 6,01 persen (2016). Pendapatan per kapita pun naik dari Rp 20,8 juta pada 2010 menjadi Rp 41,4 juta per orang per tahun pada 2016. Maka kebutuhan, tuntutan, harapan, dan standar hidup pun akan meningkat. Yang dulu belum terpikirkan, kini mulai muncul sebagai tuntutan baru. Aspirasi akan makin banyak. Tuntutan terhadap pelayanan publik pun akan terus meningkat. Begitulah Maslow mendalilkan.

Banyuwangi *jenggirat tangi*. Pantang surut kembali. Tentu tidak mudah. Suara gendang yang ditabuh Pak Anas terasa begitu kuat. Suara gendang itu sudah membangunkan. Tapi, cepat atau lambat, Pak Anas juga tidak akan menabuhnya lagi. Tantangan beratnya adalah mengalih-ubahkan suara gendang yang berpusat di pendopo itu menjadi suara gendang bertalu-talu yang ditabuh warga di tengah masyarakat. Saatnya mendorong

(meski pelan) gawe pendopo menjadi gawe masyarakat. Dari kekuatan figur ke sistem. Dan ini tidak lebih mudah. Di samping kultur yang masih kuat berorientasi tokoh, standar warga juga sudah berubah. Dirgahayu Banyuwangi. **(18 Desember 2018)**

Last Minute

Ada ungkapan yang menyerupai praanggapan dalam dunia politik, bahwa politik adalah detik-detik terakhir, *last minute*. Para politikus sering mafhum dengan ungkapan itu. Detik-detik terakhir, *last minute*, adalah waktu menjelang batas akhir, yang dinamikanya sering tak teramalkan. Batas akhir itu misalnya tanggal pemilihan, tanggal pendaftaran calon, dsb. Banyak tikungan tajam, tidak jarang “angin puting beliung” tiba-tiba turun menghadang. Di *last minute* itu politikus, partai politik, dan pihak lain sering tiba-tiba bermanuver. Menyalip di tikungan tajam, bahkan tanpa sinyal.

Para pembaca yang sudah beberapa kali mengikuti pemilu di negeri ini tentu tidak asing dengan istilah “serangan fajar”. Istilah ini mengacu pada aktivitas politik untuk mempengaruhi pemilih dengan cara memberikan sesuatu menjelang pemilih masuk bilik suara. Biasanya dilakukan di saat fajar. Bila istilah “serangan fajar” masih kita temukan, berarti aktivitas politik tersebut masih saja terjadi. Dengan serangan fajar diharapkan terjadi perubahan pilihan pada detik-detik terakhir, *last minute*.

Meski baru menjelang pendaftaran calon, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 juga diwarnai dinamika *last minute* yang menarik. Bagaikan petir di siang bolong,

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, yang akrab disapa Pak Anas, tiba-tiba mengembalikan mandatnya sebagai pendamping Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada partai politik pengusung. Pak Anas mendadak menjadi fokus perbincangan yang seru di media massa dan media sosial sejak 4 Januari malam.

Tentu pengembalian mandat yang hanya tinggal tiga hari dari jadwal pendaftaran pasangan calon gubernur-wakil gubernur (8-10 Januari) di KPU Jawa Timur itu mengejutkan banyak pihak. Tim kemenangan pasangan yang dijagokan koalisi PKB-PDIP itu tentu telah bersiap-siap. Gambar pasangan Gus Ipul-Mas Anas juga telah tersebar di berbagai lokasi dan posko kemenangan di Jawa Timur. Tentu bukan hanya tenaga dan biaya, tapi juga pikiran dan emosi, telah dipertaruhkan baik oleh partai pengusung maupun sebagian masyarakat Jawa Timur, terutama Banyuwangi, dan pula Pak Anas sendiri. Mereka ingin melihat kedua tokoh itu memimpin Jawa Timur. Saya termasuk yang berharap energi besar Pak Anas bisa menaklukkan Jawa Timur. Energi besar itu bisa bermanfaat pula buat masyarakat Jawa Timur: bangunlah jiwanya, bangunlah badannya (*Radar Banyuwangi*, 1 Januari 2018).

Tapi realitas politik berkehendak lain. Ada angin puting beliung yang tiba-tiba menyergap Pak Anas, yang membuatnya harus menyerah. Pak Anas menilai telah terjadi “pembunuhan karakter” atas dirinya (*Radar Banyuwangi*, 6 Januari 2018). Kita hargai pilihan politik Pak Anas mengembalikan mandatnya kepada partai politik pengusung. Saya meyakini Pak Anas telah mempertimbangkannya secara matang. Barangkali Pak Anas tidak mau apa yang disebutnya “pembunuhan karakter” itu menjadi beban yang menyandera energi besarnya. Sebuah pembelajaran politik yang tidak murah bagi para calon pemimpin politik.

Dalam catatan saya yang berjudul “Memaknai Tahun Politik” (*Radar Banyuwangi*, 1 Januari 2018), Pak Anas saya gambarkan memasuki ruang liminal, ruang transisi dari “sini” ke “sana”. Di ruang liminal itu subjek ritual menjalani inisiasi untuk menjadi “manusia baru”. Inti ritual inisiasi adalah menguji subjek ritual. Di ruang liminal itulah Pak Anas menjalani inisiasi pengujian untuk memastikan status barunya.

Penjelajahan Victor Turner di suku Ndembu memberikan tilikan menarik secara teoritis. Untuk menjadi kepala suku Ndembu, seseorang dan istrinya harus menjalani ritual inisiasi yang sangat berat. Di ritual inisiasi itu calon kepala suku ditempatkan pada struktur sosial terendah. Calon kepala suku harus rela direndahkan derajatnya oleh warga suku Ndembu. Calon kepala suku harus diam dan menerima segala hinaan. Ia dan istrinya juga mengenakan kostum tertentu yang menandakan dirinya berada pada status terendah sebelum mencapai status tertinggi sebagai kepala suku. Ritual inisiasi itu menguji apakah seseorang pantas menjadi kepala suku.

Di pertunjukan wayang kulit, tontonan sekaligus tuntunan yang paling disukai orang Jawa dulu, *kids zaman old*, dikenal episode “perang kembang”. Ini episode unggulan yang selalu ada di setiap pertunjukan wayang kulit semalam suntuk, apapun jalan ceritanya. Kepiawaiannya dalang memainkan wayang (*sabetan*) pun diuji betul dalam episode perang kembang.

Perang kembang terjadi setelah episode *gara-gara*, sebuah episode perbincangan antara satria dengan para pengawalinya yang disebut *punakawan* (Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong) tentang keadaan dunia yang lagi kacau balau, yang lagi dilanda prahara. Dengan bahasa khas rakyat jelata, *punakawan* justru menasehati satria agar berani mengambil peran memulihkan dunia yang dilanda prahara.

Perang kembang adalah perang di hutan belantara antara

seorang satria – biasanya tokoh Arjuna atau Abimanyu (putra Arjuna) untuk cerita yang bersumber dari Mahabarata – melawan raksasa Buto Cakil yang menghadangnya. Arjuna/ Abimanyu didampingi empat *punakawan*: Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Raksasa Buto Cakil ditemani raksasa Buto Pragalba, Buto Terong, dan Buto Rambut Geni. Keempat raksasa berhasil diatasi. Sang satria lalu melanjutkan perjalanan menuju kerajaan (masyarakat) untuk mengembalikan keadaan yang kacau balau menjadi keadaan yang menentramkan.

Perang kembang menggambarkan ujian bagi pemimpin. Peperangan melawan hawa nafsunya sendiri. Keempat raksasa merupakan lambang dari nafsu-nafsu manusia dalam perspektif Jawa: nafsu aluamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Nafsu-nafsu tersebut harus dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos.

Masyarakat (publik) memang menuntut pemimpinnya sempurna. Tidak cukup cerdas pikir (tata lahir), tapi juga cerdas hati (tata batin). Partai politik punya tugas melahirkannya. Detik-detik terakhir, *last minute*, menjadi saat yang mendebarakan, dan sering mengejutkan, barangkali karena ada selisih antara harapan dan kenyataan. Selisih itu dapat menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat, atau mendatangkan angin puting beliung. Bisa saat *last minute*, bisa pula waktu lainnya.

Saya membaca sejarah, konon Blambangan gagal menaklukkan Majapahit. Dan kini batal menaklukkan Jawa Timur. **(10 Januari 2018)**

Mana Trisaktimu

Perjalanan saya ke Banyuwangi tempo hari sungguh mengasyikkan. Sekaligus inspiratif. Pak Tua yang sebangku rupanya gemar bercerita. Suka obrolan politik dengan sudut pandang mistik.

Bermula dari video *Kabeh Sedulur* kiriman teman. Video yang berisi suara dan gambar Via Vallen di sebuah studio itu saya putar di ponsel saya untuk melawan deru kereta menyusuri Gunitir. Pak Tua rupanya mencuri dengar. Spontan menyela, “Gus Ipul dan Mbak Puti ya?” Wah, Pak Tua *zaman now*. Mungkin sudah sering melihat, sehingga punya asosiasi *Kabeh Sedulur* dengan pasangan cagub-cawagub tertentu.

Pak Tua lalu membuka cerita. Yang aneh, bukan tentang Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai calon gubernur Jawa Timur (Jatim). Bukan pula tentang Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti) sebagai calon wakilnya. Tapi tentang kakek Mbak Puti, Bung Karno. Bagaikan guru ketemu sang murid. Beragam narasi mistik tentang Bung Karno dituturkan. Misalnya, Bung Karno bisa hadir di dua tempat berbeda pada saat yang sama, sesuatu yang bertentangan dengan premis logika. Bung Karno kebal peluru. Juga Bung Karno moksa. Suatu ketika nanti akan hadir kembali di dunia.

Cerita Pak Tua itu, bagi saya, bukan hal baru. Saya sudah menikmatinya saat masih di bangku sekolah dasar tahun 1970-an. Niniek L Karim, aktris film sekaligus dosen, juga punya catatan menarik. "Seingatku kurang lebih pukul 20:30 waktu itu (karena keluarga kami baru saja selesai makan malam yang selalu di sekitar pukul 20:00), hari ketiga Bung Karno wafat. Kuangkat telepon yang berdering, suara seorang teman: 'Niek, cepet ndeloko bulan, ono gambare Bung Karno ning kono!' (Niek, cepat lihatlah bulan, ada gambarnya Bung Karno di sana)" (*Kompas*, 1 Juni 2001).

Anekkah? Tidak! Sebagian masyarakat memang menghadirkan Bung Karno dalam narasi mistik. Dalam kosmologi Jawa seseorang selalu bertautan dengan dunia adikodrati. Apalagi orang-orang yang punya jasa besar, punya kelebihan, seperti wali, raja atau pahlawan. Makamnya pun dikeramatkan. Begitulah catatan Pemberton (1994), antropolog AS yang pernah menjelajahi Jawa. Makam keramat itu pada hari-hari tertentu dikunjungi banyak orang untuk memperoleh *pangestu* (restu) dengan beragam kepentingan. Mulai dari yang bersifat spiritual hingga yang bersifat keduniawian.

Bung Karno adalah tokoh besar. Tokoh pergerakan kemerdekaan, proklamator dan presiden pertama. Pikiran dan tindakannya pun besar. Antikolonialisme-imperialisme. Dalam pidato pembelaan di depan hakim kolonial pada tahun 1930 Bung Karno dengan lantang menyerang kolonialisme-imperialisme. Selain sumber ketidakadilan dan kemiskinan rakyat jajahan, kolonialisme-imperialisme dinilai telah memerosotkan harkat martabat, jiwa, masyarakat tanah jajahan. Bung Karno melawannya. Lalu mendalilkan tiga jurus kesaktian, *trisakti*: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

Maka wajar bila di benak sebagian rakyat Indonesia Bung

Karno adalah sosok – meminjam Baudrillard – “hiper-real” (*hyperreal*). Tokoh *history* sekaligus *story*. Karena itu, meski telah puluhan tahun jasadnya ditelan bumi, citra pribadinya tetap dan makin dikenang di kalangan rakyat banyak. Apalagi bila dimusuhi seperti pada zaman Orde Baru. Bahkan dicari, direproduksi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, simbol kekuatan yang menantang kekuasaan yang sewenang-wenang, simbol pembelaan terhadap *wong cilik*.

Jagad politik Jatim menjelang Pilgub 2018 makin menarik tatkala cucu Bung Karno, Puti Guntur Soekarno, muncul. Sosok aristokrat yang dikenalkan publik dengan sapaan Mbak Puti itu menggantikan Pak Anas yang mundur sebagai calon wakil gubernur mendampingi Gus Ipul. Meski darah Jatim – kakeknya lahir dan besar di Jatim, makamnya pun di Jatim – Mbak Puti terbilang orang baru buat masyarakat Jatim. Namun tidaklah sulit meletakkan kehadirannya dalam perspektif kultural maupun politik Jatim.

Jatim tergolong plural secara kultural. Ada subkultur Jawa (Mataraman), Madura, Arek, Tengger, Osing. Di samping Tionghoa dan Arab. Area subkultur Jawa tersebar di Jatim bagian barat. Area Madura di Pulau Madura, kepulauan Madura, dan daerah “tapal kuda” Jatim. Area Arek di Surabaya dan sekitarnya. Area Tengger di sekitar Pegunungan Bromo Tengger, dan Osing di Kabupaten Banyuwangi. Area Tionghoa dan Arab biasanya di pusat kota.

Meminjam Geertz, di Jatim terdapat dua orientasi keagamaan dominan yakni “abangan” dan “santri”. Dua orientasi itu bisa saja terjadi di masing-masing subkultur. Tapi “abangan” tampak dominan di subkultur Jawa, Tengger dan Osing. Lalu “santri” dominan di kultur Madura.

Subkultur dan orientasi keagamaan itu tentu mempengaruhi pandangan masyarakat. Termasuk dalam hal politik. Tidak

aneh bila dinamika politik di Jatim senantiasa diwarnai kekuatan politik “abangan” dan “santri”. Pilgub Jatim 2018 pun diwarnai kekuatan “abangan” dan “santri”. Bukan kompetitif, tapi kolaboratif. Dan munculnya Mbak Puti yang dijagokan PDIP tentu sangat membantu Gus Ipul yang “santri” untuk menaklukkan area “abangan”.

Tapi saya melihat tantangan besar justru pada Mbak Puti. Bukan karena figur baru di Jatim, tapi karena Mbak Puti menyanggah nama besar kakeknya yang oleh publik dipahami sebagai tokoh hiper-real. Menguntungkan secara politik, tapi juga berat. Penuh amanat besar. Pikiran-pikiran besar kakeknya tentu menjadi referensi publik. Mbak Puti memang bukan Bung Karno, tapi publik tentu akan meletakkannya tidak jauh dari kakeknya.

Dalam catatan sebelumnya (1 Januari 2018) saya menyatakan bahwa publik Jatim tidak butuh “pejabat politik” tapi butuh “pemimpin politik”. Pejabat politik biasanya suka melukai perasaan rakyat. Pemimpin politik akan melindungi dan hidup untuk rakyatnya. Jatim mencari pemimpin politik yang mampu dan sanggup mengajak para buruh, petani, nelayan, guru, pengusaha, para pegawai pemerintah dan rakyat yang lain untuk bersama-sama menatap masa depan dengan kepala tegak dan wajah berseri-seri.

Dari banyak sisi, Jatim vital buat Indonesia. Bahkan pernah cukup lama menjadi pusat peradaban Nusantara. Maka bangunlah jiwanya, seperti kata WR Soepratman, lalu bangunlah badannya. Di dalam “jiwa” itulah terdapat spirit dan karakter: kita merasakan dan mengerti hidup berkebangsaan, ada kesadaran kolektif untuk maju dan makmur bersama, kabeh sedulur kabeh makmur. Sisi inilah yang menantang Mbak Puti, di luar spektrum kultural.

Tak terasa kereta hampir tiba di Karangasem. Saya pamit

kepada Pak Tua yang telah mengajarkan kearifan lokal. Sambil menjabat tangan saya, Pak Tua berujar, “Mbak Puti itu mewarisi kharisma kakeknya.” Masuk akal juga. “DNA biologis” Bung Karno memang mengalir di tubuh Mbak Puti. Tapi masuk akal pula – dan tidak kalah penting – bila Jatim menuntut “DNA ideologis” kakeknya mengalir juga di tubuhnya. Lalu kita bertanya, “Mana trisaktimu?” **(27 Januari 2018)**

Politik Bunga Mawar

Perjalanan saya ke Banyuwangi dengan Probowangi tempo hari sungguh produktif. Pak Tua yang duduk di samping saya rupanya penyuka politik. Rajin baca *Jawa Pos*. Pak Tua antusias sekali menyambut perkenalan saya. Rupanya rajin juga mengikuti catatan saya di *Radar Banyuwangi*.

Pak Tua langsung mengawali *gesah* soal pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia yang baru usai. Ia memaparkan analisisnya. Ternyata tak kalah dengan pengamat profesional yang biasa muncul di televisi. Bahkan terasa lebih bernas. Saya serius menyimaknya. Dengan metafor bunga mawar yang dikutip dari Bung Karno, Pak Tua berteori: “bunga mawar tak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbak itu tersebar di sekilangnya.”

Saya acungi jempol analisisnya. Teori “politik bunga mawar” Pak Tua tampaknya cukup menjelaskan siapa pemenang pilkada pada 27 Juni 2018. Tak ada jaminan petahana menang. Tak ada jaminan koalisi partai politik (parpol) besar menang. Tak ada jaminan basis pendukung parpol akan memilih pasangan calon (paslon) yang diusung parpol tersebut.

Paslon Partai Golkar di Sulawesi Selatan keok oleh paslon yang diusung parpol lain. Padahal Sulawesi Selatan lumbung

Partai Golkar. PKB yang jaya di Jawa Timur harus melihat kenyataan basis pendukungnya banyak yang memilih paslon parpol lain. Di daerah Mataraman Jawa Timur banyak pula “banteng” keluar kandang. Tak mau pilih paslon PDIP. Koalisi dua parpol terbesar di Jawa Timur, PKB dan PDIP, ternyata tak menjamin kemenangan paslonnya. Bahkan pilwali di Makassar dimenangi kotak kosong. Padahal paslon didukung 10 parpol, termasuk parpol besar. Tapi realitas bicara lain. Rakyat sungguh memberi pelajaran berharga buat perpolitikan negeri ini. “Rakyat *ngece* parpol,” kata Pak Tua dengan terkekeh.

Pak Tua boleh jadi benar. Apakah parpol tidak bekerja? Bekerja. Tapi apa yang dilakukan tak akan melampaui kadar keharuman bunga mawar itu sendiri. Yang dilakukan parpol (dan relawan) saat pemilu sesungguhnya hanyalah membantu meluaskan sebaran keharuman paslon. Tapi publik memiliki “kepekaan” sendiri untuk merasakan kadar keharuman itu. Publik ternyata tidak gampang lagi dicocok hidungnya agar patuh. Saya mengamini pikiran Pak Tua bahwa parpol harus belajar dari fenomena tersebut.

Maka kata kuncinya adalah kaderisasi. Kata Pak Tua, tumbuhkan bunga mawar sebanyak mungkin di bumi Nusantara. Fenomena pilkada kemarin memperlihatkan betapa di tubuh parpol ada masalah serius soal kaderisasi.

Saya cocok dengan teori “politik bunga mawar” Pak Tua. Di negara demokratik modern, kaderisasi politik adalah tugas dan tanggung jawab pokok parpol. Parpol harus mendidik dan menyiapkan para anggotanya sebagai calon pemimpin politik.

Parpol dibentuk dengan ideologi yang berbeda-beda. Parpol dibedakan berdasarkan ciri paradigmatis (ideologis). Tanpa ciri paradigmatis keberadaan parpol patut dipertanyakan. Tak rasional dibentuk dan ditawarkan kepada rakyat untuk dipilih sebagai pelembagaan politik. Kerangka berpikir yang menjadi

ciri paradigmatik itulah yang kelak menuntun kadernya sebagai pemimpin politik. Yang mengarahkan kebijakan kepemimpinan kadernya. Maka kader parpol adalah calon pemimpin politik yang menguasai ideologi partainya. Ini teorinya.

Maka menjadi aneh bila parpol kebingungan calon pemimpin politik. Lalu mencari-cari tokoh luar yang dianggap populer. Boleh jadi parpol tak menjalankan tugas dan tanggung jawab utamanya. Atau parpol tersebut memang tak memiliki ciri paradigmatik yang jelas.

Pertumbuhan parpol di Indonesia pascareformasi, saya kira, patut dikritik dari sudut fundamental itu. Rakyat disuguhi parpol yang amat banyak, tapi tak jelas ciri paradigmatik yang membedakannya. Banyak parpol, tapi sedikit pilihan. Parpol dibentuk terkesan formalitas untuk memenuhi ambisi politis pemimpinnya. Faktanya sejumlah parpol dibentuk melalui pembelahan yang dilakukan elitnya. Setelah mereka kalah dalam perebutan kekuasaan di internal parpol tersebut.

Menurut Pak Tua, kita ternyata masih suka melihat “tokoh”, bukan “pokok”. Padahal, pokoklah yang melahirkan tokoh. “Bung Karno besar karena pikiran dan tindakannya besar,” tegas Pak Tua. Dan itulah kristalisasi keringat. Itulah kadar keharuman sang bunga mawar.

Karena itu pula model koalisi politik juga tidak jelas dasarnya. Yang terjadi adalah koalisi pragmatis model “koalisi tokoh”. Bukan “koalisi pokok”. Pada satu momentum politik parpol berkoalisi, tapi pada momentum lain berhadapan. Koalisi pada pilgub Jawa Timur yang baru lalu, misalnya. Pasangan Ipul-Puti disokong PKB, PDIP, Partai Gerindra, dan PKS. Padahal di pentas nasional dan di sejumlah daerah parpol tersebut berhadapan. Bangunan koalisi lalu rapuh, tidak bisa dipolakan, dan rentan konflik.

Di sisi lain muncul kader “kutu loncat”. Orang bisa dengan

mudah pindah parpol. Hari ini kader parpol A, besok parpol B, lusa parpol C. Atau parpol juga gampang memberikan kursi kepada tokoh tertentu yang dinilai populer. Parpol dan tokoh ternyata cenderung cuek terhadap urusan “pokok”.

Karena itu pula arah kebijakan kepemimpinan politik kader parpol satu dengan parpol lain sering kali sulit dibedakan. Bupati/gubernur A (dari parpol A) ternyata punya selera kebijakan yang sama dengan bupati/gubernur B (dari parpol B). Tokoh berubah, tapi pokok tetap. Aneh, tapi nyata.

Secara akademis muncullah pertanyaan apakah model kepartaian di negara Pancasila memang seperti itu? Tatkala ideologi negara sudah ditetapkan (Pancasila), apakah parpol sudah tidak perlu bicara ideologi? Lalu di mana fungsi ideologis kepartaian?

Tak terasa saya harus pamit Pak Tua. Probowangi sudah mendekati Stasiun Karangasem. Terima kasih atas *gesah* yang mencerahkan. Pak Tua berdiri menepuk pundak saya sambil berujar, “Bunga mawar tak hanya harum semerbak. Tapi juga warna-warni nan indah.” **(9 Juli 2018)**

Politik Meme

Dalam beberapa hari terakhir ini telepon pintar saya penuh meme tentang Setya Novanto, Ketua DPR RI. Seperti kita ketahui, Setya Novanto yang dijuluki “orang sakti” karena selalu lolos dari jeratan hukum, dirawat di rumah sakit di Jakarta setelah mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik, Kamis (16/11). Kejadian itu beriringan dengan upaya KPK menjemput paksa Setya Novanto setelah dianggap tidak kooperatif menyusul ditetapkannya kembali sebagai tersangka kasus KTP-e.

Meme tentang Setya Novanto segera memenuhi media sosial. Dengan kreativitas dan sudut pandang masing-masing warganet memberikan komentar dan pendapatnya dengan bahasa “zaman now”. Antara kritik, kecaman, olok-olok, dan sindiran, campur baur dengan bahasa gambar dan kata-kata yang lucu, kocak, tak logis, menggemaskan, dan unik.

Jadilah meme tentang Setya Novanto memenuhi media sosial. Salah satu meme yang dikabarkan viral di media sosial adalah meme tiang listrik. Gambar tiang listrik hendak dimakamkan oleh sekelompok orang, dan diberi kata-kata “Akibat ditabrak papa, jenazah tiang listrik susah dikebumikan”. Ada juga gambar tiang listrik tergeletak di tengah jalan raya,

dan diberi kata-kata “Diduga karena takut dijadikan tersangka dalam kecelakaan semalam, sebuah tiang listrik memilih bunuh diri di tengah jalan”. Lalu, ada juga gambar Setya Novanto di dalam kardus, dan diberi kata-kata “Dah aman belom bro...?” Saya yakin HP pintar para pembaca juga penuh meme seperti itu, dan setiap membacanya kita selalu tertawa.

Saya lalu teringat 20 tahun lalu saat studi magister di Jogjakarta. Waktu itu masa akhir rezim Orde Baru. Majalah *D & R* membuat sampul parodi yang unik untuk edisi No. 29, 7 Maret 1998, yang terbit saat berlangsung Sidang Umum MPR 1998. Sampul majalah itu memuat gambar kepala Presiden Soeharto lagi tersenyum dalam dibingkai kartu remi raja.

Di dalam majalah terdapat tulisan berjudul “Presiden”, yang dibuka dengan alinea: “Dibolak-balik, seperti gambar dalam kartu, ya, sama saja. Itulah ibarat ihwal pemilihan (lebih tepat pengesahan) presiden (dan mungkin juga wakil presiden) oleh Sidang Umum MPR 1998”. Sampul majalah yang bersifat parodi itu kontan membuat Menteri Penerangan R. Hartono marah-marah, karena dianggap menghina kepala negara. Majalah *D & R* lalu dibredel.

Dalam kurun waktu hampir bersamaan, di Jogjakarta berlangsung demonstrasi besar yang melibatkan puluhan ribu mahasiswa. Di bawah panas terik matahari sejumlah mahasiswa mengusung sebuah patung besar. Patung itu terbuat dari kertas dan bagian kepalanya ditemplei gambar wajah Soeharto. Patung besar itu lalu dibakar. Beberapa mahasiswa yang berdiri di samping saya sempat tercengang dan tampak tegang, tapi kemudian tenggelam dalam hingar bingar massa. “Wah, gawat,” ujar seorang di antaranya seperti ada rasa gamang menyaksikan pembakaran patung itu. Dan benar, beberapa hari kemudian dikabarkan bahwa beberapa mahasiswa UGM dipolisikan.

Serupa tapi tak sama. Kesaktian Pak Harto waktu itu masih

bertuah untuk mengontrol publik. Orde Baru adalah rezim otoriter. Saluran komunikasi publik dikontrol ketat. Lalu cara masyarakat melawan di antaranya dengan bahasa “plesetan”. Demokrasi diplesetkan menjadi “demo dikerasi”. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) diplesetkan menjadi “Putra Putri Presiden”. Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) diplesetkan menjadi “Soeharto seperti Marcos”, dan sebagainya. Sebagai bahasa perlawanan, plesetan tidak bermain di ranah tuturan langsung tapi simbolik.

Meme tentang Setya Novanto muncul dalam “zaman now”, zaman digital, yang dimungkinkan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah bersifat personal dan tanpa batas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga menjadi penyebab terbaginya kuasa saluran komunikasi publik. Negara atau orang sakti tak lagi bisa mendominasi saluran komunikasi publik. Setya Novanto dengan segenap kesaktiannya tak akan bisa menghentikan produksi, reproduksi dan penyebaran meme dirinya di media sosial. Inilah politik meme, demokrasi digital “zaman now”.

Bila kehidupan politik dan budaya boleh dimengerti sebagai proses yang tak pernah final, politik meme sangatlah bermakna. Realitas politik memang tidak mungkin berubah hanya dengan meme. Namun, perubahan realitas juga bukan terjadi begitu saja. Perubahan realitas tetaplah membutuhkan kekuatan objektif yang berasal dari dinamika material, tapi sekaligus juga tidak mungkin mengabaikan kekuatan subjektif berupa kesadaran masyarakat yang hari ini diwujudkan dalam politik meme.

Sejarah bukanlah suatu gerak yang linier dan bisa dipatok secara mekanis dari luar. Sejarah tetap dalam proses menjadi dan bergerak secara terbuka, yang di dalamnya berisi jalinan rumit antara yang objektif dan subjektif. Dengan demikian,

politik meme dapat ditempatkan sebagai kekuatan subjektif. Dalam konteks ini politik meme dapat ditafsirkan sebagai upaya mengembangkan opini alternatif untuk menyanggahi, membandingi, dan bahkan juga menandingi opini resmi.

Opini alternatif itu haruslah bisa dikomunikasikan untuk memperoleh apresiasi yang layak dari khalayak, dan hari ini warganet menemukannya melalui meme di media sosial. Sasarannya adalah efek yang ditimbulkannya, baik langsung maupun tidak langsung, yakni diskusi publik. Meskipun meme di media sosial itu bersifat sporadis, tapi dalam jangka panjang tidak bisa disepelekan. Politik meme itu berjejaring dan tersimpan dalam memori digital yang gampang direproduksi. Politik meme boleh jadi merupakan instrumen baru bagi perubahan budaya politik ke arah tumbuhnya demokrasi yang lebih berkualitas di negeri ini. **(27 November 2017)**

Anatomi Politik Uang

W*wani pira?* (berani berapa?). Kalimat berbahasa Jawa itu biasanya kita temukan di pasar tradisional. Biasanya dipakai penjual untuk menawarkan dagangannya kepada calon pembeli. Di pasar modern tak akan kita temukan. Di pasar modern tak ada lagi tawar-menawar. Harga sudah dipatok. Pembeli harus membayar sesuai yang tertulis.

Tapi beberapa tahun belakangan kalimat “*wani pira?*” populer pula di bidang politik. Terutama saat menjelang pemilihan umum (pemilu). Seperti yang akan kita hadapi sebentar lagi. Pemilunya memang baru 17 April 2019. Baik pemilu untuk DPR/DPRD/DPD maupun presiden. Tapi prosesnya sudah berlangsung.

Para calon anggota DPR/DPRD/DPD sudah terdaftar di penyelenggara pemilu. Tak lama lagi memasuki masa kampanye. Sebagian besar calon pasti sudah siap-siap. Bahkan sudah pasang gambar diri di sejumlah tempat.

Pemilu presiden pun tak lama lagi memasuki pendaf-taran. Kini para calon presiden sedang penjajagan dengan para calon wakilnya. Lagi berhitung. Pemilu kali ini tentu akan lebih seru. Pertama kali serentak antara pemilihan anggota legislatif dan presiden.

Maka hingga 17 April 2019 kalimat “wani pira?” saya prediksi akan sering diproduksi. Setidaknya berdasarkan pengamatan saya di setiap pemilu sejak zaman reformasi. Terutama sejak pemilih memilih orang dalam pemilu legislatif dan pemilihan langsung presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Bukan hanya masyarakat berbahasa Jawa. Masyarakat non-Jawa pun paham. Sebagai bahasa transaksi, tawar-menawar.

Kalimat “*wani pira?*” menandai era politik uang. Pemilik suara mentraksaksikan suaranya kepada calon yang akan dipilih dengan imbalan tertentu. Imbalan itu diukur dengan uang. Biasanya berupa barang seperti paket sembako, kaos, dan semacamnya. Atau amlop berisi uang. Nilainya kurang lebih Rp. 100.000. Sederhana sekali. Paket sembako atau amlop berisi uang itu ditukar dukungan suara. Hiruk-pikuk politik uang akan mengisi hari-hari kita ke depan.

Sebenarnya tak ada yang aneh. Kehidupan manusia memang penuh transaksi. Politik pun penuh aktivitas transaksi. Menuntut sesuatu yang bersifat “timbang balik”. Tak ada yang gratis di dunia ini, kata Marcel Mauss, antropolog yang pernah meneliti makna pemberian sejak zaman kuno. Tak ada pemberian cuma-cuma. Segala bentuk pemberian selalu dibarengi dengan pemberian kembali atau imbalan. Bahkan pemberian hadiah yang dilakukan seorang suami kepada sang istri pun oleh Mauss dibaca sebagai suatu imbalan atas pelayanan seksual yang diberikan sang istri. Maka waspadalah kaum perempuan bila memperoleh hadiah dari kaum pria, kendatipun cuma sekuntum bunga.

Politik dapat pula dipahami sebagai “pemberian timbal-balik”. Ada yang dipertukarkan. Seseorang berpartisipasi dalam politik bukan tanpa harapan. Bukan tanpa tendensi. Ada “kepentingan” yang menyertainya. Politik diperebutkan karena berhubungan dengan kekuasaan mengatur pendistribusian

kepentingan itu.

Tapi dalam politik uang kepentingan rakyat (pemilik suara) direduksi. Kepentingan mereka sekadar dikonversi dengan uang senilai ratusan ribu, bahkan puluhan ribu saja. Dukungan suara ditukar dengan uang atau barang senilai uang tersebut.

Politik lalu bukan “membangun”, melainkan “membeli” dukungan. Politik mirip pasar tradisional. Orang datang, bertemu, berkerumun untuk sekadar jual-beli dukungan. Begitu ada kesepakatan dan masing-masing melaksanakan kewajiban, pada saat itu pula hubungan keduanya putus. Begitulah hukum jual-beli.

Tak ada kewajiban tambahan bagi mereka yang sudah membeli dukungan. Bila mereka nanti terpilih menjadi pemimpin politik, tak ada kewajiban apapun kepada rakyat. Kewajiban mereka sudah gugur dan terpenuhi melalui transaksi tadi. Rakyat sebagai pemilik suara mendapatkan paket sembako atau uang. Calon memperoleh dukungan suara.

Maka jangan menggerutu, bahkan kecewa, bila pemimpin politik tak lagi mengurus kita. Kewajiban mereka kepada kita sudah terpenuhi dengan membayar sejumlah uang atau barang senilai uang itu. Kita tak berhak bertanya, misalnya, mengapa kebijakan yang mereka buat tak menguntungkan kita (rakyat).

Itulah politik uang. Sangat mahal. Para calon pemimpin politik harus mengumpulkan dana yang sangat besar. Sebagai modal. Peluang kemenangan pun dilihat dari ketersediaan modal kapital. Yang lain-lain urutan belakang. Bagi yang tak punya modal kapital cukup, biasanya tak berani ikut. Kalau pun ikut (sebagai calon), biasanya tak berani sering-sering muncul di muka publik.

Aneh tapi nyata. Politik seharusnya memproduksi pertemuan-pertemuan. Politik itu mempertemukan antarsubjek. Tapi salah satu dimensi politik uang justru menihilkan

pertemuan-pertemuan. Politik uang menjauhkan antarsubjek.

Maka ketika kekuasaan politik berhasil diperoleh, kekuasaan juga dengan gampang “dijual” kepada yang membutuhkan. Bisa birokrat. Bisa pula pengusaha. Atau kalangan lain. Tentu buat kepentingan mereka. Maka korupsi, suap, dan bentuk-bentuk lain penyelewengan jabatan sesungguhnya adalah pernak-pirnik politik uang.

Yang sangat berbahaya, bila pembeli kekuasaan jenis kapitalis tamak. Mereka mengincar peraturan perundang-undangan dan kebijakan tertentu yang menjadi produk pemimpin politik. Misalnya di bidang pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan, perbankan, perdagangan dan bidang-bidang “basah” lain. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan “dibeli” oleh kapitalis tamak agar isinya menguntungkan kepentingan pelipatgandaan modal.

Inilah yang disebut *state-capture* atau *state-hijacked corruption*, korupsi yang menyandera negara. Nilainya bukan recehan, atau skala kecil-kecilan. Negara yang seharusnya buat rakyat ditawan dan diperalat pemimpinnya untuk kepentingan kaum kapitalis.

Politik uang menihilkan transaksi gagasan. Perbincangan tentang sistem pengetahuan dan pandangan hidup, nilai-nilai, etos, cita-cita bersama, serta konsepsi tentang sistem sosial yang mengatur hubungan-hubungan sosial yang berkeadilan, nihil. Tak dibutuhkan.

Apakah kita akan bertahan dengan politik uang seperti itu? Tentu tidak! Politik harus dikembalikan untuk sepenuhnya mengabdikan pada kemaslahatan umum. Itulah politik gagasan. Bagaimana itu? Tunggu catatan berikutnya. **(1 Agustus 2018)**

Merdeka Via Politik

Gagasan

Mengapa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu ada? Mari kita renungkan secara mendalam. Saya percaya pembaca yang budiman akan mengamini tesis bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia sejatinya adalah kemenangan “politik gagasan”.

Kemenangan melawan apa? Melawan “politik uang”. Melawan transaksi politik yang tak menghargai harkat manusia. Melawan arogansi elite yang tak mau tahu bahwa “orang lain” (*the others*) juga punya mimpi masa depan. Maka proklamasi kemerdekaan yang diteken Soekarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia tak lain adalah manifesto politik gagasan.

Tengoklah sejarah pembentukan bangsa Indonesia. Di catatan yang berjudul *Merawat Kebangsaan* (20 Mei 2018) saya mengutip konsep geopolitik Bung Karno. Di atas tanah “dari Sabang sampai Merauke” yang merupakan wilayah jajahan Hindia-Belanda dilihat Bung Karno sebagai konsep geopolitik. Di sana dibentuk kesatuan nasional, kesatuan cita-cita sosial, kesatuan kenegaraan, dan kesatuan ideologi. Suatu gagasan yang kelak mengkristal menjadi identitas bangsa yang hidup di atas tanah “dari Sabang sampai Merauke”.

Gagasan itulah yang diperjuangkan. Bukan lagi dengan

cara Pangeran Diponegoro. Mulailah ditempuh jalan baru. Ya, jalan politik. Melalui partai politik. Melalui rapat-rapat politik. Melalui tindakan-tindakan politik.

Gagasan itulah yang kelak dimatangkan dan dirumuskan dalam sidang BPUPKI. Yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Gagasan itulah yang mendasari teks proklamasi yang dibaca Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Gagasan itu tak lain adalah imajinasi tentang masa depan bangsa Indonesia.

Maka politik gagasan yang kita maksud di sini tak lain adalah politik pemuliaan masa depan bersama. Politik sebagai jalan menuju kemaslahatan bersama. Kemerdekaan bangsa Indonesia tak akan pernah ada bila rakyat dan para pemimpinnya waktu itu menyerah pada politik uang. Tak akan terwujud bila rakyat dan para pemimpinnya mau dihargai sebatas “kenikmatan sesaat secara personal”.

Di catatan sebelumnya (1 Agustus 2018) saya membuka anatomi politik uang. Bukan hanya menistakan derajat kemanusiaan, politik uang potensial membuat negara tersandra untuk kepentingan kelompok kecil semata. Saya mengajak masyarakat mengembalikan politik sebagai jalan menuju kemaslahatan umum.

Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Sebentar lagi proses politik di negeri ini memasuki tahapan penting yakni kampanye pemilu legislatif dan presiden serentak. Meski hanya beberapa menit di bilik suara, saat itu sejatinya kita menandatangani kontrak. Dengan siapa? Dengan para calon pemimpin politik, orang-orang yang kelak membuat dan memutuskan kebijakan. Apa yang kita kontrakkan? Tak lain masa depan kita! Maka sangat tidak masuk akal bila masa depan itu hanya dikontrakkan senilai satu paket sembako. Tinggalkan politik sembako.

Bila politik uang menihilkan transaksi gagasan, sebaliknya politik gagasan justru memuliakannya. Menganjurkan pertemuan-pertemuan, perbincangan-perbincangan, perde-batan-perdebatan. Memuliakan cita-cita bersama, kebaikan bersama. Politik gagasan menawarkan perubahan menuju sistem kehidupan yang berkeadilan.

Maka ada kewajiban politik bagi calon pemimpin politik. Kewajiban itu akan dilunasi melalui produk politik. Hampir setiap langkah kita terkait produk politik. Bisa peraturan perundang-undangan. Bisa pula kebijakan-kebijakan. Melalui produk politik itu rakyat menilai kinerja para pemimpinnya.

Mari kita kini mentransaksikan gagasan-gagasan. Kita punya kemerdekaan. Kita berhak mendefinisikan realitas sosial. Sangat banyak yang perlu diubah, diperbaiki. Maka perlu peraturan perundang-undangan baru. Perlu kebijakan baru. Mungkin tidak cukup di level kabupaten. Perlu provinsi, bahkan pusat. Mari kita ajak para calon pemimpin politik membaca dan berdiskusi soal realitas sosial yang melingkupi kita.

Begitu pula para calon pemimpin politik. Jangan sembunyi. Datangai rakyat calon pemilih. Ajak mereka ber-*gesah*. Tawarkan gagasan-gagasan cerdas untuk mengubah realitas sosial. Media hanyalah alat bantu untuk “menghadirkan” diri Anda.

Maka politik gagasan tidak bisa instan. Perlu ikhtiar membangun. Ada kristalisasi keringat. Jabatan politik bukan lapangan pekerjaan. Bukan profesi pada umumnya. Butuh pengalaman dan kesungguhan politik.

Itulah yang disebut kader dan kaderisasi politik. Di negara demokratis modern, kader dan kaderisasi politik adalah tugas dan tanggung jawab pokok partai politik. Partai politik harus mendidik dan menyiapkan para anggotanya menjadi kader pemimpin politik. Dari sudut ini, saya menilai, partai politik kita

masih payah. Di mata saya, agak aneh partai politik membuka rekrutmen calon anggota legislatif kepada masyarakat umum.

Tapi kita tak boleh menyerah. Politik harus diperjuangkan untuk dikembalikan sebagai jalan menuju kemaslahatan bersama. Aktivitas politik harus kembali dihayati sebagai pelaksanaan prinsip keyakinan dan pencapaian idealisme politik. Sebagai panggilan pelayanan dan pengabdian bagi kepentingan rakyat banyak, bangsa dan negara. Bekerja demi publik. Bukan pribadi, bukan pula kelompok. Sepak terjang pemimpin politik harus senantiasa memberikan keteladanan dan berimplikasi pada pendidikan politik bangsa. Inilah basis etis politik gagasan.

Saya yakin hal itu bukan teori belaka. Sebenarnya telah lama hidup dan berkembang di masyarakat kita. Bahkan menjadi modal utama pembentukan bangsa. Para pendiri bangsa akan kesulitan membangun kebangsaan yang kuat di tengah realitas kemajemukan masyarakat tanpa gagasan cerdas dan didasari etika yang kuat. Kemerdekaan dan pengakuan Pancasila sebagai dasar negara dengan jelas merefleksikan peran politik gagasan.

Melemah dan menjauhnya politik gagasan akan melahirkan kehidupan berbangsa-negara makin tak menentu. Negara akan dengan mudah ditawan untuk kepentingan elite tertentu. Kita tidak ingin melihat makin banyak pemimpin politik menjadi narapidana korupsi.

Maka menyongsong pemilu legislatif dan presiden nanti mari berseru, “*No* politik uang. *Yes* politik gagasan”. Kita meraih kemerdekaan dengan politik gagasan, maka kita merayakannya dengan politik gagasan pula. Dirgayahu Republik Indonesia. Sekali Merdeka Tetap Merdeka! **(16 Agustus 2018)**

De-Soekarnoisasi Sia-Sia

“Duh Bung Karno, untuk siapa kau merdekakan bangsa ini?”

Teks puitis ini bukan sajak Agustusan. Saya kutip dari spanduk yang dibentangkan ratusan petani Jenggawah saat haul Bung Karno di Blitar (1995). Dulu saya kutip untuk mendalami perlawanan petani di zaman Orde Baru (Orba) yang menjadi riset magister saya. Tapi teks dan konteksnya menarik dibaca ulang hari ini, mengenang kematian Soekarno.

Kita tahu jasad Soekarno sudah ditelan bumi sejak 21 Juni 1970. Soekarno juga dimatikan secara politik, sosial, dan budaya oleh rezim Orba sejak 1966. Melalui siasat “de-Soekarnoisasi”. Tapi mengapa muncul teks pengaduan kepadanya? Seolah-olah Soekarno akan hidup kembali. Sebuah teks yang dengan mudah diterka siapa pembuatnya. Tak lain, rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Orba, jauh dari makna kemerdekaan.

Teks menyelinap di tengah ribuan manusia yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Saya yakin sebagian besar mereka mengamini teks tersebut. Meski beda persoalan. Meski tanpa bicara

Yang menarik, teks diproduksi justru saat penguasa Orba

masih digdaya. Bahkan ancang-ancang menancapkan kembali kekuasaannya melalui pemilu 1997. Tapi tak satu pun pengamat kala itu bicara senja kala Orba. Barangkali pula tak satu pun orang Indonesia punya firasat bahwa tak lama lagi Orba runtuh. Kalau pun punya firasat tentu memilih diam. Tak seperti hari ini, setiap orang bisa omong apa saja. Meski miskin data.

Yang juga menarik, pada kurun waktu itu banyak pula reproduksi gambar (teks) Soekarno dalam beragam media. Terutama kaus (*t-shirt*) dan stiker. Juga pidato Soekarno. Justru oleh kalangan muda yang lahir dan besar pada zaman Orba. Yang tak punya beban sejarah. Yang terkesan *ngece* penguasa. Tanda-tanda senja kala Orba?

Teks pengaduan petani itu memaksa saya membuka kembali *Indonesia Menggugat* yang ditulis Soekarno pada 1930. Menelaah lagi pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di sidang BPUPK. Membaca ulang beberapa tulisannya saat malang-melintang memimpin pergerakan melawan rezim kolonial. Teks juga memaksa saya memahami semangat, keberanian, dan kegigihan Soekarno memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.

Karena itu saya melihat Soekarno penuh jalinan antarteks yang kompleks. Bukan teks politik saja, tapi juga sejarah dan kosmologi (budaya). Jalinan antarteks membentuk sosok Soekarno sebagai tokoh historis sekaligus mistis, “setengah manusia-setengah dewa”. Atau “hiper-real” (*hyperreal*) menurut Baudrillard.

Sebagai tokoh historis, pikiran dan tindakannya terdokumentasi secara jelas. Mudah dilacak, dibaca, dirujuk. Ada pula kesaksian. Pikiran dan tindakannya antikolonialisme-imperialisme. Kolonialisme-imperialisme dilihat sebagai sumber ketidakadilan dan kemiskinan rakyat jajahan. Juga dinilai memerosotkan harkat, martabat, dan jiwa rakyat. Maka kemerdekaan sebagai bangsa dan negara harus diperjuangkan. Dan jejak per-

juangannya sangat jelas. Tak terbantahkan. Di akhir 1926 sudah menulis *Nasionalisme, Islamisme, Komunisme*. Menyerukan persatuan kekuatan nasionalis, Islam, dan komunis untuk Indonesia merdeka. Di 1945 memimpin proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Tapi tak aneh pula tokoh historis dibaca secara mistik. Kosmologi masyarakat di Nusantara ini, khususnya Jawa, selalu mempertautkan seseorang dengan dunia adikodrati. Terutama yang punya jasa besar, punya kelebihan. Seperti wali, raja atau pahlawan. Makamnya pun dikeramatkan. Pada hari-hari tertentu makam itu dikunjungi banyak orang dengan beragam kepentingan. Mulai dari yang bersifat spiritual hingga keduniawian (Pemberton, 1994).

Saya bisa paham bila kemudian muncul narasi mistis seputar Soekarno. Karena peran historisnya yang sangat kuat, banyak aspek kehidupannya dibaca publik dari sudut mistik. Kelahirannya, benda-benda kesayangannya, tindak-takduknya. Soekarno dipercayai tidak mati, tapi moksa. Suatu hari nanti akan hadir kembali.

Bukan kebetulan pula pikiran dan tindakan Soekarno menyerupai Ratu Adil (Satria Piningit, Herucakra) dalam ramalan Jayabaya. Sebuah ramalan tersohor dan berpengaruh di masyarakat Jawa. Ratu Adil digambarkan bersenjata trisula. Tombak bermata tiga. Yang hebat, Soekarno bukan antikarya Prabu Jayabaya itu tapi mencernanya dengan kecerdasan semiotik.

Di *Indonesia Menggugat* Soekarno sudah menyebut Ratu Adil. Disebut dan ditegaskan kembali pada pidato bersejarah 1 Juni 1945. Baginya, Ratu Adil adalah konsep dasar ketatanegaraan (*weltanschauung*) yang menjamin kesejahteraan-keadilan. Ditawarkanlah konsep Trisila (Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan). Trisila merupakan perasan dari

Pancasila. Bila diperas lagi jadilah Ekasila (Gotong Royong). Lalu Soekarno juga menggagas Trisakti: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Paham dan ilmu bernegara bermata tiga.

Jalinan antarteks historis dan mistis yang kuat itulah yang membuat Soekarno serasa terus hidup. Meski jasadnya ditelan bumi. Meski citranya dilenyapkan secara sistematis dan masif. Meski sekolah disterilisasi dari karya-karyanya. Meski diproduksi teks tandingan oleh intelektual binaan Orba. Meski harus memperkosa fakta untuk mereduksi peran-perannya.

Nama stadion kebanggaan bangsa Indonesia pun diganti. Semula Gelora Bung Karno. Pada 1984 diganti Stadion Utama Senayan. Maksudnya, enyahlah Soekarno dari memori kolektif bangsa Indonesia. Tapi justru terus dicari.

De-Soekarnoisasi terbukti sia-sia. Tak berguna bagi bangsa. Orba *toh* runtuh juga. Sementara kita kehilangan kesempatan belajar sejarah secara jernih dan kritis. Kehilangan modal budaya yang sangat penting buat merajut, merawat, dan menyuburkan nilai-nilai kebangsaan. Saya khawatir produksi teks Soekarno yang marak dalam beragam media setelah Orba runtuh hanyalah selebrasi penanda (*signifier*) tanpa petanda (*signified*).

Maka buat negara yang sudah berdamai dengan Soekarno, segera ajarkan secara baik dan benar pikiran-pikirannya kepada para siswa/mahasiswa. Juga pikiran pendiri bangsa yang lain. Tentu dengan bahasa zaman now. Agar para calon penentu masa depan kita mengenali dan memahami secara baik hal-hal fundamental kebangsaan dan visi besar Indonesia merdeka. Agar tidak mudah terpicat paham anti-Pancasila.

Kematian Soekarno adalah duka mendalam. Tapi sungguh memilukan tatkala wasiatnya untuk (sekadar) dimakamkan di Bogor ditolak penguasa. Bogor terlalu dekat pusat kekuasaan.

Maka beruntunglah kota Blitar. Ternyata kemanfaatan Soekarno bukan saat hidup saja. Setelah wafat pun makamnya tak pernah berhenti mengalirkan berkah. Menghidupi banyak orang, terutama *wong cilik*. Tanda yang penuh makna.

Saya teringat kata-kata indah Soekarno sendiri: “bunga mawar tak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbak itu tersebar di sekilangnya.” **(21 Juni 2018)**



BAGIAN III

Kebudayaan

.....

“Saya sependapat dengan Slamet Rahardjo. Film adalah representasi kehidupan, maka seniman film adalah orang-orang yang haruslah memahami kehidupan. Film dibuat untuk memuliakan kehidupan.”

[Banyuwangi Kota Film?]

Banyuwangi Kota Film?

Jumat lalu (24/11) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi kedatangan orang-orang penting, tokoh-tokoh senior perfilman Indonesia. Tamu itu adalah Slamet Rahardjo, Niniek L Karim, Tio Pakusadewo, dan rombongan Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikomandani Pak Maman. Kehadiran orang-orang film itu terkait acara Kuliah Umum “Penggunaan Film dalam Pendidikan” dalam rangka Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2017 di Banyuwangi. Konon, Festival Film Indonesia (FFI) 2018 juga akan digelar di Banyuwangi.

Banyuwangi dipilih tokoh-tokoh film itu tentu bukan tanpa alasan. Mungkin terkena mantra “jaran goyang”nya Pak Anas, Bupati Banyuwangi. Tamu-tamu itu memang terpesona oleh Pak Anas. Bupati kita itu dinilai berhasil mengenalkan Banyuwangi, berhasil menanamkan citra positif tentang Banyuwangi di mata orang luar, berhasil menarik orang luar ke Banyuwangi. Pak Slamet Rahardjo bilang bahwa ada 4 tokoh yang mengenalkan dirinya dengan Banyuwangi (Blambangan), yakni Minak Jinggo (Raja Blambangan), Herman Willem Daendels (Gubernur Jenderal Hindia-Belanda), Emilia Contessa (artis nasional asal

Banyuwangi), dan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi sekarang).

Tapi saya juga punya pandangan tersendiri. Saya pun menilai tidak keliru pilihan Banyuwangi. Saya sampaikan kepada tamu-tamu itu bahwa Banyuwangi itu eksotis, ya alamnya, masyarakatnya, ragam makanannya, dan ekspresi seni budayanya. Bu Ninik L Karim mencoba memahaminya melalui rujak soto, dua makanan berbeda yang disatukan untuk menghasilkan cita rasa lain yang khas. Keeksotisan itu menjadi kekuatan Banyuwangi, yang menantang orang-orang kreatif. Pak Anas adalah salah satu contoh orang kreatif yang mampu menangkap keeksotisan itu, dan lalu menerjemahkannya dalam ranah politik kepemimpinannya. Itulah mantra “jaran goyang” Pak Anas, yang radius goyangannya sampai negeri seberang. Tersohorlah Banyuwangi.

Banyuwangi punya Mbok Temuk. Seniman tradisi, maestro gandrung dari Kemiren yang namanya telah lama mendunia dan mengisi pusat-pusat studi kebudayaan, baik di Indonesia maupun dunia, yang nasibnya ternyata tak sebaik namanya. Mbok Temuk juga pernah melantunkan *Petetan* secara kolaboratif dengan Syaharini, pelantun jazz terkenal negeri ini. Meski kini sudah tergolong tua, tapi suara Mbok Temu masih melengking panjang. Kelincahan kaki dan tangannya bersama dengan lengkingan suaranya masih menakjubkan. Bahkan, Profesor Philip Yampolsky, etnomusikolog dari Illinois University, yang pernah merekam Mbok Temuk saat muda, menilai Mbok Temuk nyaris tak berubah. Profesor Philip yang semula sudah “melupakan” Banyuwangi dalam peta risetnya tiba-tiba berubah pikiran. “Saya mempertimbangkan kembali Banyuwangi,” bisiknya kepada saya saat kembali ke kampus Untag setelah menyaksikan penampilan Mbok Temuk di Pesantogan Kemangi, Kemiren.

Bukan hanya Mbok Temuk. Ada pula Wandra. Anak muda Osing, mahasiswa semester 5 Untag Banyuwangi, itu telah membawa lagu-lagu Osing disukai masyarakat lintas etnis. Tetangga saya di Jember, yang mayoritas Madura, ternyata suka memutar lagu-lagu Wandra yang berbahasa Osing itu. Wandra membuktikan lalu-lagunya bisa menembus batas etnis-kultural dan menumbuhkan industri musik yang sebaran produknya jauh ke luar Banyuwangi. Untuk menjadi artis terkenal dan kaya ternyata tidak harus ke Jakarta. Kalau ada mobil Alphard parkir di Untag, tandanya Wandra sedang kuliah.

Mbok Temuk dan Wandra adalah konten lokal. Mereka hanyalah serpihan keeksotisan Banyuwangi. Keeksotisan itu sangat menantang orang-orang film yang kreatif. Bagaikan laut, makin diselami makin ditemukan hal-hal menarik dan menakjubkan. Barangkali di bumi Blambangan telah lama terbentuk habitus, mungkin sudah berabad-abad lamanya. Boleh jadi habitus itu pula yang membentuk Minak Jingggo dengan segenap kehebatannya. Habitus itu pula yang menghasilkan Banyuwangi yang eksotis.

Film *Turah* karya sutradara Wicaksono Wisnu Legowo membuktikan potensi konten lokal. Film *Turah* terpilih mewakili Indonesia di Academy Awards (Oscar) ke-90 untuk kategori film berbahasa asing yang akan digelar di Dolby Theatre Hollywood, 4 Maret 2018. Saya kira, salah satu kekuatan *Turah* justru konten lokalnya. Film produksi Ifa Isfansyah itu menggunakan bahasa Jawa dialek Tegal, bahasa *ngapak*, yang selama ini dicitrakan rendah, yang ditampilkan sekadar untuk melucu, bukan untuk berpikir dan menyampaikan pikiran. Ide ceritanya pun bersifat lokal. *Turah* menceritakan kehidupan masyarakat Kampung Tirang, Tegal. Aktornya juga orang lokal. Tapi kualitas pembacaan para pembuat *Turah* terhadap kehidupan yang lokal itu bukanlah kelas lokal.

Saya sependapat dengan Pak Slamet Rahardjo. Film adalah representasi kehidupan, maka seniman film adalah orang-orang yang haruslah memahami kehidupan. Film dibuat untuk memuliakan kehidupan. “Kalau ada seniman film mengeksploitasi seks, seharusnya ‘dipecat’ dari anggota seniman film,” tegas tokoh Sentilan Sentilun Metro TV itu disambut tepuk tangan audiens kuliah umum.

Film adalah bahasa *zaman now*. Era kedigdayaan pena (bahasa verbal) mulai digantikan oleh kamera (bahasa gambar). Pada zaman Slamet Rahardjo muda bikin film adalah pekerjaan mahal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kini teknologi perfilman bisa dengan mudah dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat luas. Wajar di Banyuwangi mulai tumbuh komunitas-komunitas film dengan talenta yang menjanjikan. Tapi kualitas film tetaplah beriringan dengan kualitas pembacaan kehidupan. “Film harus menampilkan romantika, dialektika, dan dinamika,” demikian Slamet Rahardjo mengakhiri kuliah umum dengan menyitir Bung Karno sambil menatap gambar Bung Karno yang menghiasi dinding auditorium Untag Banyuwangi. Saya pun tertantang. **(27 November 2017)**

Umbul-Umbul Blambangan

*“Ngadega jejeg, ngadega jejeg
Umbul-umbul Belambangan
Ngadega jejeg adil makmur
Nusantara”*

Catatan yang dibuka dengan potongan syair *Umbul-umbul Blambangan* ini saya abdikan untuk mengenang tujuh hari wafat sang pencipta, Andang Chatib Yusuf, yang populer disapa Mbah Andang. Nama depannya kebetulan sama dengan nama saya. Kata *andang* di *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diberi arti ‘obor yang dibuat dari daun nyiur yang kering; suluh’. Dulu, sebelum ada alat penerang bertenaga listrik, masyarakat biasa menggunakan obor untuk menembus kegelapan malam. Dan Mbah Andang memang terlahir untuk menjadi obor. Lewat aktivitasnya sebagai guru, dan pula lewat karya-karya seninya.

Dilahirkan pada tahun 1934, wafat pada tahun 2018, Mbah Andang tergolong orang yang beruntung. Lengkap dalam kacamata sejarah. Mengalami empat zaman, yang masing-masing punya kekhasan. Masa anak-anak menghirup udara zaman kolonial akhir, zaman ketika pergerakan nasional hampir mencapai puncak (kemerdekaan). Masa remaja dididik zaman

revolusi, zaman pergolakan pada awal-awal Indonesia merdeka. Masa dewasa ditempa zaman pembangunan, zaman tatkala proyek modernisasi rezim Orde Baru dimulai dan dijalankan dengan pendekatan “keamanan-ketertiban”. Masa tua dimatangkan zaman reformasi, zaman yang semula merupakan antitesis Orde Baru tapi kemudian justru liberalisasi politik dan ekonomi berlangsung intensif.

Zaman-zaman itu tentu mewarnai proses kreatif Mbah Andang. Konon seniman yang juga guru itu sudah aktif berkesenian dan menulis sastra sejak usia remaja. Tidak hanya puisi, tapi juga drama. Tidak hanya berbahasa Indonesia, tapi juga berbahasa Osing, bahasa khas masyarakat Banyuwangi. Dan ketika saya bertanya kepada sejumlah orang Banyuwangi tentang Mbah Andang sesaat setelah tutup usia, jawabannya pada umumnya menunjuk lagu *Umbul-Umbul Blambangan*.

Orang Banyuwangi hari ini memang tidak asing dengan *Umbul-Umbul Blambangan*. Syair yang ditulis Mbah Andang ini memang sangat populer di Banyuwangi semenjak Bupati Samsul Hadi. Bak lagu kebangsaan. Bahkan telah pula menjadi “lagu wajib” setiap wisuda sarjana di Untag Banyuwangi.

Dalam benak masyarakat Banyuwangi *Umbul-Umbul Blambangan* membangkitkan semangat. Tampaknya Bupati Samsul Hadi melihat aspek heroisme syair karya Mbah Andang itu. Masyarakat perlu disemangati. Tentu dalam perspektif sang bupati, yang berkuasa pada masa transisi ke zaman reformasi. Maka *Umbul-Umbul Blambangan* diangkat dan dipopulerkan agar diakrabi masyarakat. Sebuah cara cerdas. Cocok dengan habitus Banyuwangi. Dan Bupati Anas pun kini turut menuai hasilnya. Banyuwangi *jenggirat tangi*. Dalam banyak hal terbukti menyalip tetangganya, Jember.

Tapi saya membaca bahwa yang dipikirkan Mbah Andang bukan sekadar heroisme tanpa dimensi. *Umbul-Umbul*

Blambangan sarat politik identitas. Ditulis pada tahun 1974, saat rezim Orde Baru gencar-gencarnya menata sistem politik untuk proyek modernisasinya seraya menghabisi lawan-lawan politik yang tersisa yakni golongan kiri (Partai Komunis Indonesia, PKI) pasca prahara 1965. Tentu rezim punya catatan khusus tentang Banyuwangi. Blok kiri di Banyuwangi tidak bisa diremehkan. Di Banyuwangi PKI menempati posisi terdepan pada Pemilu 1955. Lalu ada lagu *Genjer-Genjer* yang dikenal luas sebagai lagunya PKI, yang dicipta oleh Mohammad Arif. Seniman generasi Mbah Andang tentu sangat paham kepiawaian Mohammad Arif sebagai seniman. Ada pula Njoto, nama beken dan elite PKI yang pernah pula membesarkan PKI Banyuwangi.

Melalui *Umbul-Umbul Blambangan*, Mbah Andang mengajak untuk menyelamatkan dan memulihkan Banyuwangi dari dampak prahara 1965. Banyuwangi, tanah Jawa di ujung timur yang indah, yang tak pernah membosankan, kata Mbah Andang: *tanah Jawa pucuk wetan//sing arep bosen//sing arep bosen*. Mbah Andang mengingatkan bahwa prahara senantiasa menguji Banyuwangi sejak pra-kolonial hingga zaman republik.

Maka Banyuwangi membutuhkan revitalisasi identitas dalam konteks Indonesia yang sedang menggelar proyek modernisasi pasca prahara 1965. Simaklah: *Belambangan he seneng susahe wistah aja takon//Wis pirang-pirang jaman turun-temurun yong wis kelakon//Akeh prahara tapping langitira magih biru yara//Magih gedhe magih lampeg umbak umbul segaranira*.

Mbah Andang berusaha mencari sumber revitalisasi identitas. Dihadirkanlah tokoh historis mulai dari pra-kolonial, kolonial, hingga pascakolonial: Menakjingga, Tawang Alun, Agung Wilis, Sayuwit, dan pahlawan kemerdekaan RI. Bahkan tokoh mitologis: Sritanjung. Buat Mbah Andang tampaknya tidak penting apakah sumber itu *history* atau *story*;

apakah kontinuitas atau diskontinuitas. Saya lalu teringat pelajaran sejarah di bangku sekolah dulu. Kejayaan Majapahit dan Sriwijaya dihadirkan untuk mengkonstruksi identitas Indonesia. Meskipun kejayaan dua kerajaan itu miskin jejak di bumi Nusantara.

Umbul-Umbul Blambangan menawarkan identitas Banyuwangi. Pantang menyerah, bersatu atau rukun, dan gotong royong, untuk keadilan dan kemakmuran. Banyuwangi bagian dari Indonesia yang pada waktu itu sedang memulai proyek modernisasi ala rezim Orde Baru: *Suwarane gendhing Belambangan//Nyerambahi nusantara*. Mbah Andang sengaja menggunakan nama Blambangan – bukan Banyuwangi – saya kira untuk menegaskan konsep lokalitas dalam perubahan sosial. Sama pula dengan nama Nusantara dalam *Umbul-Umbul Blambangan*, bukan nama Indonesia.

Saya membaca bahwa konsep lokalitas ini serius bagi Mbah Andang. Di karya lain yang lebih awal, *Luk-luk Lumbu*, Mbah Andang juga mengingatkan secara metaforik. Perubahan zaman yang digerakkan modernisasi, yang dimetaforkan dengan *angin*, tentu membawa bermacam nilai, orientasi, impian. Singkat kata membawa “ideologi”: *Gondo arume, kembang maniko rupo*. Mbah Andang lewat *Luk-luk Lumbu* mengingatkan masyarakat Banyuwangi untuk tidak mudah terbawa arus baru yang belum tentu memberikan kebaikan: *Eluk lumbu, dieluk lumbu//Ojo gampang katut, lan ojo gampang kepilu*.

Lokalitas penting. Indonesia yang sedang memulai proyek modernisasi arahan Orde Baru, tanpa kecuali Banyuwangi, seyogyanya tidak menggusur aspek lokalitasnya. Yang lokal, yang tradisional, harus hidup dan bermakna dalam cakupan yang nasional, yang modern. Kata Mbah Andang: *He... Belambangan//Gemelar ring taman sari nusantara. Lalu di akhir syair: Ngadega jejeg adil lan makmur//Nusantara....*

Keadilan dan kemakmuran pun harus berdimensi lokalitas.

Lagu *Umbul-Umbul Blambangan* memang sudah sehari-hari bagi masyarakat Banyuwangi. Semoga bertuah. Meski tak lagi disaksikan penciptanya. Saya pun mohon izin untuk terus membahanakan *Umbul-Umbul Blambangan* di setiap wisuda sarjana Untag Banyuwangi. **(18 Januari 2018)**

Wandra

Anak muda di samping saya sungguh mengganggu rencana saya. Siang itu saya berniat menikmati Mutiara Timur Siang sambil tidur. Andai kata bisa tidur satu jam saja dalam dua jam perjalanan Jember-Banyuwangi, lumayan lah. Maklum terkena gejala flu. Tapi gagal total.

Mata saya segera terbuka. Kesadaran saya terprovokasi oleh suara Wandra. Anak muda itu memang bukan Wandra. Tapi dari ponsel pintar miliknya terdengar lagu *Kelangan* berirama pop-dangdut yang dilantunkan Wandra. “Kok sepertinya suara Wandra ya?” tanya saya kepada anak muda itu. “Ya Pak,” jawabnya sambil memperlihatkan video lagu *Kelangan* yang ber lirik bahasa Indonesia. Wandra melantungkannya dengan latar Negeri Sakura. Bukan Banyuwangi. “Wah enak juga,” pancing saya. “Ya Pak. Tapi saya lebih suka yang asli,” tegas anak muda yang dari logat bicaranya bisa diduga orang Madura. Yang asli, maksudnya lagu *Kelangan* yang bergenre pop dengan lirik bahasa Osing. Yang sering dinyanyikan Wandra dari panggung ke panggung. Di Banyuwangi maupun luar Banyuwangi.

Wandra. Nama lengkapnya Ainur Rofik Wandra Restusiyon. Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi itu beberapa hari lalu memperoleh penghargaan PWI (Persatuan

Wartawan Indonesia) Banyuwangi sebagai musisi muda berbakat. Wandra dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan dan pembangunan di Banyuwangi. Khususnya di bidang industri musik daerah Banyuwangi. Wandra bukan hanya bermain musik, bikin lagu dan menyanyi. Dia juga mendirikan studio musik. Bukan hanya untuk bermain musik dan rekaman. Tapi juga pendidikan musik. Sejumlah warga Banyuwangi melihatnya sebagai “artis lokal yang lagi menasional”.

PWI Banyuwangi tak salah pilih. Saya juga melihat talenta bermusik dan visi berkesenian mahasiswa Untag itu. Pilihan Wandra bermusik pop dengan lirik bahasa Osing adalah pilihan berani yang cerdas dan visioner. Dari tilikan industri.

Saya melihat potensi bahasa Osing. Buat ekspresi berkesenian. Menyerupai bahasa Jawa. Meski penuturnya tak sebanyak bahasa Jawa. Secara linguistik bahasa Osing memang dekat dengan bahasa Jawa. Tapi punya keunikan sendiri yang potensial dieksplorasi.

Dari segi kosa kata, banyak ditemukan kata-kata arkais. Yang menimbulkan kesan eksotis. Sistem fonologinya pun unik. Baik segmental maupun suprasegmental. Perhatikan setiap orang Osing berbicara. Sudah seperti bernyanyi. Meliuk-liuk. Naik-turun, panjang-pendek. Berirama.

Keunikan itu, menurut hemat saya, membuat bahasa Osing mudah menyatu dengan bunyi alat musik. Baik pentatonik maupun diatonik. Baik tradisional maupun modern. Dan seniman Banyuwangi membuktikan. Tatkala pada tahun 1980-an sampai 2000-an di Jawa Tengah berkembang genre campursari, di Banyuwangi juga muncul kendang-kempul. Alat musik tradisi Osing seperti gamelan, kendang, kempul, kluncing, angklung dipadukan dengan musik modern seperti gitar, bas, keyboard, drum. Syair-syair Osing dilagukan dengan irama kendang-kempul. Kita lalu bisa menikmati *Gelang*

Alit atau *Umbul-Umbul Blambangan* dalam irama kendang-kempul. Dan proses kreatif tak berhenti di sana. Mbok Temu pun melantunkan *Petetan* secara kolaborasi dengan pelantun jazz terkenal di tanah air, Syaharani. Mantap, sekaligus eksotis. Demikian pula Wandra dengan pop-Osingnya.

Saya mencatat ada ciri yang menonjol pada proses kreatif Osing: hibridisasi. Penyilangan dua hal untuk menghasilkan citarasa baru. Kendang-kempul adalah hasil hibridisasi. Lalu hadrah kulturan. Seni Islam-Arab pun “dihybridkan” dengan seni lokal Banyuwangi. Di sektor kuliner ada rujak soto, rawon pecel.

Menurut Tallapessy, dkk., (2017), hibridisasi itu telah menjadi semacam kesadaran kolektif yang menggerakkan kreativitas seniman Banyuwangi dari masa ke masa. Bahkan ada hipotesis menarik tentang tari Gandrung yang dinamis. Diduga ada benang merah dengan cerita para biksu dan gerakan kungfu yang lincah. Hipotesis ini dibangun sehubungan dengan banyaknya sisa-sisa laskar Laksamana Cheng Ho yang menetap di Majapahit Kedaton Wetan (Blambangan) tatkala gagal masuk Majapahit Kedaton Kulon (Tallapessy, dkk., 2017). Kesadaran hibridisasi menjadi kunci keberlanjutan. Strategi adaptasi. Dari zaman ke zaman.

Maka Wandra patut bersyukur. Mewarisi habitus kreatif Osing (Banyuwangi). Tak banyak komunitas etnis di negeri ini yang memilikinya. Maka tak aneh lagu-lagu Wandra yang berada di jalur pop-Osing dengan cepat disukai masyarakat luas. Lintas etnis-kultural.

Wandra membuktikan lagu-lagunya bisa menumbuhkan industri musik yang sebaran produknya jauh ke luar Banyuwangi. Saya tahu Wandra telah menjadi langganan masyarakat Jember yang mayoritas Madura dan Jawa. Tetangga saya di Jember, baik yang Madura maupun Jawa, ternyata tidak asing dengan

Wandra dan lagu-lagunya. Saya juga sering melihat gambar Wandra terpampang di baliho besar di Malang. Sudah pasti akan pentas di depan masyarakat yang bukan penutur bahasa Osing. Kok bisa? Sama, kok bisa lagu-lagu pop-Korea (berbahasa Korea) disukai masyarakat Indonesia akhir-akhir ini? Wandra lagi menasional. Tentu dalam tarikan industri, pasar.

Saya sungguh apresiatif. Musik pop-Osing telah melekat pada sosok Wandra. Tanpa harus ke Jakarta pun, Wandra telah menjadi artis muda terkenal. Dan hari ini Wandra adalah ikon. Buat Banyuwangi di mata anak-anak *zaman now*. Kalau boleh berharap, Wandra harus tambah top bersama budaya Osing. Meski dalam tarikan pasar yang sering pragmatis, jangan pernah tinggalkan Osing. Saya yakin budaya Osing tak akan pernah kering menginspirasi. **(15 Maret 2018)**

Puti, Wandra dan Pop-O

A inur Rofik Wandra Restusiyani, yang populer disapa Wandra, ternyata menarik perhatian Puti Guntur Soekarno, cucu Bung Karno. Siang itu (26 Maret 2018) Puti hadir di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi sebagai nara sumber kuliah umum bertajuk “Generasi Milenial Menatap Negeri: Belajar Tri Sakti Dari Cucu Bung Karno”. Dan Wandra, bintang muda Banyuwangi yang lagi menasional, tampil mengisi acara. Mahasiswa Untag Banyuwangi itu melantunkan lagu Kelangan. Sebelum Puti naik mimbar.

Barangkali karena darah seni yang mengalir di tubuh cucu Bung Karno itu – konon terampil main piano, menari dan melukis – Puti bisa segera menikmati suara merdu Wandra. Tiba-tiba Puti berbisik kepada saya, “Itu bahasa Osing ya?” “Ya Bu,” jawab saya sambil sedikit menjelaskan profil Wandra sebagai anak muda Banyuwangi yang berhasil menumbuhkan industri musik populer Osing. Supaya terdengar keren sebut saja “Pop-O”.

Gemuruh tepuk tangan 600-an peserta kuliah umum mengakhiri penampilan Wandra. Puti yang duduk di samping saya tiba-tiba berdiri. Menghampiri Wandra dan menyalaminya. Lalu meluncurlah pernyataan apresiatif dari cucu Bung Karno

itu saat menyampaikan materi kuliahnya.

Kalau sekadar pujian atas suara Wandra yang merdu, saya tidak heran. Saya tidak perlu menulis catatan ini. Tapi lebih dari itu. Puti melihat Wandra bukan sekadar seniman muda bertalenta dari daerah. Yang menarik, Puti melihat kiprah berkesenian Wandra dalam kerangka tri sakti Bung Karno yang menjadi tema kuliah umum.

Wandra dinilai berhasil menjadi entrepreneur. Bukan sekadar seniman. Membangun kemandirian ekonomi melalui industri kreatif seni musik berbasis teknologi informasi masa kini. Seperti YouTube dan media sosial lain, yang memang tak terpisahkan dari kehidupan generasi milenial. Wandra disebutnya ikon generasi milenial.

Saya sependapat. Di catatan berjudul *Wandra* (15 Maret 2018) saya menyatakan bahwa pilihan Wandra bermusik pop dengan lirik bahasa Osing adalah pilihan berani yang cerdas dan visioner. Dari sudut industrialisasi musik. Dan terbukti. Wandra berhasil menumbuhkan industri musik Pop-O yang sebaran produknya jauh ke luar Banyuwangi. Bahkan ke negeri manca. Di YouTube video lagu *Kelangan* ditonton 5,5 juta kali. Dan mempopulerkan nama Wandra. Meskipun masih jauh di bawah bintang-bintang Korea yang videonya di YouTube ditonton puluhan juta kali. Bahkan ada yang tembus 100 juta lebih.

Jujur, apresiasi Puti terhadap Wandra itu melambungkan khayalan saya. Ketenaran bintang-bintang Korea di belahan bumi ini melalui industri musik populernya yang disebut Korean Pop (K-Pop) bukan mustahil terjadi pula pada Pop-O. Wandra atau “Wandra-Wandra” yang lain bukan mustahil akan tenar di negeri manca bersama Pop-O.

Hal ini tentu membutuhkan usaha keras dan sinergisme yang kuat dari berbagai pihak. Jangan bayangkan K-Pop dapat sehebat itu tanpa peranserta pemerintah Korea. Maka

pemerintah kita haruslah hadir memimpin usaha keras dan sinergisme tersebut. Mustahil Pop-O tumbuh mengglobal tanpa kehadiran pemerintah.

Yang menarik lagi di mata Puti adalah liriknya menggunakan bahasa Osing. Wandra dilihatnya sebagai generasi milenial yang peduli pada budaya daerahnya. Hal ini menarik. Mengapa? Dewasa ini banyak kalangan pesimis terhadap keberagaman budaya daerah, termasuk bahasa daerah, di tengah arus globalisasi akhir-akhir ini. Banyak bahasa daerah mulai ditinggalkan penuturnya. Bahasa daerah itu lalu mati. Pakar bahasa pun mencatat bahwa fungsi bahasa daerah tinggal di ranah keluarga.

Karena itu keberanian dan keberhasilan Wandra menumbuhkembangkan industri Pop-O membuka harapan baru. Ada ruang untuk konten lokal, untuk transformasi lokalitas. Dan Wandra berhasil. Pop-O lalu melambungkan namanya. Dan Puti pun mengapresiasinya dalam konteks “sakti ketiga” yakni kepribadian dalam budaya.

Ini bagi saya menarik. Mestinya juga menarik bagi pemerintah, terutama Banyuwangi. Sisi ekonomi dapat, sisi budaya juga kena. Industri Pop-O adalah keniscayaan bagi pengembangan industri kreatif, khususnya buat Banyuwangi yang lagi getol-getolnya membangun industri wisata. Habitusnya pun mendukung.

Maka antara industri Pop-O dan wisata Banyuwangi perlu bersinergi. Suatu hari kelak orang-orang manca ke Banyuwangi dan menikmati produk-produk Banyuwangi harus pula berkat ketenaran bintang-bintang Pop-O. Demikian pula sebaliknya. Kehadiran orang-orang manca di Banyuwangi akan semakin mengokohkan kepopuleran Pop-O.

Saya yakin budaya Osing tak akan pernah kering menginspirasi. Tak akan habis dieksplorasi. Justru menantang

proses kreatif, khususnya buat industri Pop-O. Karakter bunyi alat musik dan cengkok lagu-lagu tradisi Osing yang melengking-meliuk menantang “dihybridkan”. Hibridisasi adalah cara cerdas memperkuat transformasi lokalitas dalam industri Pop-O.

Bukan itu saja. Catatan Tallapessy dkk., (2017) menarik dipertimbangkan. Menurutnya, akan makin elok bila transformasi lokalitas itu tidak cuma dipenuhi romantisme, meloisme, bahkan kegenitan seksual. Lagu-lagu Banyuwangian pascareformasi dinilai belum beranjak dari tema tersebut. Padahal Banyuwangi menyediakan lanskap yang beragam. Alam, sejarah, dan perikehidupan sosial di Banyuwangi membutuhkan tatapan cerdas dan kritis.

Maka transformasi lokalitas dalam konteks industri Pop-O harus bisa dimaknai siasat penguatan dan pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal. Ini tantangan Wandra dan “Wandra-Wandra” lain dalam proses kreatif. Bila ada sinergi kuat dengan pemerintah dan kalangan lain yang berkompeten, niscaya Pop-O bukan khayalan belaka. Apresiasi Puti Guntur Soekarno terhadap Wandra setidaknya menambah optimisme anak-anak muda kreatif, baik di Banyuwangi maupun luar Banyuwangi. Terkhusus Wandra. Karena itu sambil mengucapkan selamat kepada Wandra setelah dinyatakan lulus ujian skripsi dan sedikit *gesah* tentang proses kreatifnya di Rektorat Untag Jumat lalu saya sempatkan berbisik, “Majulah Pop-O...!” **(9 April 2018)**

Politik Gizi

Jatuh terhimpit tangga. Peribahasa ini sangat cocok buat Pak Tua yang sebangku dengan saya di Probowangi – kereta api ekonomi jurusan Surabaya-Banyuwangi – tempo hari. Saya naik dari Jember. Pak Tua dari Surabaya. Raut mukanya kusut. Tampak letih. Seperti menanggung penderitaan yang tak berujung.

Kulitnya pun legam akibat sengatan matahari. Pak Tua hanya seorang buruh serabutan di Kota Pahlawan. Ia mengawali ceritanya dengan kalimat terputus-putus. Matanya berkaca-kaca. Hari itu adalah hari ketuju cucu pertamanya dipanggil Tuhan pada usia dua tahun. Baru di hari ketujuh lah Pak Tua punya ongkos untuk mengunjungi keluarga anaknya, yang juga buruh serabutan, di Pulau Dewata. “*Putu kula niku sakit-sakiten* (cucu saya itu sering sakit),” terang Pak Tua sambil menunjukkan foto cucunya saat berusia satu tahun.

Saya terdiam. Tak kuasa berkata-kata. Saya perhatikan foto cucu Pak Tua. Sebuah foto balita malagizi. Balita tumbuh tak normal, tampak lemah, dan sering sakit. Karena kekurangan nutrisi.

Cucu Pak Tua ternyata tidak sendirian. Di Indonesia angka balita malagizi masih cukup tinggi. Menurut badan dunia yang

mengurusi soal anak-anak, Unicef, masih ada 27 kematian balita per 1.000 kelahiran pada tahun 2015. Angka ini sudah menurun tajam. Dua dasawarsa sebelumnya masih 84 kematian per 1.000 kelahiran.

Angka tersebut adalah angka balita yang tak lagi menjumpai hari ulang tahunnya. Belum yang terus berulang tahun, tapi tumbuh tak optimal akibat malagizi. Entah jumlahnya.

Memilukan. Kasus kematian balita dan pertumbuhan tak normal akibat malagizi berhimpitan dengan kasus ibu bunuh diri bersama anak-anaknya. Di negeri Pancasila ini ternyata kita masih sering mendengarnya. Bukan karena ibu dan anak-anaknya tak mencintai kehidupan. Sebaliknya kehidupan lah yang tak kunjung memeluknya. Ujungnya adalah kematian (pembunuhan), baik langsung maupun tak langsung. Bukan personal. Tapi generasi bangsa.

Fenomena cucu Pak Tua adalah urusan politik gizi. Distribusi konsumsi (pangan) yang tak berkeadilan. Kemiskinan, seperti temuan Unicef, memang menjadi faktor utama. Kemiskinan tak bisa mewariskan apa-apa. Kecuali DNA miskin. Cucu Pak Tua mewarisi DNA miskin leluhurnya.

Namun, lebih dari itu, saya mencatat hal “menarik” dari sejumlah komunitas miskin. Politik gizi yang tak berkeadilan itu berganda karena faktor kultural masyarakat pada umumnya. Politik gizi lalu berdimensi struktural-kultural bagi kalangan miskin, yang korbannya ibu dan anak.

Saya mencatat pola “bapaksentris”. Meski tidak absolut. Bapak diberi otoritas dan penghormatan besar. Ibu dan anak wajib patuh dan menghormati kepada sang bapak. Bapak adalah kelas tersendiri dalam keluarga. Berhadapan dengan kelas lain dari ibu dan anak-anaknya.

Pola “bapaksentris” adalah warisan model pembagian kerja masyarakat agraris tradisional yang bias gender. Laki-

laki bekerja di luar rumah. Perempuan di dalam rumah. Pekerjaan mengolah tanah pertanian sebagai pencaharian keluarga dianggap pekerjaan berat. Hanya cocok buat laki-laki. Sebaliknya, pekerjaan mengurus rumah dan anak-anak dinilai hanya cocok untuk perempuan.

Sejak kecil seseorang sudah ditradisikan dengan pola seperti itu. Anak laki-laki sejak kecil sudah terbiasa mengikuti sang bapak ke ladang. Begitu pula anak perempuan. Sejak kecil sudah dilatih mengurus pekerjaan dapur dan urusan domestik rumah tangga.

Mengingat pekerjaan laki-laki berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia, pekerjaan itu diberi apresiasi lebih tinggi daripada pekerjaan perempuan yang hanya di dalam rumah. Apresiasi demikian lalu menempatkan bapak pada posisi “pusat” (atasan). Yang lain pada posisi “pinggir” (bawahan). Relasi di antara dua posisi itu ternyata tak seimbang dalam banyak hal. Antara lain, tampak dari mekanisme penghormatan formal dan pola distribusi konsumsi.

Penghormatan berlangsung hierarkis. Bapak menempati puncak hierarki. Penghormatan adalah pengakuan terhadap status yang lebih tinggi yang ditunjukkan melalui tata krama. Istri (ibu) memberikan penghormatan formal kepada sang suami (bapak). Begitu pula anak-anak kepada sang bapak. Bapak selalu mendapatkan *sungkem* dan dimintai restu oleh istri (ibu) dan anak-anak. Restu dipandang mengalir dari status tinggi kepada status rendah. Dalam laku budaya Jawa, baik ibu maupun anak-anak, dianjurkan menggunakan bahasa *krama* kepada bapak sebagai tanda hormat. Bapak boleh *ngoko*.

Distribusi konsumsi pun mengutamakan bapak. Hildred Geertz dalam buku *Keluarga Jawa* mencatat bahwa masyarakat kita (Jawa) tidak membiasakan anggota keluarga makan bersama. Baik tempat maupun waktunya. Bapak sering

makan dulu secara sendirian. Ibu dan anak menunggu sampai bapak selesai bersantap. Baru lah mereka boleh mendapatkan bagiannya sendiri. Kalau tidak begitu, bapak diambilkan terlebih dahulu. Disendirikan untuk dimakan secara sendiri.

Struktur-kultur tersebut meminggirkan ibu. Ketika ibu terpinggirkan, anak pun akan terpinggirkan. Anak akan kehilangan banyak hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Ibu-anak keluarga miskin bagaikan jatuh terhimpit tangga. Anak makin jauh dari pemenuhan kebutuhan gizi yang layak. Sejak di kandungan sang ibu. Bahkan kalah dengan rokok sang bapak.

Saya sering menjumpai keluarga miskin setiap hari selalu sedia rokok buat sang bapak. Tapi pangan bergizi sangat terbatas. Banyak anak keluarga miskin putus sekolah. Bukan soal biaya saja. Tapi pertumbuhan otak tak mendukung. Sebuah kekerasan terselubung dalam rumah tangga. Dampaknya lebih mengerikan daripada kekerasan kasat mata. Anak kehilangan masa depan. Secara terstruktur dan sistematis.

Saya iseng bertanya kepada Pak Tua, apakah pernah ke Posyandu? Jawabannya sama dengan pengalaman saya. Pak Tua geleng kepala. Posyandu – Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu yang merepresentasikan kerja sama antara negara dan masyarakat – pun ternyata hanya ramai suara ibu-ibu dan anak-anak. Tak memanggil bapak. Politik gizi bias gender. **(28 Februari 2018)**

Pahlawan Zaman Now

Kereta api yang saya tumpangi dari Jember menuju Banyuwangi menderu-deru menaklukkan lereng-lereng Gunung Gumitir. Indah sekali dan menaktubkan panorama alam di sekelilingnya. Gunung Gumitir bagaikan dibalut kebun kopi. Kereta api yang jadi langganan saya itu seperti hendak menegaskan kehebatan masa lalu, kedigdayaan *zaman old*, zaman yang penuh hero, zaman yang penuh penaklukan-penaklukan.

Kereta api itu terus menderu menembus lorong gelap sepanjang 690 meter. Inilah terowongan terpanjang di Indonesia, Terowongan Mrawan. Terowongan itu menembus sisi utara Gunung Gumitir. Konon terowongan mulai dibangun oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1901, dan baru selesai tahun 1910. Berarti sudah satu abad lebih usia Terowongan Mrawan, jauh melampaui usia Bangsa-Negara Indonesia.

Coba Anda (pembaca yang budiman) bayangkan! Banyuwangi hari ini (2017) seperti ini, kira-kira tahun 1901 masih seperti apa? Tapi nyatanya sudah dimulai pembuatan terowongan yang menembus Gunung Gumitir. Tentu ini proyek raksasa pada zamannya. Proyek yang hanya bisa dikerjakan oleh ambisi besar, kepentingan besar, dan kekuasaan besar. Jika

dinding terowongan itu bisa bicara, saya yakin dinding itu akan bisa menyebutkan satu per satu orang-orang yang meregang nyawa di sana. Saya yakin tidak sedikit nama-nama yang layak disebut pahlawan.

Rel kereta api lalu digelar menyusuri lereng-lereng Gumitir. Gunung Gumitir dan bumi Blambangan ditaklukkan. Bukan hanya alam, bumi dan hasilnya, tapi juga manusia sekelilingnya, tata dunia dan cara pandangnya. Kereta api – kereta tanpa kuda, tanpa sapi, tanpa kerbau, sebuah kereta yang dihidupi api – menderu-deru di atas rel yang membelah daerah persawahan dan perkebunan yang hijau dan sunyi. Mula-mula kereta api itu hanya mengangkut barang hasil perkebunan, tetapi kemudian mengangkut orang menuju kota-kota penting di Jawa. Orang-orang yang naik kereta api itu memandangi pedusunan mereka yang tenang dan sakral dari jendela kereta, dari suatu dunia lain, dan lalu lenyap ditinggalkannya. Zaman bergerak, zaman modal, sebuah zaman ketika modal dan kebudayaan Eropa dengan segenap sisi baik-buruknya menyerbu pelosok negeri non-Eropa.

Di abad ke-19 dan ke-20 itu dunia memang disugahi temuan-temuan besar, hal-hal luar biasa dan menakjubkan. Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berawal di Eropa itu barangkali menemukan klimak dan antiklimaknya pada abad ke-19/ke-20. Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula dibayangkan sebagai instrumen humanisasi tapi abad itu membuktikan sisi kelamnya. Dehumanisasi justru terjadi dalam skala global dan massif. Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi telah beranak pinak melahirkan penjajahan di muka bumi ini. Kerakusan dan ketamakan manusia tidak cuma dalam skala personal tapi bangsa. Bangsa satu memangsa bangsa lain, perang antarbangsa, perang dunia.

Nah, di sanalah awal pahlawan dan kepahlawanan

dikonstruksikan. Pahlawan dan kepahlawanan selalu dikaitkan dengan kegagahan, keberanian, keperkasaan, kekesatriaian, kerelaan berkorban, yang semuanya mengandaikan peperangan, permusuhan, perbedaan, perlawanan, dan tentu korban. Sejarah kepahlawanan selalu identik dengan sejarah peperangan, kekerasan, darah dan air mata.

Hari ini, *zaman now*, kita berhadapan dengan karakter ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda. Apa yang semula dinilai sebagai kehebatan masa lalu, kedigdayaan *zaman old*, zaman yang penuh penaklukan, justru sering dinilai sebaliknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir juga telah menghasilkan kritik-reflektif atas kedigdayaan, kehebatan yang penuh penaklukan itu.

Dulu, *zaman old*, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berelasi dengan organisasi besar, birokrasi, dan bersifat terbatas. Perang dan bencana sosial lain, termasuk korupsi, lalu dianggap anak kandung karakter ilmu pengetahuan dan teknologi *zaman old* yang birokratis, bahkan militeristik. Kini, *zaman now*, ilmu pengetahuan dan teknologi telah bersifat personal, tak terbatas. Dunia seisinya kini dapat dibawa ke mana-mana dengan mudah, dapat diintip dan disaksikan dengan gampang dan murah. Dunia dalam genggam anak-anak sekarang. Kini pahlawan dan kepahlawanan pun tidak lagi mengandaikan peperangan, permusuhan, perbedaan, perlawanan, dan korban.

Karakter ilmu pengetahuan dan teknologi *zaman now* adalah perakitan, berjejaring dan kerjasama. Sifat jejaring dan kerjasama itu kecil-kecil tapi luas, saling mendukung dan menguatkan, bukan menaklukkan. Karakter tersebut juga akan menghasilkan dunia sosial yang saling berketergantungan satu sama lain. Maka kegagahan, keberanian, keperkasaan, kekesatriaian, yang selama ini menjadi elemen pahlawan dan kepahlawanan akan digantikan pula dengan kelembutan,

keempatian, kepekaan, kesigapan, kesukacitaan.

Anak-anak muda sekarang, *kids zaman now*, adalah orang-orang yang akan memburu kerja-kerja kreatif berjejaring, profesi-profesi dengan penuh integritas dan suka cita bersama rekan-rekannya dari segala penjuru dunia. Mereka tidak perlu perang, tidak perlu ada penaklukan untuk menjadi pahlawan, cukup mewujudkan mimpi kreatifnya bersama koleganya di pelosok dunia. Mereka akan dengan mudah berkomunikasi dan membangun solidaritas bersama teman-temannya di seantero dunia. Mereka menggenggam dunia. Anak-anak *zaman now* adalah anak-anak merdeka. Pahlawan *zaman now* adalah aktualisasi jiwa/mental merdeka secara cukacita. **(10 November 2017)**

Nama Saya Kartini

Pandanwangi pagi itu mempertemukan saya dengan Kartini. Pandanwangi adalah kereta api kelas ekonomi ber-AC Jember-Banyuwangi. Harga tiketnya cuma Rp. 8.000,-. Sangat murah. “Nama saya Kartini, Pak,” ucap perempuan seumuran saya yang duduk di samping saya. “Taping sing nganggo RA,” candanya sambil tersenyum. Maksudnya, namanya Kartini saja. Tidak pakai Raden Ajeng (R.A.). Dandanannya sederhana. Dari logat bicaranya bisa dipastikan orang Banyuwangi. Mengaku pedagang sayur keliling. Pernah pula mengais rezeki di negeri tetangga.

Kartini bercerita dengan penuh semangat. Raut mukanya tampak ceria. Matanya berbinar-binar. Pagi itu Kartini tampak bahagia sekali. Betapa tidak! Anak perempuan semata wayangnya baru saja lulus ujian skripsi di sebuah universitas negeri di Jember. Dua hari Kartini menunggui sang anak belajar.

Menurut Kartini, menyemangati sang anak adalah kewajiban orang tua. Kartini memilih pergi ke Jember agar bisa berada di sampingnya. Meski harus meninggalkan pekerjaannya. Meski semangat itu bisa pula diberikan lewat ponsel. Kartini merasa setiap hari sudah bekerja keras. Nyaris tak pernah istirahat. Toh tak membuatnya kaya. Maka Kartini menilai lebih berharga

menunggu sang anak yang sedang berjuang meraih masa depan. Siapa tahu waktu dua hari adalah emas buat sang anak. Dan tentu juga buat sang ibu.

Mungkin orang tua Kartini dulu berharap putrinya mewarisi semangat R.A. Kartini. Yang pasti Kartini tahu namanya sama dengan tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Dan dia memang meneladaninya. Kartini meyakini hanya jalan pendidikan yang bisa mengubah sejarah hidup keluarganya. Rantai kemiskinan yang diwarisi dari orang tuanya hanya bisa dipotong dengan pendidikan. Tak ada jalan lain. Bagi orang miskin semacam dirinya, pendidikanlah yang memberikan harapan. Pendidikan bukan sekadar memberi kecakapan, tapi membuka cakrawala. Pendidikan juga memperluas perkawanan. Membuka luas ruang mobilisasi sosial.

Karena itu Kartini tak mau anak semata wayangnya putus sekolah seperti dirinya. Dia harus bekerja keras. Terutama sejak suaminya dipanggil Tuhan. Dia juga tak pernah bosan meyakinkan putrinya. Raih pendidikan setinggi-tingginya. “Masa depanmu adalah pendidikanmu,” kira-kira begitu dalilnya. Habis gelap terbitlah terang. Gelap adalah masa lalu. Terang adalah masa depan. Dan masa depan itu harus diperjuangkan. Diraih. Bukan diminta. Apalagi ditunggu. Meski perempuan tak akan keluar dari kodrat melahirkan keturunan.

Saya tercengang mendengar *gesah*-nya. Kartini bukan cuma mengajarkan pengetahuan, tapi sikap hidup. Bukankah pengetahuan sejati adalah yang bisa menuntun sikap hidup? Saya lalu teringat buku Pramoedya Ananta Toer, *Panggil Aku Kartini Saja*. Di mata Pram, R.A. Kartini bukan sekadar pejuang emansipasi perempuan. Melainkan juga pemikir modern Indonesia pertama. Seorang ningrat yang melawan feodalisme keningratannya.

R.A. Kartini mengawali perjuangannya dengan “membaca dan menulis”. Perpustakaan adalah teman setianya di tengah kesunyian budaya pingitan. Kata kuncinya sama dengan yang diyakini Kartini yang saya temukan di Pandanwangi. Yakni pendidikan.

Di mata R.A. Kartini, masyarakat jajahan bagaikan rimba yang gelap gulita. Haruslah diberikan obor. Dan obor itu adalah pengetahuan atau intelektualitas Eropa yang pada zamannya diwakili Belanda. Dengan intelektualitas Eropa itu masyarakat jajahan yang gelap gulita akan menjadi padang luas yang terang benderang. Habis gelap terbitlah terang.

Tapi feodalisme telah mencampakkannya. Feodalisme mendeskriminasi warga jajahan untuk mendapatkan pendidikan. Baik karena jenis kelamin maupun status sosial. Dan R.A. Kartini menggugatnya. Seperti ditulis Pram, “Panggil aku Kartini saja.”

Kini perjuangan R.A. Kartini sudah berbuah. Anak perempuan seorang pedagang sayur keliling bisa menjadi sarjana. Pendidikan tidak lagi mendeskriminasi kaum perempuan. Banyak perempuan telah menempati posisi sosial terhormat. Sejumlah menteri, bupati/wali kota, gubernur, anggota parlemen, dirut, rektor, ilmuwan, dan jabatan bergengsi lain diduduki perempuan. Bahkan Indonesia pernah dipimpin presiden perempuan.

Tapi soal feodalisme? Makhluk yang dilawan R.A. Kartini itu punya daya hidup luar biasa. Punya kemampuan mimikri. Feodalisme berada pada dimensi “jiwa” yang tidak sertamerta mati oleh pendidikan. Feodalisme mampu menyelinap dan berganti baju modern, “neofeodalisme”. Karena situasi dan lingkungan modern.

Dulu R.A. Kartini minta dipanggil Kartini saja. Kini justru banyak orang memburu gelar “R.A” dalam bentuk modern seperti “doktor/magister”. Gelar akademik tidak ditempatkan sesuai substansinya. Tapi status sosial. Banyak orang memburu gelarnya saja. Bukan mencari substansi yang ditandai gelar itu. Banyak gelar abal-abal. Dari pemberi gelar abal-abal.

Neofeodalisme makin banal tatkala bersimbiosis mutualisme dengan ideologi patriarki dan neoliberalisme-kapitalisme. Itulah yang terjadi kini. Tatkala tanda/symbol/penampilan/citra menjadi komoditas. Tatkala gaya hidup, estetika, seni-budaya diindustrialisasikan. Lihatlah, betapa tubuh perempuan kini menjadi dagangan yang laku keras. Dieksploitasi habis-habisan untuk kepentingan industri. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kuku kaki. Perempuan yang tidak mengonsumsinya akan kehilangan kepercayaan diri. Merasa tidak “pede”, tidak “gaul”.

Coba simak, adakah iklan kecantikan di Indonesia yang tidak berasosiasi dengan “putih”? Bukankah kulit orang Indonesia pada umumnya berwarna? Lalu industri akan bilang, “Jangan khawatir, kami punya solusinya.” Banyak perempuan pusing oleh tubuh sendiri karena standar kecantikan yang dikonstruksikan industri.

Industri musik, termasuk di Banyuwangi, juga tergoda mengeksploitasi tubuh perempuan. Bahkan dengan diksi yang vulgar. Beberapa di antaranya *Wanita Lubang Buaya*, *Jupe Paling Suka 69*, *Sate Wedhus*, *Bokong Semok*. Lagu-lagu tersebut menempatkan perempuan semata-mata objek seksualitas laki-laki. Dan laris manis.

Mungkin tak pernah terbayangkan oleh R.A. Kartini. Rumah pingitan itu kini berbentuk limas segi tiga: neofeodalisme-patriarki-neoliberalisme. Habis gelap terbitlah terang, tapi terang tersebut kini juga bermakna ketelanjangan tubuh perempuan. Buat dieksploitasi. Baik pada aras simbolis maupun

realistis. Demi pelipatgandaan kapital. Dan Kartini yang saya temukan di Pandanwangi pun tak pernah menyangkanya. **(23 April 2018)**

Korupsi, Sirosis Kolektif

*Bila karena najis, babi kalian musuhi
Mengapa kalian abaikan korupsi
Yang lebih menjijikkan
Ketimbang kotoran seribu babi*

Mengawali catatan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember, saya potongkan puisi Gus Mus (KH. Mustofa Bisri) yang berjudul “Ada Apa Dengan Kalian”. Gus Mus sedih, prihatin, dan menggugat. Mengapa korupsi makin tak terbantahkan justru saat makin banyak orang berkhotbah tentang kealiman-keimanan? Mengapa korupsi makin merajalela justru ketika makin banyak orang mendirikan tempat ibadah? Makin lantang orang menyerang nikotin, alkohol, minyak babi, tapi abai terhadap korupsi. Korupsi, yang oleh Gus Mus dianggap lebih menjijikkan ketimbang kotoran seribu babi itu terkesan didiamkan, bahkan diharapkan.

Korupsi memang makin canggih. Terus mengintip dan menyergap siapa saja. Tak peduli orang sedang berdoa. Tak peduli mereka adalah orang-orang yang rajin pidato, khotbah, ceramah tentang akhlak mulia, tentang warga negara yang baik. Tak peduli jabatannya apa.

Bagaikan seks, korupsi terus menggodanya, merayap, menggerayangi tubuh manusia, siapa saja, dan lalu meruntuhkan daya tahannya. Pengetahuan, baik yang bersumber dari agama, filsafat, maupun teori-teori sosial dan kemanusiaan, tak kuasa menghentikan kaki tangan manusia yang disergap godaan korupsi. Dulu saya pernah meyakini bahwa korupsi pasti lebih didorong oleh faktor ekonomi, dan bersifat perseorangan. Ternyata tidak. Para koruptor yang sudah dibui ternyata banyak yang bukan dari golongan ekonomi lemah. Mereka adalah orang-orang berpunya. Berpendapatan jauh di atas rata-rata.

Ternyata mereka juga tidak bertindak sendirian. Mereka berkawan, berjejaring, dan terkait pula dengan lembaga-lembaga. Korupsi tampaknya telah menyerupai kanker hati. Bukan personal tapi kolektif, sirosis kolektif.

Yang membuat kita terkesima dan makin prihatin bukan cuma pelakunya, tapi modus, cara, dan teknologinya. Seiring perkembangan zaman yang terus bergerak mengikuti genderang neoliberalisme, korupsi pun tidak ketinggalan zaman. Zaman makin maju, korupsi pun makin maju. Teknologi kehidupan makin canggih, korupsi memakai teknologi yang makin canggih pula. Yang dicuri dan diselewengkan bukan sekadar uang recehan, atau korupsi skala kecil-kecilan, atau korupsi biasa, tapi “mega korupsi” yang dilakukan dengan cara menyandera lembaga-lembaga negara. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, maupun lembaga kemasyarakatan lain.

Korupsi jenis ini sangat berbahaya, tidak kasat mata, dan dengan teknologi yang super canggih. Kalau cara pandang kita tentang korupsi masih jadul (jaman dulu), tak akan bisa mendeteksi aroma korupsi yang menyandera negara itu. Korupsi jenis ini telah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu sehingga kita abai bahwa di sana ada upaya mengeruk kekayaan negara. Korupsi jenis ini dilegitimasi

melalui ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Kesadaran kritis masyarakat pun sering terkecoh olehnya.

Korupsi jenis ini mengejawantah dalam bentuk pembelian dekrit politik, peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, dan kontrak karya oleh kaum kapitalis (korporasi) di bidang pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan, perbankan, perdagangan dan bidang-bidang lain demi pelipatgandaan modal kaum kapitalis tersebut. Negara diperalat atas nama kepentingan rakyat dan hal-hal populis lain.

Yang menarik (untuk membuktikan kesupercanggihan korupsi yang menyandera negara) adalah penggunaan teknologi rekayasa bahasa. Tepatnya bahasa kebijakan/peraturan. Mari kita simak.

Banyak bahasa kebijakan/peraturan yang membentuk kesan lembut, merakyat, dan berkeadilan sosial. Tapi, bahasa kebijakan/peraturan tersebut potensial menyembunyikan niat korupsi. Saya mencatat beragam program dan aktivitas turunan kebijakan yang dikreasi dengan kata kunci seperti *rehabilitasi, revitalisasi, percepatan, penguatan, penyesuaian, bantuan, hibah*, dan sebagainya.

Kebijakan/peraturan dengan kata-kata kunci tersebut terdengar indah, bermatra kerakyatan, dan berkeadilan sosial. Kebijakan tersebut sesuai amanat UUD. Itulah kira-kira dalilnya. Tapi, kenyataannya banyak program kegiatan turunan kebijakan dengan kata-kata kunci yang indah itu justru menjadi bancaan. Sudah cukup banyak anggota DPR/DPRD, bupati, gubernur, dirjen, menteri, dan warga masyarakat lain masuk penjara gara-gara kebijakan bantuan, hibah, penyesuaian, dan sejenisnya. Sekadar contoh, kebijakan “Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah” telah menelan kurban seorang anggota DPR, Wa Ode Nurhayati, dan seorang pemimpin sebuah ormas, Fahd El Fouz.

Tentu korupsi semacam itu bukan pekerjaan sembarangan. Tidak mungkin dilakukan oleh kalangan awam. Rekayasa bahasa kebijakan/peraturan hanya bisa dilakukan oleh kaum elite. Bisa dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, kaum cerdik pandai dari kampus, pemodal, dan elite lain yang berkepentingan. Mereka kolaborasi untuk satu tujuan: menggarong kekayaan negara secara legal. Maka berhati-hatilah. Banyak niat busuk sembunyi di balik kata legal.

Barangkali hanya alam (kosmos) yang mampu menyelamatkan kita dari sirosis kolektif yang sudah bertahun-tahun menggerogoti tubuh kita. Di alam banyak mata menyaksikan. Ada matahari, bulan, bintang-bintang, mata Anda, juga mata-mata. Alam mengajarkan keadilan. Alam juga mengajarkan keselarasan, keberimbangan.

Alam identik dengan kepastian, kepatuhan, keteraturan hukum. Kita menyebut hukum alam, hukum Ilahiah. Alam juga identik dengan keterbukaan, keterangbenderangan, lugas. Korupsi, seperti halnya seks, menyukai ketertutupan, keremang-remangan, bisik-bisik. Korupsi juga menyenangi ketidakpastian, ketidakpatuhan, ketidakteraturan hukum. Korupsi hidup subur dalam situasi seperti itu.

Maka bawalah ke alam. Di alam Anda akan selamat dari godaan korupsi. Bikinlah terbuka, terang benderang agar banyak mata bisa menyaksikan dan Anda tidak digerayangi tangan-tangan korupsi. Hindarilah bisik-bisik agar Anda bebas dari bujuk rayu korupsi. Berat, sudah tentu. Kata Wiji Thukul, “Hanya ada satu kata: Lawan!” **(9 Desember 2018)**

Bukan Ayo Sekolah

Pernyataan Kang Gun itu tiba-tiba terdengar jelas dan kuat. Kenyamanan Mutiara Timur Siang yang membawa saya ke Banyuwangi tak mampu mengusirnya. Niat memejamkan mata sejenak gagal. Lagi-lagi pernyataan itu. Meski sudah lebih dua dasawarsa lalu saya dengar di rumah Kang Gun di Desa Baturejo, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah.

Saya mengalah. Saya ambil laptop dari dalam tas. Lalu saya tulis ucapan Kang Gun, *“Yen sing kok maksud sekolah kuwi koyo sing kok lakoni, dulur-dulur sikep kene yo ora sekolah. Ning yen sing kok maksud sekolah kuwi sejatine sinau, dulur-dulur yo sekolah.”* Pernyataan itu menjawab pertanyaan saya mengapa wong (orang) Samin, yang oleh Kang Gun disebut Sedulur Sikep, itu tidak mau sekolah.

Kalau diterjemahkan bebas kira-kira maksudnya begini. Bila yang dimaksud sekolah itu sebagaimana yang kita kenal dan jalani (sekolah formal), wong Samin memang tidak sekolah. Tapi bila yang dimaksud sekolah itu adalah belajar, wong Samin sekolah. Belajar apa? Kang Gun menjawab singkat tapi mendalam sekali, *“Sinau bab urip, kangge urip.”* Belajar tentang hal hidup, supaya hidup.

Kang Gun, nama lengkapnya Gunretno, dan komunitas

wong Samin sudah sangat dikenal. Terutama di kalangan antropolog, sejarawan, aktivis lingkungan dan pertambangan. Karena pandangan, sikap, dan kegigihannya menyelamatkan Pegunungan Kendeng dari upaya penambangan untuk industri semen.

Hidup, bagi wong Samin, sederhana sekali. Bertani. Bukan yang lain-lain. Bertani saja. Maka wong Samin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial budaya, dan nilai-nilai yang mendukung kebutuhan bertani secara berkelanjutan. Demi kesejahteraan bersama. Bukan cuma yang hidup hari ini, tapi juga keturunannya kelak. Belajar (*sinau*) bertani yang berkelanjutan. Bukan bertani ala kapitalisme. Dan belajar tersebut bukan melalui sistem sekolah formal, melainkan komunitas langsung di sawah. Sebab belajar pada hakekatnya adalah kemampuan memaknai pengalaman, lalu beradaptasi dengan perubahan. Belajar adalah kata kunci dalam strategi kebudayaan. Maka bertani yang berkelanjutan tidak butuh ijazah. Yang dibutuhkan adalah ilmu yang diperoleh dengan belajar tadi.

Masyarakat tidak jarang salah sangka. Stigma negatif sering dilekatkan pada wong Samin. Termasuk sikapnya yang tidak mau sekolah. Disebut *wong* Samin karena mereka mewarisi pandangan dan sikap perlawanan Samin Surosentiko terhadap penjajah Belanda. Tapi masyarakat cenderung menerima konstruksi penjajah Belanda yang memandangnya ‘semau sendiri, tidak taat aturan, pembangkang, dan sejenisnya’.

Kembali kepada pernyataan Kang Gun. Pernyataan itu, bagi saya, merupakan sebuah kritik kebudayaan yang tajam sekali. Sejarah persekolahan kita memang tidak lepas dari sejarah modernisasi negeri ini yang pada awalnya ditampilkan Belanda melalui praktik penjajahan. Sekolah didirikan untuk kaum bumiputra secara terbatas. Bukan demi pencerahan, tapi karena kebutuhan tenaga cakap. Birokrasi negara kolonial

butuh banyak administratur dan tenaga cakup lainnya. Jauh lebih efisien mendidik pribumi daripada mendatangkan dari negeri Belanda.

Sistem persekolahan lalu dijadikan instrumen teknokratik penting buat modernisasi. Kita mewarisi dan belum mendekonstruksi. Bahkan terjadi pendalaman tatkala pemerintah Orde Baru pada akhir dekade 1960-an memulai proyek industrialisasi. Di tangan pemerintah yang menggebu-gebu soal industrialisasi, pendidikan dirumuskan bukan sebagai strategi kebudayaan. Pendidikan bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diterjemahkan melalui sistem persekolahan untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan industri. Yang berkembang lalu budaya bersekolah. Bukan budaya belajar. Terjadi kerancuan antara bersekolah dan belajar, antara ijazah dan kompetensi. Maka Kang Gun yang tidak sekolah tapi belajar dianggap aneh.

Kang Gun juga pernah bercerita bagaimana wong Samin menolak bertani model Revolusi Hijau yang dipaksakan pemerintah Orde Baru. Dan ternyata kini cara bertani model Revolusi Hijau ditengarai sebagai sumber kerusakan lingkungan persawahan. Dunia lalu menganjurkan bertani secara berkelanjutan. Bukankah Revolusi Hijau itu produk sekolah formal? Sekolah ternyata tidak berada pada ruang hampa. Sekolah tidak bebas nilai, kepentingan dan kekuasaan.

Mutiara Timur Siang sudah tiba di Kalistail. Berarti 30 menit lagi saya harus turun. Tapi pernyataan Kang Gun masih juga terngiang. Makin kuat, justru tatkala saya minta bantuan Google sekadar untuk memastikan penulisan nama Samin Surosentiko. *Google* pun tahu nama aslinya yakni Raden Kohar. Lahir pada 1859 di Kediren, Randublatung, Blora, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Surowijaya.

Itu baru *Google*. Belum jenis aplikasi lain. Mungkin sekarang

sudah ribuan. Muncullah sebutan Revolusi Teknologi/Industri 4.0. Dunia diserang disrupsi. Lembaga lama berguguran. Harus berubah. Plaza/pusat perbelanjaan sepi. Tapi orang belanja jalan terus. Kantor bank sepi. Tapi transaksi perbankan ramai terus. Rumah makan sepi. Tapi pesan antar antri.

Sekolah/kampus juga akan sepi. Karena semua sistem pelayanan di-*online*-kan. Serba digitalisasi. Guru pun digantikan mesin aplikasi. Ada buku digital. Ada guru digital. Dan siswa gampang mengaksesnya. Di mana pun, kapan pun. Tak ada kemarahan dan kekerasan.

Sekolah/kampus sepi, bisa pula karena sudah tidak dibutuhkan. Anda mau apa? Belajar bahasa Inggris, matematika, akuntansi, dan sebagainya? Mau bisa bikin film? Main piano? Bercocok tanam? Berternak? Dulu Anda harus pergi ke sekolah yang mengajarkannya. Kini sekolah itu telah bertransformasi dalam bentuk digital secara *online*. Sebagian fungsi sekolah sudah diambil-alih teknologi *online*. Lalu muncullah komunitas-komunitas belajar *online* berdasarkan kebutuhan. Di sini tak ada kelulusan. Tak ada ijazah. Yang ada kompetensi. Dan Kang Gun berserta wong Samin sudah menjalaninya.

Tapi ada yang menggajal pikiran saya. Soal iptek memang bisa digitalisasi, lalu di-*online*-kan. Tapi soal jiwa/karakter? Bukankah pendidikan yang dipikirkan Ki Hadjar Dewantara bukan cuma berurusan dengan iptek, tapi juga jiwa/karakter? Jiwa yang merdeka.

Kang Gun mungkin tersenyum melihat saya pusing diganggu pernyataannya. Tapi catatan ini harus diakhiri. Bersamaan dengan berhentinya Mutiara Timur Siang di Karangasem. Dan untuk menenangkan diri, saya berteriak keras dalam hati, “Ayo belajar, bukan ayo sekolah!” (2 Mei 2018)

Jurnalisme Apa?

Masih ingat Afi? Nama lengkapnya Afi Nihaya Faradisa. Siswi SMA Negeri Gambiran, Banyuwangi, yang mendadak populer lewat akun Facebook miliknya. Tulisannya tentang gadget (2016), lalu soal keberagaman dengan judul Warisan (2017), viral di media sosial. Saya pun membacanya via *WhatsApp* (WA) kiriman teman di Jogjakarta.

Afi mengundang decak kagum warganet. Siswi SMA pinggiran di Banyuwangi itu lalu kerap diundang sebagai bintang tamu di sejumlah acara *talkshow* dan seminar di kampus bergengsi di tanah air ini.

Di mata saya, fenomena Afi adalah fenomena jurnalisme baru. Masa kini, *zaman now*. Dilahirkan oleh karakter teknologi informasi-komunikasi zaman now. Sebuah teknologi *post*-mesin cetak. *Post*-radio/TV konvensional. Sebutlah internet, dengan perangkat gawai (*gadget*). Sifatnya tak lagi monopoli dan dominasi. Tapi daring (dalam jaringan, *online*) dan kolaboratif. Membuka seluas-luasnya keterlibatan warga. Tak lagi butuh meja-meja redaksi, nir-struktur.

Setiap warga boleh. Siapa saja. Apapun sehari-harinya. Boleh rangkap tugas. Reporter sekaligus redaktur. Sekaligus manajer, editor, fotografer, dan seterusnya. Setiap warga diberi

kesempatan komentar. Boleh berkomentar, boleh diam. Atau sekadar kasih tanda suka, jempol. Afi hanyalah siswa SMA pinggiran, bukan profesor. Tapi mengumpulkan banyak jempol.

Dari segi konten juga tak jelas batas antara fakta dan fiksi. Tapi teknologi tersebut mampu menggabungkan kekuatan tulisan, gambar (baik foto maupun video), dan suara, dengan kecepatan, keluasan, dan ketersimpanan. Gampang direproduksi, dengan editan baru. Fakta bisa difiksikan. Fiksi pun bisa difaktakan. Apa yang oleh Baudrillard disebut “*simulacra*” makin memenuhi media, lalu otak kita. Tanda makin kehilangan referen (acuan). Kenyataan tiruan makin menggantikan kenyataan sesungguhnya.

Sosok jurnalisme baru itu sudah di depan mata. Meski masih remang-remang. Hampir stasiun TV, radio, majalah, koran, kini punya rubrik “warga” (*citizen*). Kini volumenya masih kecil. Tapi nanti boleh jadi mendominasi. Media-media itu kini juga punya versi *online*. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa menutup versi cetaknya, dan hanya menghidupi yang *online*, seperti *Sinar Harapan* dua tahun lalu. Belum lagi media *online* lain yang tumbuh bak jamur di musim hujan. Mulai dari yang serius hingga yang main-main.

Lalu jenis *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp*. Media ini tak bisa diremehkan dalam konteks jurnalisme. Orang dengan gampang menjadi penulis, fotografer, editor, kartunis melalui meme. Karya-karya jurnalistiknya tersebar ke publik dengan cepat dan murah. Ungkapan “koran adalah teman makan pagi” sudah basi. *WA/Instagram/Twitter* adalah teman setia setiap saat. Dari bangun tidur hingga tidur kembali. Di manapun, situasi apapun.

Muncullah istilah “media sosial” yang menandingi istilah “media massa”. Perannya pun mulai menggeser media massa. Mulai diperhitungkan sebagai referensi publik. Pembaca tentu

masih ingat kendaraan Setya Novanto (Setnov) menabrak tiang listrik, November 2017. Hanya selang beberapa menit publik heboh. Sejumlah meme Setnov dan tiang listrik menghiasi layar ponsel warganet. Bukan hanya lucu yang menghibur, tapi juga kritik yang konstruktif. Entah siapa seniman meme itu. Yang pasti, kehadirannya mulai menyaingi dan menggeser para kartunis koran/majalah.

Jurnalisme apakah itu? Saya melihat, meski masih remang-remang, akan lahir “isme-isme” baru. Sebutlah – yang kini mulai dikenal publik – “jurnalisme warga” (*citizen journalism*). Karena titik tekan pada subjeknya. Setiap warga bisa menjadi jurnalis. Tanpa kartu pers. Mengisi ruang yang disediakan koran, majalah, radio, televisi, media online. Hanya berbekal ponsel pintar.

Atau “jurnalisme gawai”. Karena titik tekan pada medianya. Biasanya bentuk media akan menentukan karakter isinya. Karena bentuk media yang beragam, saya menduga akan muncul genre baru karya jurnalistik khas media *zaman now*. Tugas ilmuwan komunikasi untuk menelitinya.

Sejarah jurnalisme di Indonesia sekurang-kurangnya mencatat zaman jurnalisme perjuangan dan jurnalisme industri. Keduanya adalah anak kandung teknologi komunikasi abad ke-19/20 tatkala mesin cetak mengubah tulisan menjadi produk massal. Juga radio dan televisi mengubah suara dan gambar menjadi produk massal.

Jurnalisme perjuangan menggunakan ilmu jurnalistik sebagai alat pergerakan nasional. Ben Anderson, Indonesianis dari Universitas Cornell, melihat kontribusi media massa sangat besar dalam melahirkan bangsa Indonesia. Setiap tokoh pergerakan berafiliasi pada organisasi tertentu, dan memiliki lembaga pers/media massa. Tokoh pergerakan sekaligus jurnalis. Gagasan tentang “bangsa” merupakan menu utamanya.

Jurnalisme industri tumbuh sejalan dengan modernisasi yang menguat sejak awal dekade 1970. Ilmu jurnalistik diterjemahkan dari sudut profesionalisme. Jadilah komoditas baru. Muncullah industri media dengan segenap kelembagaannya. Baik cetak maupun elektronik. Bentuk dan warna jurnalismenya pun mengikuti perkembangan modernisasi dan problematiknya.

Kini lanskap media sedang berubah. Sejarah jurnalisme pada hekekatnya adalah sejarah inovasi. Sejak ditemukan mesin cetak, penggunaan huruf besi untuk mencetak, ilustrasi surat kabar yang dibuat dari gambar pensil atau tinta. Lalu ditemukan foto, teknologi cetak offset, sistem cetak jarak jauh, surat elektronik (*e-mail*), media *online*, penggabungan foto, video, teks, dan seterusnya.

Kita harus mengenali situasi baru tersebut. Apa pun sebutan dan medianya, saya kira, perubahan yang inovatif itu haruslah punya nilai sebagai titik tolaknya. Jurnalisme telah menjadi makanan sehari-hari. Kita harus memastikan makanan yang sehat untuk pertumbuhan jasmani dan rohani. Karena itu, bila hakekat jurnalisme adalah kegiatan membuat dan menyebarkan laporan yang dapat dipercaya bagi masyarakat, jurnalisme apa pun, titik tolaknya adalah independensi, originalitas dan kredibilitas. Siapa pun pelapornya. Lewat media apa pun.

Saya bermimpi. Jurnalisme baru itu akan mencerdaskan. Mampu meningkatkan “daya baca” masyarakat. Untuk memilah dan memilih. Saya melihat ruang belajar yang luas buat masyarakat. Tapi siapa dan bagaimana memastikan (dan memelihara) laporan yang disebarkan di media *zaman now* itu dapat dipercaya? Sebuah tantangan baru, pekerjaan besar kita. Selamat memperingati Hari Pers Nasional 2018. **(8 Februari 2018)**

Out of The Box

Catatan ini saya buat dalam perjalanan ke Yogyakarta. Tanggal 28 Agustus sampai dengan 2 September 2018 saya berada di “Kota Gudheg”. Tepatnya di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Untuk suatu hajad akademik yang besar bagi perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Yakni Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-31.

PIMNAS ke-31 diikuti 440 tim dari 136 PT, baik negeri maupun swasta. Masing-masing tim antara 3 sampai 5 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing. Saya bersyukur Untag Banyuwangi ada di antara 440 tim itu. Meskipun cuma 1 tim.

PIMNAS adalah hajad akademik akbar. Prosesnya panjang. Dimulai dari proposal kegiatan yang dibuat kelompok mahasiswa, yang disebut Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Terdiri atas bidang penelitian (PKM-P), pengabdian kepada masyarakat (PKM-M), penerapan teknologi tepat guna (PKM-T), kewirausahaan (PKM-K), dan karsa cipta (PKM-KC).

Jumlah proposal yang dihasilkan oleh PT seluruh Indonesia terus bertambah. Dari tahun ke tahun. Maka tahun 2017 dibuat kuota per PT berdasarkan kinerja sebelumnya. Setelah dikuota pada 2017 masih di atas 55.000 proposal. Sementara yang

dibiayai oleh pemerintah tidak sampai 5.000 proposal. Setelah proposal yang dibiayai itu dilaksanakan (sekitar 5 bulan), dilakukan monitoring dan evaluasi. Diambil 440 tim untuk dikompetisikan di ajang PIMNAS.

Maka bagi saya tanpa menunggu siapa pemenang PIMNAS, 440 tim sejatinya adalah pemenang. Mereka adalah anak-anak muda yang telah bekerja keras mempertanggungjawabkan gagasannya sejak level proposal. Mereka adalah inovator muda yang mulai membiasakan diri menguji gagasan-gagasan dengan standar akademik ketat.

Mereka adalah anak-anak muda yang mulai belajar berpikir *out of the box*. Berpikir dan melihat sesuatu (realitas) yang tidak biasanya, yang “di luar kotak”. Karena realitas memang terkotak-kotak. Kita berada di dalam kotak. Kotak keluarga, pertemanan, suku, agama, organisasi, ideologi. Bahkan sekadar kotak kesenangan, selera.

Saya belum tahu persis bagaimana kualitas karya-karya PIMNAS ke-31. Tapi saya optimis semakin bagus dari tahun ke tahun. Pengalaman saya sejak 2012, PIMNAS senantiasa menggetarkan. Banyak gagasan yang membuat decak kagum. Anak muda memang tempatnya gagasan-gagasan kreatif progresif. Benar Bung Karno. Untuk mengguncang dunia, Bung Karno hanya butuh 10 pemuda progresif. Dan itu orang-orang yang terbiasa berpikir *out of the box*.

Berpikir *out of the box* adalah kata kunci kreativitas. Realitas (kebudayaan) bukan *given*. Bukan tiba-tiba. Realitas adalah konstruksi (bikinan) sosial. Siapa yang punya andil besar dalam konstruksi tersebut? Tentulah orang-orang kreatif. Merekalah agen kebudayaan. Bukan resipien kebudayaan. Maka perubahan kebudayaan meniscayakan kreativitas.

Mari kita lihat sejarah bangsa Indonesia. Saya kira sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah perjuangan pikiran-pikiran

kreatif. Para pendiri bangsa, para tokoh pergerakan adalah para pejuang perubahan kebudayaan. Mereka tidak menerima realitas penjajahan. Realitas itu hanya menguntungkan kaum penjajah. Mereka tahu ada realitas lain yang lebih baik.

Realitas dibaca tidak seperti biasanya. Maka muncullah pikiran-pikiran kreatif-imajinatif. Mereka mendiskusikannya melalui berbagai aktivitas pergerakan. Menulis melalui media-media pergerakan. Berpidato, berceramah melalui pertemuan-pertemuan. Aktivitas pergerakan yang memfasilitasi pikiran kreatif-imajinatif itu lalu membuahkan “bayi” bangsa Indonesia. Bayi itu membesar. Bertambah dewasa. Dan terjadilah kemerdekaan bangsa Indonesia.

Di tubuh bangsa Indonesia memang penuh karya yang memperlihatkan daya kreativitas tinggi. Lihatlah Pancasila. Bung Karno bilang, Pancasila digali dari bumi Indonesia. Kita tahu bumi Indonesia memiliki warisan kebudayaan yang hebat. Di sekitar Yogyakarta, tempat digelar PIMNAS ke-31, ada Candi Borobudur dan Prambanan. Tak mungkin berdiri candi semegah itu tanpa kebudayaan dan orang-orang hebat. Mereka tentu orang-orang yang menguasai ilmu matematika, ilmu bahan, ilmu seni pahat dan sastra.

Di Yogyakarta juga ada keraton, yang tata arsitekturnya sangat “antropologis”. Keraton Yogyakarta dibangun dalam garis lurus dengan alun-alun, Malioboro, Tugu, dan puncak Merapi. Tata arsitektur ini tentu sangat bermakna. Merefleksikan tata pandang Jawa.

Tapi bumi Indonesia juga ditakhlukkan oleh Barat. Kolonialisme-imperialisme membuat kehebatan masa lalu tak berbekas dalam jiwa masyarakat Indonesia. Yang tersisa tinggallah kekalahan demi kekalahan. Terkagum-kagum dengan Barat.

Realitas inilah yang dibaca secara *out of the box*. Lalu

Pancasila dirumuskan. Barat hebat dan kampiun demokrasi, tapi menjajah. Membuat bangsa lain tertindas, menderita dan miskin. Maka, kata Bung Karno, demokrasi untuk bangsa Indonesia tak boleh hanya berkaki politik. Demokrasi harus pula berkaki ekonomi. Demokrasi harus menyejahterakan.

Maka bila bangsa Indonesia kelak digdaya selama masih berpegang pada Pancasila tak akan pernah membuat bangsa lain terjajah. Para tetangga tak perlu gusar. Justru sebaliknya, Pancasila mengajak pembebasan dunia dari penjajahan bangsa-bangsa. Dan ini salah satu pikiran kreatif di dalam Pancasila.

Tanpa terasa kereta api Sancaka yang saya tumpangi sudah berhenti di Stasiun Solo. Saya harus segera mengakhiri catatan ini. PIMNAS memang didorong untuk melahirkan generasi kreatif, sekaligus taat azas. Terbayang dalam lamunan saya kemegahan Candi Borobudur, Prambanan, Keraton Yogya yang lurus dengan puncak Merapi. Bukan hanya penguasaan ilmu teknisnya, tapi juga perspektifnya yang menyatu dengan kosmos. Ini sangat indah bila anak-anak muda kita mampu mengembalikannya. Ini tantangan kampus ke depan. Untuk kejayaan masa depan bangsa Indonesia. Juga dunia. **(29 Agustus 2018)**

Tuan di Negeri Sendiri

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-31 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) telah berlalu. Tapi saya pulang membawa beban tak ringan.

Melihat para ilmuwan muda yang tampil di PIMNAS, saya sangat optimis. Mereka hebat. Kreativitasnya saya acungi jempol. Tiga jempol. Merekalah tulang punggung kejayaan Indonesia masa depan.

Tapi saya juga tersengat oleh pernyataan Profesor Suminto. Juri PIMNAS asal UNY yang menjadi mitra saya itu beberapa kali bilang, “Jadilah tuan di negeri sendiri!” Profesor yang juga seniman itu tampak gemas menyaksikan beberapa ilmuwan muda kita “terlalu Barat”.

Mereka suka menggunakan istilah bahasa Inggris. Padahal ada yang bahasa Indonesia. Seperti kata *game*, *bullying*. Apakah bila kita memakai kata *permainan* (untuk *game*) dan *perundungan* (untuk *bullying*) ada konsep yang hilang?

Penggunaan istilah asing itu telah mewabah di Indonesia. Di Banyuwangi pun mudah dijumpai. Kita lebih mudah menemukan *cafe* daripada *kafe*. Kita tak tahu, bahwa *cafe* telah diindonesiakan menjadi *kafe*. Kalau pun tahu, tak mau memakainya. Dianggap kurang gengsi. Kurang gaul.

Di panggung festival musik jazz di Banyuwangi tempo hari juga tertulis *Banyuwangi Beach Jazz Festival 2018*. Benarkah bila ditulis *Festival Jazz Pantai Banyuwangi 2018* kurang keren? Toh penonton pada umumnya orang Indonesia. Juga *Banyuwangi Ethno Carnival*. Kurang gaulkan *Karnaval Etnik Banyuwangi?*

Saya lalu teringat esai Andre Moller di *Kompas* (23 November 2013). Ahli bahasa asal Swedia ini kecewa saat berada di Yogyakarta, yang dikenal sebagai “daerah istimewa”. Kata Moller, kesan “istimewa” itu berkurang tatkala di sejumlah tempat bertebaran istilah berbahasa Inggris. Seperti *Sahid Jogja Lifestyle, Jogja City Mall, Malioboro City*. Kritik orang Eropa itu sederhana, tapi mengena.

Profesor Suminto juga menyinggung pemahaman konsep teoritis. Bukan cuma istilah. Kita, termasuk ilmuwan muda yang tampil di PIMNAS, dinilai sering gegabah, *sebrono*. Sang profesor tampak tak rela kita dengan gampang menganggap rendah budaya literasi masyarakat di Nusantara. Ukurannya sering bias Barat. Bersifat etnosentris.

Bagi saya kritik tersebut serius. Menyentak. Selama ini pernyataan “tuan di negeri sendiri” biasa dimaknai “ekonomi”. Ternyata bisa pula “perspektif”. Mengingatkan tesis Habermas, filsuf asal Jerman, bahwa ilmu pengetahuan tak bebas nilai, kepentingan dan kekuasaan. Juga instrumennya. Termasuk bahasa, tak bebas nilai, kepentingan dan kekuasaan.

Baik bahasa maupun perspektif yang dikritik Profesor Suminto, saya kira, bagian dari persoalan masyarakat pascakolonial. Ada aspek “jiwa” yang selalu inferior. Merasa kalah. Lalu menilai segala yang berbau Barat lebih hebat. Layak dipilih. Digunakan mentah-mentah.

Saya kira, kampus perlu memperhatikan secara serius. Kampus mengelola ruang kreatif kebudayaan paling strategis

dan vital. Harus dibuka ke arah terjadinya hubungan antarteks yang intensif. Agar muncul refleksi-kritis. Muncul sintesis-sintesis dari persilangan antarteks.

Sejarah kebudayaan kita mengajarkannya. Epos Mahabharata dari India tak diterjemahkan secara langsung begitu saja oleh para pujangga dahulu. Melainkan diubah sesuai dengan cara yang sangat kreatif.

Di Jawa, misalnya, muncul tokoh punakawan (Semar, Gareng, Petruk, Bagong). Yang selalu mendampingi kesatria Pandawa. Punakawan mewakili profil rakyat kecil. Tapi memiliki kesaktian melampaui para kesatria dan dewa. Sebuah tata pandang Jawa yang khas.

Teks Mahabharata juga menurunkan cerita carangan amat banyak. Ada yang bertajuk *Petruk Dadi Ratu* (Petruk Jadi Raja). Maka jangan mencari Punakawan di India. Juga di Mahabharata versi sinema televisi. Pasti tak berjumpa.

Sejarah Indonesia modern pun mengajarkannya. Nasionalisme yang melahirkan bangsa Indonesia dengan segenap piranti kenegaraan seperti Pancasila adalah karya agung. Muncul dari refleksi-kritis persilangan antarteks.

Saya mengamini pandangan Siegel (1997). Indonesia tumbuh bukan dari sumber asli, juga bukan dari pinjaman asing. Melainkan tumbuh dari kreativitas di dalam hubungan antara yang terjajah dan yang menjajah, masa lalu dan masa kini, dunia lama (tradisi) dan dunia baru (modern).

Maka Pancasila sebagai dasar negara bukan tumbuh dari warisan nenek moyang, juga bukan contekan Barat. Melainkan efek persilangan antarteks. Budaya warisan nenek moyang dikritik. Di antaranya sifat feodalistiknya. Tapi Barat juga tidak dicontek mentah-mentah. Teks diubah-suai kondisi masyarakat. Mengalami “indonesiaisasi”.

Soal nasionalisme dan demokrasi misalnya. Dengan gam-

blang Bung Karno memperlihatkan cacat nasionalisme dan demokrasi ala Barat. Nasionalisme Barat dikritik sebagai nasionalisme yang chauvinis, etnosentris. Nasionalisme yang menjajah. Lalu ditawarkan konsep yang disebutnya sosio-nasionalisme. Nasionalisme yang berperikemanusiaan. Yang tak menjajah bangsa lain.

Demokrasi Barat pun dikritik. Hanya berdimensi politik. Tak cocok buat Indonesia. Bung Karno menawarkan konsep sosio-demokrasi. Demokrasi yang bukan hanya berkaki politik, tapi juga ekonomi. Demokrasi yang menyejahterakan.

Untuk memahami kemiskinan di negeri jajahan, Bung Karno juga pernah menawarkan marhaenisme. Marxisme yang sangat tersohor di dunia ilmu-ilmu sosial dinilai tak cocok untuk memahami kemiskinan masyarakat jajahan Hindia-Belanda.

Kreativitas memang penting buat inovasi. Tapi tanpa refleksi-kritis ilmu pengetahuan yang inovatif tak ada gunanya bagi bangsa ini. Juga bagi umat manusia di dunia. Tanpa refleksi-kritis ilmu pengetahuan kehilangan asas kemanusiaannya. Hanya akan menjadi alat dominasi, eksploitasi, dan penjajahan.

Maka kampus haruslah mengawal ruang kreatif kebudayaan. Pembelajaran, penelitian, dan aktivitas kampus yang lain harus didorong untuk menjamin tumbuhnya persilangan antarteks. Lalu refleksi-kritis untuk menghasilkan konsep teoritis khas Indonesia. Termasuk bahasa.

Saya kira di sinilah hal penting revolusi mental: “indonesiaisasi”. Dengan “indonesiaisasi” kita menjadi tuan di negeri sendiri. Pikiran maupun tindakan. **(13 September 2018)**

Kereta Api

Setiap 28 September diperingati Hari Kereta Api Nasional. Untuk mengenang peristiwa bersejarah pasca-proklamasi kemerdekaan RI. Yakni pengambilalihan Balai Besar Kereta Api Bandung oleh pegawai kereta api Indonesia. Dari kekuasaan kolonial Jepang. Sekaligus menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Cikal bakal PT KAI (Kereta Api Indonesia).

Jalur kereta api di Indonesia mulai dibangun pada 1864. Masa kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda LAJ Baron Sloet van de Beele. Pencangkulan tanah pertamanya dilakukan di Desa Kemijen, Semarang, oleh sang gubernur jenderal.

Tapi baru 1876 jalur kereta api itu operasional. Lokomotif mulai menderu-deru menarik sejumlah gerbong. Di atas rel yang menghubungkan Semarang – Solo – Yogyakarta. Menggunakan mesin uap dari nyala api. Maka disebutlah “kereta api”.

Sekarang saya sangat menikmati setiap perjalanan dengan kereta api. Meski hanya kelas ekonomi. Murah, nyaman, aman, dan tepat waktu. Lebih cepat daripada berkendara di jalan raya. Perjalanan Jember – Banyuwangi yang mengisi hari-hari saya seperti tak terasa.

Saya juga bisa menulis. Banyak inspirasi muncul saat

berkereta api. Latar belakang penumpangnya beragam. Apalagi di kelas ekonomi. Penumpangnya mayoritas rakyat kebanyakan. Banyak cerita kehidupan rakyat kebanyakan yang inspiratif. Beberapa cacatan saya di *Radar Banyuwangi* pun terinspirasi fenomena di kereta api.

Tapi kereta api ternyata bukan sekadar sarana transportasi masal. Mulai dibangun oleh pemerintah kolonial pada 1864. Sebuah kurun waktu tatkala pemerintah kolonial sedang menyiapkan sistem kolonialisme baru berdasarkan *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) 1870. Yang mengakhiri sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*).

Inti sistem kolonialisme baru adalah praktik kapitalisme perkebunan. Terutama di Jawa. Maka pertama-tama harus dilakukan reorganisasi pertanahan. Untuk mendukung perluasan perkebunan. Dasarnya *Agrarische Wet* 1870. Para pemodal diberi kesempatan luas membuka perkebunan.

Ibarat ada gula ada semut. Kolonialisme baru sejatinya adalah dampak perkembangan kapitalisme agraris di Eropa. Diboyong ke luar Eropa tak lain adalah dalam rangka eksploitasi dan akumulasi sumber kekayaan tanah jajahan. Bukan untuk rakyat jajahan. Melainkan untuk negara induk.

Kolonialisme baru itu memandang tanah jajahan sebagai sumber produksi. Tanah dan tenaga kerja melimpah. Di tanah jajahan dimungkinkan dilakukan eksploitasi produksi pertanian yang menguntungkan negara penjajah. Ada gula, maka semut berdatangan. Para pemodal berbondong-bondong membuka perkebunan di segenap wilayah yang cocok.

Maka tak aneh bila kita berkereta api Jember – Banyuwangi akan disuguhi jejak kolonialisme baru itu. Kereta api menderuderu menyusuri lereng Gunung Gumitir. Dari jendela kereta tampak hamparan perkebunan kopi. Pada waktu tertentu juga perkebunan tembakau dan tebu.

Kereta api juga melewati Terowongan Mrawan sepanjang 690 meter. Dibangun pada 1901. Jelas tak akan mampu membangun terowongan sepanjang itu pada tahun itu tanpa kekuasaan besar. Tanpa modal dan kepentingan besar.

Bisa dimengerti bila sastrawan besar negeri ini, Pramoedya Ananta Toer, melihat kereta api sebagai simbol kedigdayaan “zaman baru”. Pram melukiskannya dalam *Bumi Manusia*. “Jaringan jalan kereta api telah membelah-belah pulauku, Jawa. Kepulan asapnya mewarnai langit tanah airku dengan garis hitam, semakin pudar untuk hilang dalam ketiadaan.” (Toer, 2001:3)

Kereta api – kereta tanpa kuda, tanpa sapi, tanpa kerbau, sebuah kereta yang dihidupi api – menderu-deru di atas rel yang membelah daerah pedusunan-persawahan yang hijau dan sunyi. Mula-mula hanya mengangkut hasil perkebunan. Tapi kemudian mengangkut orang Jawa menuju kota-kota penting di Jawa.

Orang-orang yang naik kereta api dapat memandangi pedusunan mereka yang tenang dan damai dari jendela kereta. Dari suatu dunia lain. Dari sudut pandang lain. Rel kereta api telah menembus tanah Jawa. Membuat Yogyakarta dan Solo, tempat para raja Jawa bertahta, tak lebih dari persimpangan jaringan jalur besar kereta api. Yang memanjang dari Jakarta, Surabaya, lalu Banyuwangi.

Perubahan tata pandang lama atas ruang, waktu, manusia dan seluruh tata dunia yang sudah berabad-abad dipegang teguh oleh masyarakat tak terelakkan. Kereta api telah menjadi instrumen penting perubahan kebudayaan yang radikal di Indonesia. Kereta api simbol zaman baru. Simbol suatu “rezim”.

Kedigdayaannya telah mengalahkan kuda, sapi, dan kerbau. Dulu kita punya kereta yang ditarik kuda, sapi, kerbau. Sebelum kapitalisme menyerbu. Saat laju kereta tak menimbulkan

kebisingan. Tatkala orang belum memikirkan pelipatgandaan modal.

Tapi sejak awal 1970-an kapitalisme makin intensif menyerbu pelosok negeri. Rezim berkiblat pada Revolusi Hijau di perdesaan. Kapitalisme perdesaan tak terelakkan.

Kedigdayaan kereta api pun tak lagi memadai. Revolusi Hijau konon membutuhkan jalan raya. Untuk menghubungkan desa satu ke desa lain. Desa ke kota. Kota satu ke kota lain. Pada masa itu dimulailah pembangunan jalan raya dan jembatan di mana-mana. Terutama berkat pinjaman Jepang.

Rezim kereta api pun mulai digeser jalan raya. Tak ada pengembangan perkereta-apian. Terkesan dibiarkan begitu saja. Lokomotif dan gerbongnya tampak tua-tua. Teknologinya pun ketinggalan zaman.

Juga tak ada jalur baru rel kereta api. Rel ganda juga tidak. Tahun 1970-an juga akhir transportasi trem di sejumlah kota di Indonesia.

Jalan raya lalu penuh Kijang, Kuda, Panther. Bukan binatang penarik gerobak. Melainkan gerobak bermesin buatan Jepang. Pemberi pinjaman dulu.

Kijang, Kuda, Panther kini melesat memadati jalan raya. Jalan raya pun makin sering macet. Makin hiruk-pikuk. Sangat tidak nyaman. Bahkan menelan banyak korban jiwa. Pertanda apa? Kapitalisme yang menyerbu pelosok negeri harus dikendalikan.

Saya membayangkan kedigdayaan kereta api perlu dipulihkan. Diberi makna baru. Meski namanya tetap kereta api. Meski bukan lagi dengan nyala api. Dan entah perubahan kebudayaan macam apa lagi? **(27 September 2018)**

Merajut Persatuan Merawat Kebangsaan

Andang Subaharianto

Realitas masyarakat Indonesia di manapun berada sangat kental dengan keragaman. Keragaman flora, fauna hingga budaya, agama, tradisi, etnis, bahkan ras dapat dilihat di mana mana. Kebhinekaan yang berkelindan dalam masyarakat itulah yang memberikan watak atau peringai masyarakat Indonesia bersifat toleran dan berfikir terbuka.

Tulisan-tulisan Andang Subaharianto, yang juga rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, yang dikumpulkan dalam buku ini mampu mengungkapkan hal tersebut. Dinamika masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya berhasil dinarasikan dalam pelbagai perspektif, khususnya perspektif kebangsaan, politik dan kebudayaan dalam bahasa keseharian yang lebih komunikatif.

Prof. Dr. Hariyono, M. Pd

Untag
BANYUWANGI

ISBN 978-602-53709-0-8

